

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

#### A. Kondisi Umum Daerah

Berdasarkan beberapa sumber yang ada, sejarah Kabupaten Kebumen berawal dari kedatangan bangsawan ulama dari Kerajaan Mataram bernama Kyai Pangeran Bumidirjo di Panjer pada tahun 1670. Berdasarkan bukti-bukti sejarah Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi Kyai Pangeran Bumidirjo, mendapat awalan ke dan akhiran an yang menyatakan tempat. Hingga kini, Kabupaten Kebumen terus berkembang dengan dinamika pembangunan yang terus terjadi di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya untuk mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakatnya. Secara lengkap gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

##### 1. Aspek Geografi dan Demografi

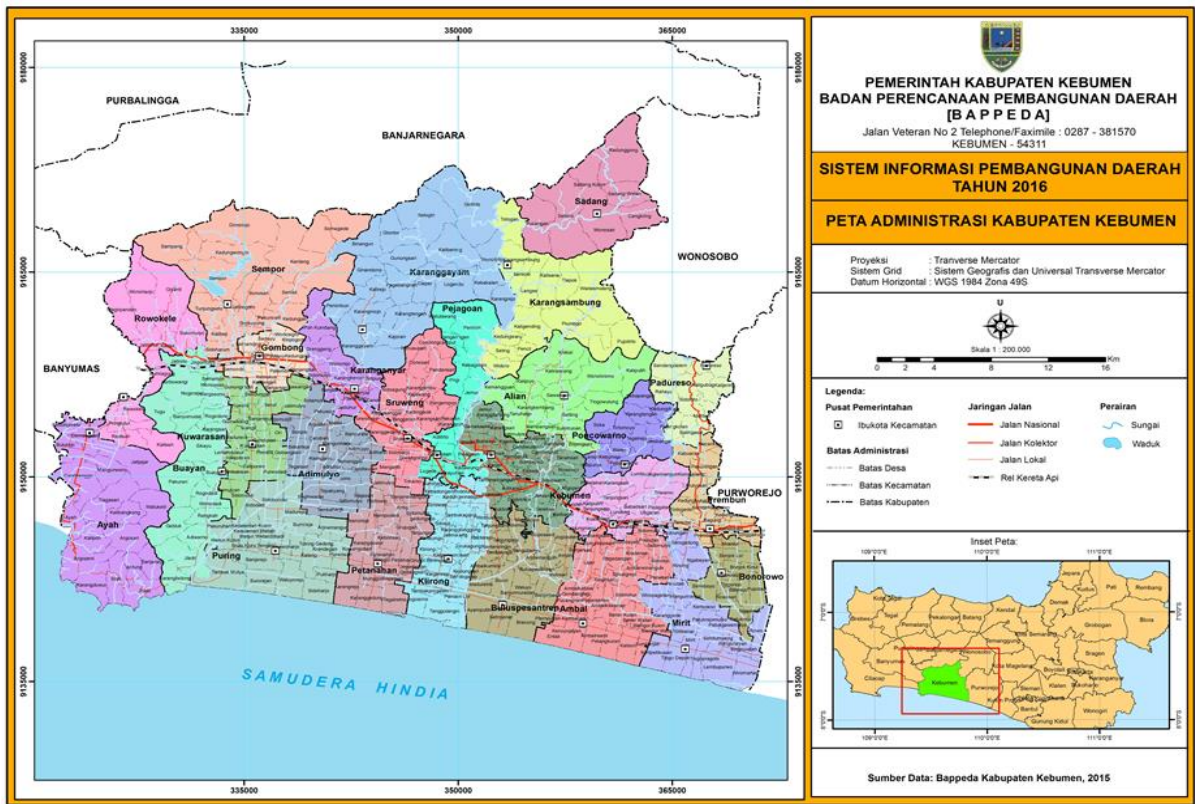
###### a. Aspek Geografi

###### 1) Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Kebumen terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

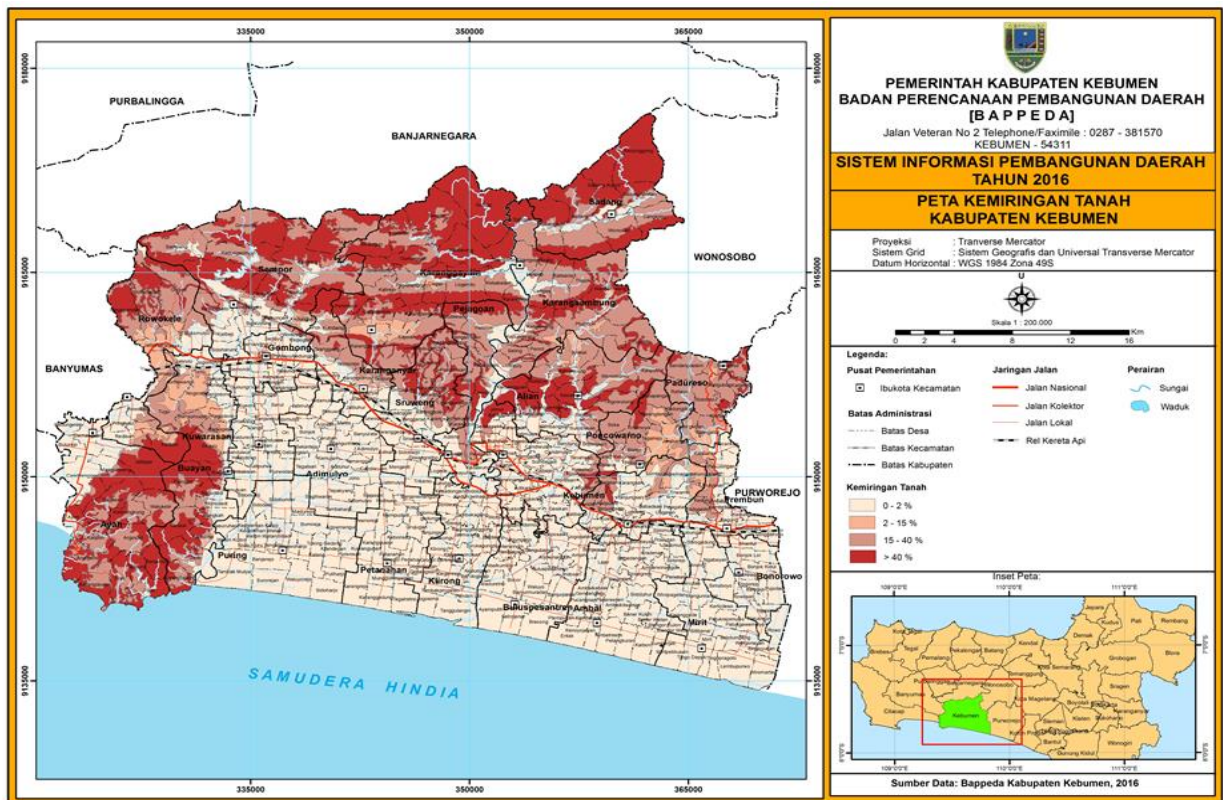
- a) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas;
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo; dan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Kebumen dalam konteks regional memiliki posisi yang strategis sebagai simpul penghubung di wilayah selatan pulau Jawa yaitu menghubungkan kota-kota besar yang menjadi kawasan pusat pertumbuhan baik tingkat regional maupun Nasional. Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Sementara itu, secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, yang mencakup sejumlah 449 desa dan 11 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi (lihat gambar 2.1). Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen sebagian besar adalah dataran rendah dan sebagian lainnya berupa perbukitan dan wilayah pantai.



Gambar 2.1  
Peta Wilayah Kabupaten Kebumen  
Sumber: Bap3da, 2017

## 2) Topografi



Gambar 2.2  
Topografi Kabupaten Kebumen  
Sumber: Bap3da, 2017

Dilihat dari kondisi topografinya, Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 3 wilayah topografi, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Di selatan daerah

Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut. Sedangkan jika dilihat kemiringan tanahnya, maka dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, seperti terlihat pada gambar di atas.

3) Hidrogeologi

Di bagian selatan Kabupaten Kebumen, sebagian besar tersusun oleh dataran rendah dan karst yang mempunyai potensi sumber daya air tanah dengan produktivitas tinggi-sedang. Namun pada sebagian wilayah di bagian utara yang berupa rangkaian pegunungan dan perbukitan memiliki litologi batuan bersifat tufaan yang potensi sumber daya air tanahnya secara umum rendah. Pada daerah karst, ketersediaan air baik air tanah maupun air permukaan pada umumnya cukup baik (sedang), namun total kandungannya, posisi reservoir serta kualitas air belum teridentifikasi dengan jelas dan pada musim kemarau jumlah airnya sangat terbatas. Sedangkan untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti daerah sekitar bumi perkemahan Desa Widoro Kecamatan Karangsambung serta daerah Kecamatan Padureso, pada musim penghujan keberadaan airnya cukup baik, namun pada musim kemarau sangat kekurangan air.

4) Klimatologi

Kabupaten Kebumen memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Desember-Maret, sedangkan musim kemarau pada bulan April-Juli. Curah hujan rata-rata sepanjang tahun 2017 sebesar 5.098,00 milimeter pertahun, hari hujan tahunan sebanyak 245 hari, temperatur udara berada pada kisaran 22,5–35,2°C. Rata-rata kelembaban udara setahun 86,5% dan rata-rata kecepatan angin antara 1,55-1,93 knot.

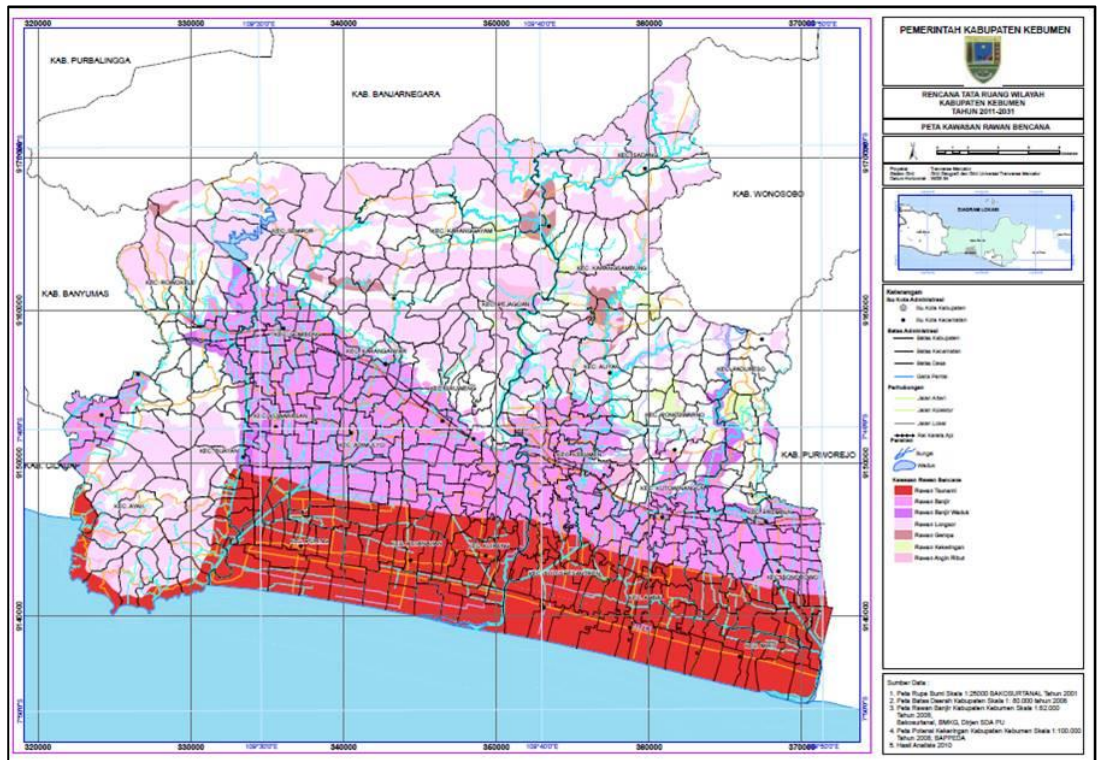
5) Penggunaan Lahan

Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan, baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2017 tercatat 39.886,20 hektar atau sekitar 31,13% adalah lahan sawah dan 88.225,30 hektar atau 68,87% adalah lahan kering. Menurut sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi (65,10%) dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, dan sebagian lagi berupa sawah non irigasi (34,90%).

Penggunaan lahan kering (bukan sawah) di Kabupaten Kebumen dibagi menjadi untuk lahan pertanian sebesar 54.820,50 hektar (62,14%) dan bukan lahan

pertanian mencapai 33.404,80 hektar (37,86%). Lahan kering untuk pertanian tersebut sebagian besar untuk tegalan/kebun mencapai 27.629,00 hektar. Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian sebagian besar untuk rumah/bangunan dan lahan sekitarnya seluas 26.021,00 hektar dan berupa hutan negara seluas 16.861,00 hektar.

#### 6) Wilayah Rawan Bencana



Gambar 2.3

Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen

Sumber: RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

Kabupaten Kebumen adalah salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah, yaitu rawan longsor, rawan banjir, rawan kekeringan atau rawan air bersih dan rawan tsunami. Terdapat satu kecamatan yaitu Kecamatan Ayah yang merupakan daerah rawan 4 jenis bencana tersebut. Daerah rawan bencana tanah longsor terdiri dari 116 desa di 16 kecamatan, rawan bencana banjir 108 desa di 15 kecamatan, serta daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih di 83 desa di 16 kecamatan. Sedangkan daerah yang berpotensi tsunami ada di 52 desa di 12 kecamatan.

#### b. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kebumen berada di wilayah selatan Jawa Tengah, di sepanjang pantai selatan dengan garis pantai 53 km mulai dari Mirit sampai ke Ayah. Dengan rencana operasional Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo pada Tahun 2019, maka aksesibilitas menuju Kebumen menjadi lebih mudah dan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertimbangan para pihak yang akan berkunjung atau berinvestasi. Untuk itu dalam upaya

menangkap peluang tersebut, Kebumen perlu membuat konsep pengembangan wilayahnya dengan menciptakan gerbong penarik ekonomi wilayah yang memiliki *multiplier effect* tinggi untuk masyarakat dengan didukung infrastruktur yang memadai. Beberapa konsep potensial akan dikembangkan di wilayah kebumen yaitu:

1) Potensi Wilayah Berdasar RTRW

Pengembangan Kabupaten Kebumen telah direncanakan untuk menjadi beberapa struktur ruang wilayah seperti halnya yang telah termuat pada dokumen RTRW Tahun 2011-2031. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya. Sistem Jaringan Prasarana wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem prasarana utama berupa sistem jaringan transportasi yang meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan perkeretaapian. Jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

Jaringan jalan dibagi menjadi jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan jaringan jalan kabupaten. Jaringan jalan bebas hambatan meliputi jalan Ciamis-Cilacap-Yogyakarta. Jaringan jalan nasional meliputi ruas Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah yang berupa jalan arteri primer sebagai jalan strategis nasional; dan jalan arteri sekunder yaitu ruas jalan perbatasan Jawa Barat-Cilacap-Kebumen-Perbatasan Yogyakarta; ruas jalan batas Banyumas Tengah-Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih 23,895 km; ruas jalan lingkaran selatan Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih 9,108 km; ruas jalan batas Kota Kebumen-Prembun dengan panjang ruas kurang lebih 17,05 km; ruas jalan menuju Purworejo dengan panjang ruas kurang lebih 4,224 km; dan ruas jalan Prembun-Kutoarjo dengan panjang ruas kurang lebih 12,75 km.

Jaringan jalan provinsi meliputi: Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara; Prembun-Wadaslintang (Batas Kabupaten Wonosobo) dengan panjang 15,640 km; Gombong-Sempor-Ketileng (Batas Kabupaten Banjarnegara) dengan panjang 14,030 km; dan Wadaslintang-Selokromo dengan panjang 37,100 km. Sedangkan jaringan jalan kabupaten merupakan jalan penghubung antar ibu kota kecamatan, meliputi: ruas jalan Kebumen-Petanahan; ruas jalan Prembun-Kebumen-Gombong; ruas jalan Kebumen-Wonosobo melalui Prembun-Padureso; ruas jalan Kebumen-Banjarnegara

melalui Gombong-Sempor; ruas jalan Kebumen-Karangsambung-Sadang dan Karangsambung-Girikerto sebagai akses ke Banjarnegara dan Wonosobo; ruas jalan Karang-anyar-Karanggayam-Pagebangan; ruas jalan Gunungsari-Selogiri-Banjarnegara; dan ruas jalan Prembun-Bonorowo-Mirit.

Rencana jaringan perkeretaapian meliputi: jalur Solo-Bandung/Jakarta; dan jalur Solo-Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya melalui Kecamatan Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Karanganyar, Gombong, dan Rowokele. Pengembangan jaringan perkeretaapian ini akan memperlancar mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Kebumen.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan suaka alam dan cagar budaya; kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan hutan lindung meliputi wilayah Kecamatan Karangsambung, Karanggayam, Sempor, Rowokele, Pejagoan, Sruweng, Buayan, dan Ayah. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air dan kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung, kecamatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Sadang, Rowokele, Sempor, Karangsambung, Padureso, Rowokele, Buayan, Ayah, dan Poncowarno, sedangkan wilayah di luar kawasan hutan lindung antara lain Kecamatan Alian, Ayah, Buayan, Gombong, Karanganyar, Karangsambung, Karanggayam, Kebumen, Padureso, Pejagoan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, dan Sruweng.

Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan Sekitar Mata Air yaitu di Kecamatan Ayah, Rowokele, dan Buayan. Kawasan Sempadan Sungai meliputi sempadan dengan luas 2.506 hektar beserta anak sungainya meliputi Sungai Luk Ulo, Sungai Ijo, Sungai Telomoyo, dan Sungai Mawar. Kawasan sempadan pantai meliputi sempadan dengan jarak 100 meter dari titik tertinggi yaitu membentang dari Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah timur Kecamatan Mirit berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Kawasan sempadan danau atau waduk berupa kawasan sabuk hijau sepanjang perairan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi seluas kurang lebih 245 hektar yang berada di Waduk Wadaslintang Kecamatan Padureso dan Waduk Sempor Kecamatan Sempor. RTH

perkotaan meliputi ibukota kecamatan dan kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 4.478 hektar atau sekitar 46,53% dari luas permukiman yang meliputi: RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20% dan RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi 10%.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan cagar budaya. Kawasan pantai berhutan bakau berada di sebagian kawasan pesisir Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong. Kawasan cagar budaya meliputi:

- a) Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong
- b) Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah
- c) Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor
- d) Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi di Kecamatan Kebumen
- e) Goa Menganti di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah
- f) Situs Makam Mbah Lancing di Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit
- g) Situs Makam Mbah Somalangu di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen
- h) Situs Makam Mbah Untung Suropati di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam
- i) Situs Makam Mbah Agung di Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam
- j) Situs Makam Mbah Pako di Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam
- k) Situs Makam Mbah Pagerjawa di Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam
- l) Pesanggrahan Bulupitu di Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun
- m) Pesanggrahan Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan
- n) Pesanggrahan Karangbolong di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan.

Kawasan lindung geologi Kabupaten Kebumen meliputi: kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung; Kawasan Bentang Alam Karst; dan Kawasan imbuhan air tanah. Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung seluas kurang lebih 18.340 ha (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh hektar), meliputi: (i) Kecamatan Karangsambung; (ii) Kecamatan Karanggayam; (iii)

Kecamatan Sadang; (iv) Kecamatan Pejagoan; dan (v) Kecamatan Alian.

Kawasan Bentang Alam Karst meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele dan Buayan seluas kurang lebih 4.089 ha (empat ribu delapan puluh sembilan hektar) sesuai Kepmen ESDM Nomor: 3873K/40/MEM/2014 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM Nomor: 3043K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang. Sedangkan Kawasan Imbuhan Air Tanah meliputi Cekungan Air Tanah Kebumen-Purworejo dengan luas kurang lebih 1.127 km<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh tujuh kilometer persegi), Cekungan Air Tanah Banyumudal dan Cekungan Air Tanah Kroya.

Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 ditetapkan kawasan strategis wilayah Kabupaten sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang. Kawasan strategis adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:

- a) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Kawasan ini meliputi:
  - a.1. Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen;
  - a.2. Komando Rayon Militer;
  - a.3. Polisi Resor;
  - a.4. Polisi Sektor;
  - a.5. Sekolah Calon Tamtama;
  - a.6. Detasemen Kesehatan TNI;
  - a.7. Daerah latihan TNI;
  - a.8. Daerah latihan dan uji coba TNI;
  - a.9. Lapangan uji coba senjata; dan
  - a.10. Pos TNI Angkatan Laut.
- b) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
  - b.1. Kawasan Geologi Karangsambung; dan
  - b.2. Kawasan DAS Serayu-Bogowonto

- c) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Jalan Strategis Nasional.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:

- a) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b) Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- c) Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:

- a) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi:
  - a.1. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong;
  - a.2. Kawasan pesisir Ayah;
  - a.3. Kawasan Petanahan;
  - a.4. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor, dan Karanggayam;
  - a.5. Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
  - a.6. Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
  - a.7. Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan.
- b) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Kawasan ini meliputi:
  - b.1. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
  - b.2. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
  - b.3. Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor; dan
  - b.4. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.
- c) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
  - c.1. Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo; dan

- c.2. Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang.
  - d) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi, meliputi:
    - d.1. Kawasan Waduk Sempor; dan
    - d.2. Kawasan Waduk Wadaslintang.
- 2) Geopark Karangsambung

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di wilayah selatan Jawa Tengah yang memiliki kekayaan geologi dan keindahan Alam yang luar biasa. Asal usul nama Kebumen sendiri berasal dari Kabumian, yang berarti fenomena geologi yang ada di dalam bumi ini ada di Kebumen.

Di wilayah Utara, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan yang telah menjadi rujukan bagi seluruh geologist yang ada di Indonesia yaitu kawasan cagar alam geologi Karangsambung yang berada di Kawasan Utara Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Sementara di wilayah selatan, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan karst Gombang selatan dengan topografi pegunungan yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia. Keindahan alam yang ada di kawasan Karst ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga kawasan ini lekat dengan wisata alam Goa, Bukit dan Pantai.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung merupakan salah satu kawasan di wilayah Kebumen bagian utara, meliputi Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Sadang. Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung ditetapkan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2817 K/40/MEM/2006 berupa 30 lokasi bentukan geologi (*geodiversity*) yang terdiri dari 28 situs batuan dan 2 situs mata air panas.

Karangsambung merupakan laboratorium alam dan monumen geologi karena menghadirkan variasi struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif tidak luas. Nilai ilmiahnya bertambah penting setelah lahir teori tektonik lempeng, karena menurut para ahli geologi daerah ini pernah menjadi batas lempeng konvergen berupa jalur subduksi pada jaman Kapur yang berlanjut hingga Pegunungan Meratus, Kalimantan. Batuan-batuan hasil tumbukan tersebut kini terangkat ke permukaan dan dapat diamati dalam kondisi yang relatif segar. Oleh karena begitu pentingnya, kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai Cagar Alam Geologi Nasional yang dikelola oleh Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Karangsambung-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hal ini bertujuan agar batuan-batuan langka yang terdapat di

Karangsambung terlindung dari kepunahan akibat ditambang oleh penduduk. Sebab Karangsambung juga menjadi bukti teori tektonik lempeng dan menjadi referensi dunia.

Kawasan Bentang Alam Karst Gombang merupakan sebuah rangkaian pegunungan atau perbukitan karst yang berada di barat daya Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Karst Gombang sudah ditetapkan sebagai Kawasan bentang Alam Karst Gombang berdasar Keputusan Menteri ESDM Nomor 3873K/40/MEM/2014 dengan luas 40,98 km<sup>2</sup>. Kawasan ini menyangkup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Rowokele. Kawasan karst di Gombang Selatan memiliki luas mencapai 4894 hektar dengan panjang perbukitan kapur 8 km dan lebar 3 km. Di sini juga terdapat 182 gua, 2 telaga karst, sungai bawah tanah, ponor, air terjun dan mata air.

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Fungsi mendorong pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan secara berkelanjutan akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut.

Konsep Geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbang penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka. Saat ini status pengusulan Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen dalam tahap Aspiring Geopark Nasional, diharapkan pada akhir tahun 2019 atau sebelumnya, predikat Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen dapat tercapai.

### 3) Pengembangan Kawasan Industri

Posisi Kebumen yang berada ditengah-tengah dengan kemudahan akses, baik dari Bandara Kulonprogo, maupun pelabuhan di Cilacap, serta dilalui Jalur Jalan Lintas Selatan, menjadi sangat strategis untuk dikembangkan menjadi Kawasan Industri. Kawasan industri yang ada di Kabupaten Kebumen, direncanakan berada di Kecamatan Petanahan dengan luas total kawasan 315 Ha. Diharapkan kawasan industri ini, mampu menarik investor untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menampung lebih banyak tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kebumen.

4) Jalan Lingkar Utara

Sebagai upaya menekan ketimpangan pembangunan kewilayahan antara Kebumen sisi selatan dan utara, maka sejak tahun 2016 diinisiasi pengembangan Jalur Jalan Lingkar Utara sepanjang kurang lebih 50 km. Melintasi Kecamatan mulai dari Rowokele, Sempor, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Alian dan Padureso, keberadaan Jalan Lingkar Utara ini, selain membuka akses bagi wilayah yang selama ini sulit tercapai, juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat baik di wilayah yang dilalui Jalan Lingkar Utara baik secara langsung maupun tidak langsung.

5) Jalan Lingkar Pesisir Ayah (Jangkar Sirah)

Sektor Pariwisata di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun ini menggeliat dengan cukup signifikan. Obyek wisata berbasiskan desa ataupun komunitas mulai banyak muncul dengan ciri khas masing-masing dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, terutama di Kawasan Pesisir Ayah. Tingginya minat wisatawan pada masa-masa tertentu, berdampak pada daya tampung infrastruktur jalan di kawasan tersebut. Untuk perlu dibuat kajian tentang adanya potensi pengembangan jalan lingkar pesisir ayah yang menghubungkan rangkaian obyek wisata di sepanjang pesisir ayah mulai dari karangbolong, sampai ke Ayah, sebagai alternatif jalan satu arah menuju/ kembali dari obyek wisata yang dikunjungi.

6) Kawasan Perdesaan

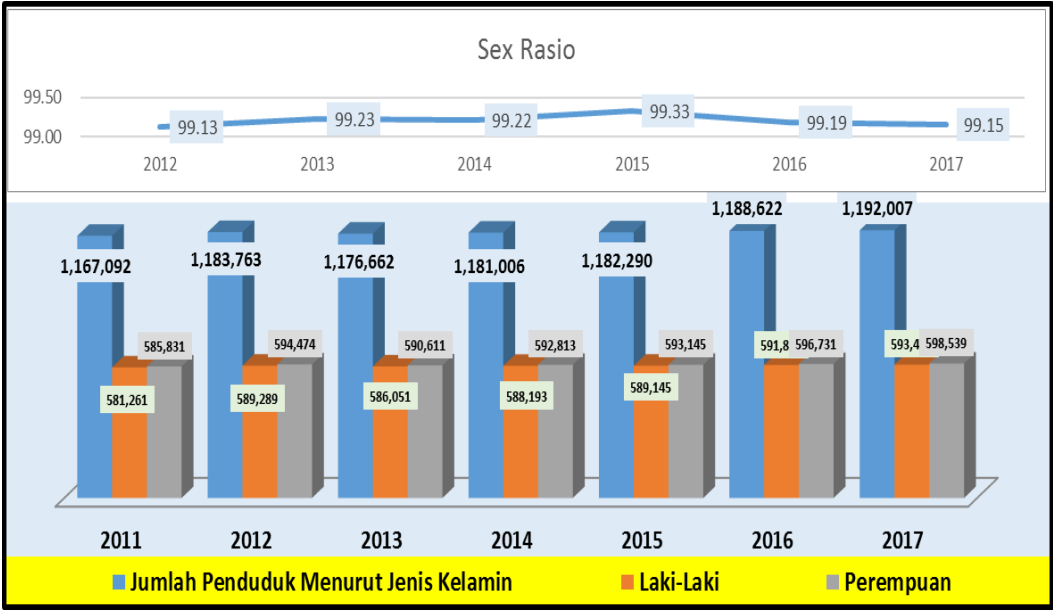
Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Arah kebijakan pengembangan kawasan perdesaan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, serta mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sesuai Keputusan Bupati Kebumen nomor tahun 2016 tentang Pembentukan Kawasan Pedesaan, Kabupaten Kebumen telah memiliki 5 kawasan pedesaan yaitu :

a) Kawasan Wisata Pesisir Menganti, meliputi :

- a.1. Desa Karangbolong Kecamatan Buayan
- a.2. Desa Pasir Kecamatan Ayah
- a.3. Desa Sрати Kecamatan Ayah
- a.4. Desa Karangduwur Kecamatan Ayah
- a.5. Desa Argopeni Kecamatan Ayah
- a.6. Desa Ayah Kecamatan Ayah
- a.7. Desa Candirenggo Kecamatan Ayah

- b) Kawasan Anyaman Pandan, meliputi :
    - b.1. Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar
    - b.2. Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar
    - b.3. Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar
    - b.4. Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam
    - b.5. Desa Karanggayam Kec Karanggayam
  - c) Kawasan Kampung Batik, meliputi :
    - c.1. Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen
    - c.2. Desa Jemur Kecamatan Pejagoan
    - c.3. Desa Jemur Kecamatan Kebumen
  - d) Kawasan Produk Unggulan Gula Semut, meliputi :
    - d.1. Desa Jladri Kecamatan Buayan
    - d.2. Desa Wonodadi Kecamatan Buayan
    - d.3. Desa Rangkah Kecamatan Buayan
    - d.4. Desa Geblug Kecamatan Buayan
    - d.5. Desa Pakuran Kecamatan Buayan
  - e) Kawasan Kampung Peternakan Sapi Terpadu, meliputi :
    - e.1. Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong
    - e.2. Desa Jogosimo Kecamatan Klirong
- c. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.192.007 jiwa, tumbuh sebesar 0,28% dari tahun sebelumnya. Jumlah rumah tangga sebanyak 322.695 rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.060 jiwa/km<sup>2</sup>.



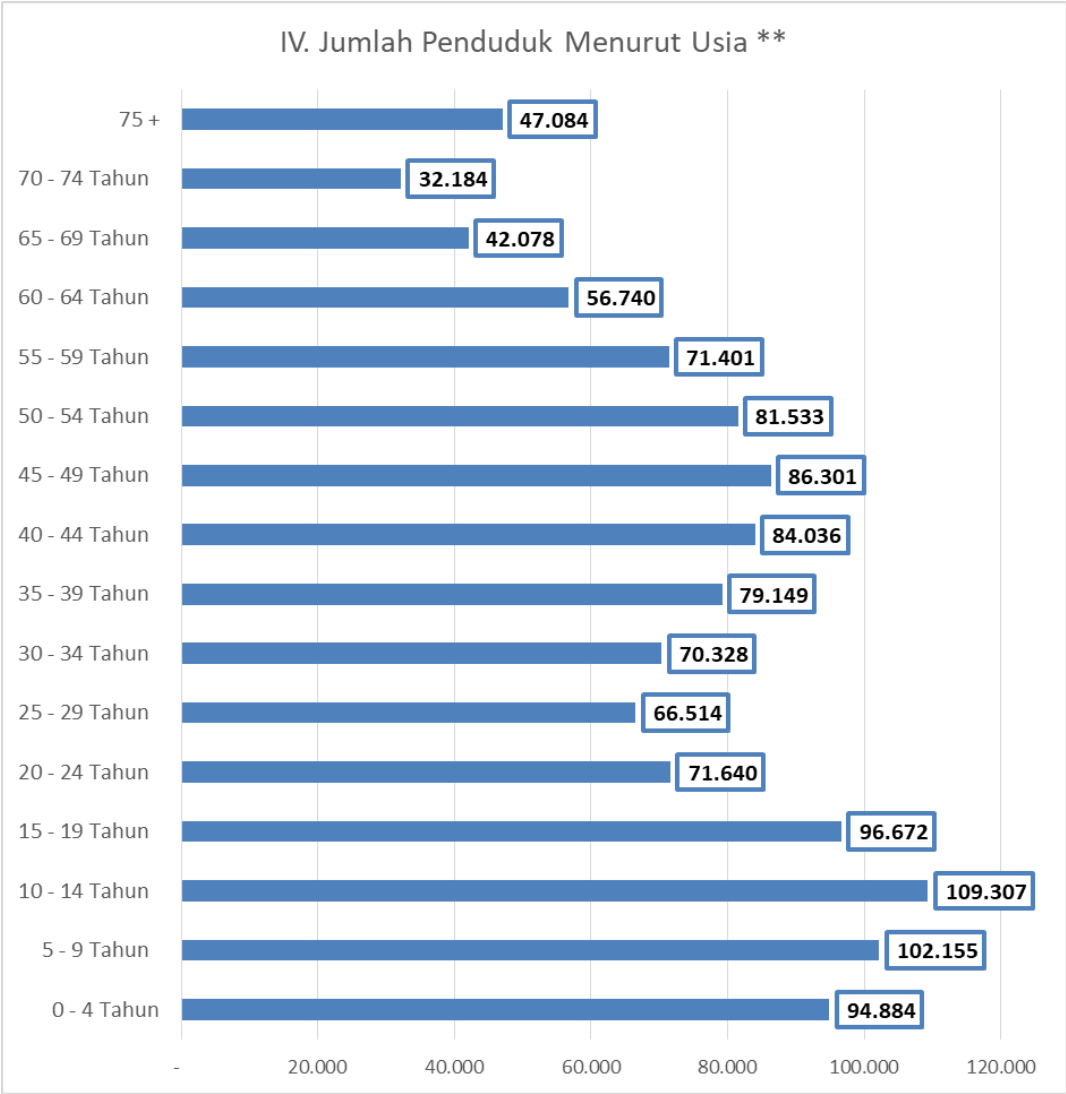
Gambar 2.4  
Pertumbuhan dan Sex Rasio Penduduk Kabupaten Kebumen  
Tahun 2011-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dilihat dari jenis kelamin, pada tahun 2017 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 593.468 jiwa dan perempuan sebanyak 598.539 jiwa, sehingga angka *sex ratio* sebesar 99,15 artinya komposisi penduduk laki-laki 0,99% lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan *sex ratio* di

bawah 100 (seratus) dimungkinkan dengan banyaknya penduduk yang merantau ke luar daerah demi mencari atau mendapatkan lapangan pekerjaan khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa di kota-kota besar, yang didominasi dari kalangan laki-laki.

Sedangkan apabila dilihat dari keadaan penduduk 15 tahun ke atas, menunjukkan komposisi demografi penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 764.315 jiwa dan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 427.692 jiwa. Angka beban ketergantungan pada tahun 2016 tercatat Rasio ketergantungan sebesar 55,96. Artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus menanggung 55-56 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak produktif lagi (tua). Angka rasio ketergantungan ini harus bisa ditekan serendah mungkin. Semakin kecil angka rasio ketergantungan akan menunjukkan semakin baik komposisi penduduk suatu daerah, artinya bahwa penduduk di daerah tersebut semakin produktif.



Gambar 2.5  
Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen  
Tahun 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

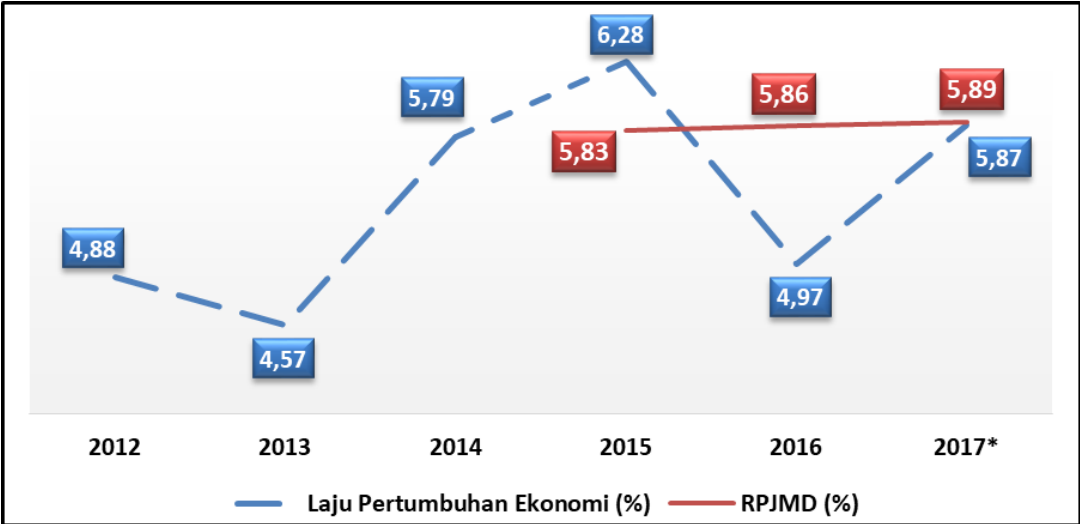
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian secara umum di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan kondisi perekonomian tahun 2015. Pada skala regional (Jawa Tengah), pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,47% pada tahun 2015 menjadi 5,28% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yang terjadi pada tahun 2016 adalah Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,73%, diikuti Kategori Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 10,62% dan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,86%. Sektor yang mengalami pelambatan pertumbuhan yaitu Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun dari 5,60% menjadi 2,13 (turun sebesar 3,47%).



Gambar 2.6  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017  
dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2015-2017  
Sumber : BPS, 2017  
Keterangan : \*) Angka sementara

Sejalan dengan perkonomian yang terjadi secara umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah, perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 juga mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2016 mencapai 4,97%, setelah pada tahun sebelumnya mencapai 6,28%. Sejalan dengan kondisi di tingkat regional, sektor pertanian di Kabupaten Kebumen juga menjadi sektor yang mengalami pelambatan terbesar, bahkan dengan pertumbuhan negatif yaitu -5,84%. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi adalah

sektor konstruksi yang meningkat dari 3,47% pada Tahun 2015 menjadi 13,43% pada Tahun 2016 (meningkat 9,96%). Hal ini dimungkinkan terjadi karena banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan di pusat maupun daerah.

Melihat tren capaian pertumbuhan ekonomi selama tahun 2013-2016 serta tren pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran angka 5,87%. Angka ini mendekati target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 5,89%.

Tabel 2.1  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen  
Tahun 2012-2017

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
PDRB ADHB (Rp. Juta)	15.126.968,96	16.526.133,05	18.645.422,21	20.762.286,13	22.315.248,93	24.259.025,75
PDRB Perkapita (Rp. Juta)	12,91	14,04	15,79	17,52	18,77	20,37
PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta)	13.707.057,2	14.333.333,5	15.163.091,8	16.115.554	16.916.219,6	17.707.214,81
LPE ADHK 2010 (%)	4,88	4,57	5,79	6,28	4,97	5,87
LPE ADHK 2010 Provinsi Jawa Tengah (%)	5,34	5,11	5,27	5,47	5,28	5,34

Sumber: BPS dan PDRB Kabupaten Kebumen, 2017

Keterangan: \*) Angka sementara \*\*) Angka proyeksi

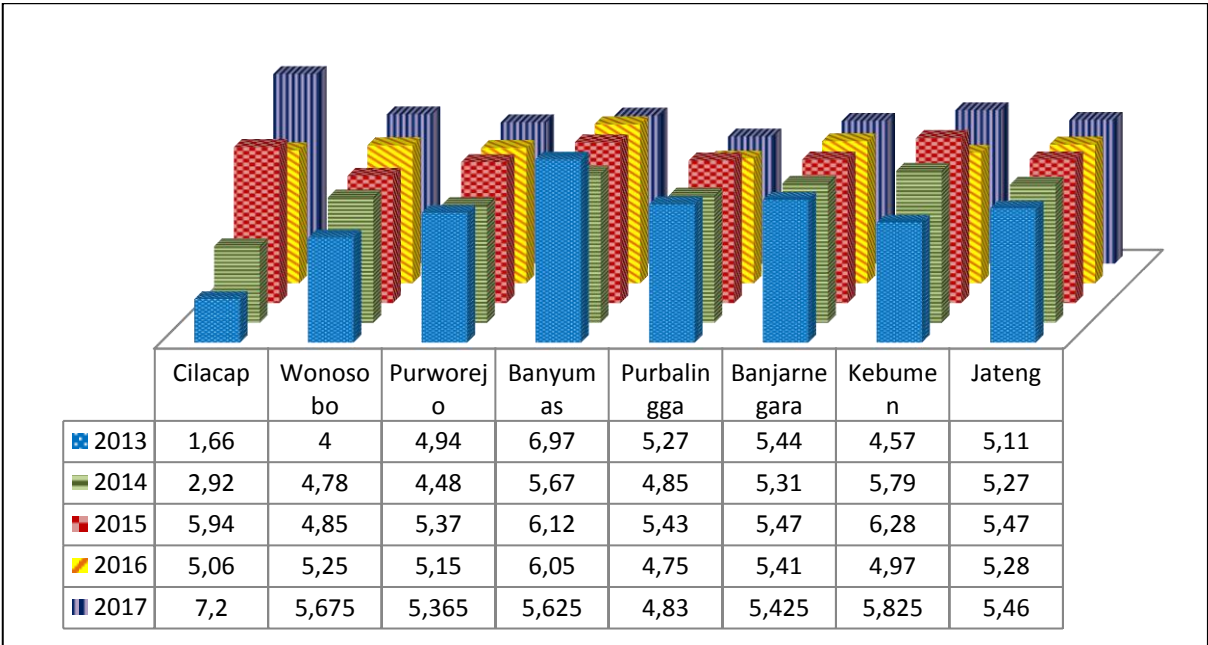
Dari tujuh belas sektor lapangan usaha, hanya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalan yang mengalami pertumbuhan negatif. Sektor tersebut mengalami penurunan sebesar 3,237% dan 1,641%. Adapun semua sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang positif dimana sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang mengalami peningkatan paling pesat yaitu sebesar 13,519%. Selanjutnya terdapat sektor Jasa Lainnya, sektor Industri Pengolahan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengalami pertumbuhan hingga dua digit.

Tabel 2.2  
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Kebumen  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (%)

LAPANGAN USAHA		2012	2013	2014	2015*	2016**	2017***
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,60	-4,78	3,11	6,75	-5,84	-3,24

LAPANGAN USAHA		2012	2013	2014	2015*	2016**	2017***
B	Pertambangan dan Penggalian	5,47	5,95	5,65	2,12	-1,31	-1,64
C	Industri Pengolahan	-2,06	11,89	9,63	4,91	9,42	11,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,40	12,46	6,74	2,18	7,97	3,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-6,17	-4,55	3,54	2,33	2,40	6,72
F	Konstruksi	8,72	6,06	4,91	3,47	13,43	9,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,35	6,10	3,23	7,35	8,57	10,03
H	Transportasi dan Pergudangan	2,81	11,37	10,00	10,95	12,47	15,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	5,80	4,40	7,25	10,33	10,92
J	Informasi dan Komunikasi	11,65	8,89	17,7	9,44	13,51	13,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	4,50	0,63	6,93	8,92	9,36
L	Real Estat	2,11	6,81	5,54	6,84	7,29	8,83
M,N	Jasa Perusahaan	7,90	18,66	7,39	8,62	10,88	9,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,06	3,01	0,21	4,70	5,03	6,1
P	Jasa Pendidikan	24,29	11,98	10,37	8,24	6,38	0,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,69	9,51	9,49	8,73	9,62	8,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-0,86	10,03	9,29	3,81	11,87	12,6
Produk Domestik Regional Bruto		4,88	4,57	5,89	6,28	4,97	5,88

Sumber: BPS dan PDRB Kabupaten Kebumen, 2017  
Keterangan: \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara \*\*\*) Angka Proyeksi



Gambar 2.7  
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,  
Provinsi Jawa Tengah dan 5 Kabupaten Tetangga  
Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: BPS, 2017

Perekonomian Kabupaten Kebumen pada periode 2013-2017 dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional kawasan, berada pada posisi di atas rata-rata. Pada tahun 2017 diperkirakan lebih tinggi yaitu 5,46 berbanding 5,825. Hal ini juga terjadi dalam lingkup yang lebih kecil, dimana jika dibandingkan dengan 5 (lima) kabupaten tetangga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen diperkirakan berada di atas rata-rata.

Tabel 2.3  
Peranan PDRB Kabupaten Kebumen  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (%)

LAPANGAN USAHA		2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,11	27,23	26,79	27,47	24,62	24,422
B	Pertambangan dan Penggalian	4,69	4,69	5,05	5,23	5,07	5,336
C	Industri Pengolahan	17,44	18,33	19,23	18,79	19,73	20,216
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,046
F	Konstruksi	6,81	6,84	6,83	6,74	7,22	7,104
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,19	15,28	14,35	14,08	14,64	14,018
H	Transportasi dan Pergudangan	3,33	3,45	3,59	3,78	3,98	4,115
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,92	1,97	1,95	1,93	2,11	2,078
J	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,65	1,64	1,59	1,68	1,622
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	3,05	2,87	2,88	3,00	2,885
L	Real Estat	1,31	1,29	1,25	1,24	1,26	1,225
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,30	0,29	0,30	0,32	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	3,67	3,44	3,41	3,41	3,246
P	Jasa Pendidikan	8,12	8,91	9,28	9,19	9,31	9,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,03	1,06	1,08	1,10	1,125
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,14	2,20	2,27	2,17	2,42	2,399
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Keterangan : \*) Angka Sementara \*\*) Angka sangat sementara

Pada tahun 2017 terlihat peranan sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi yang paling besar (24,422%), diikuti sektor industri pengolahan (20,216%), dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14,018%). Terdapat 3 sektor yang kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen meningkat yaitu sektor industri pengolahan sebesar 0,486%, sektor Jasa Pendidikan sebesar 0,45% serta sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 0,266%. Sebaliknya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan hingga 0,198%. Hal ini menunjukkan terjadinya peralihan sektor usaha dari sektor primer ke sektor sekunder.

2) Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dapat disumsikan sebagai rata-rata pendapatan per kapita sebulan. Penggunaan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan disebabkan sulitnya memperoleh data pendapatan penduduk/rumah tangga. Hasil Suseda 2016 memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan di Kabupaten Kebumen adalah 658.203,98 rupiah atau naik sebesar 35,37% dibandingkan kondisi tahun 2014 yang sebesar 486.232 rupiah. Kenaikan pendapatan per kapita ini dimungkinkan karena kenaikan harga berbagai jenis kebutuhan pokok penduduk selama dua tahun terakhir. Kondisi tersebut juga terjadi baik pada daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

Tabel 2.4

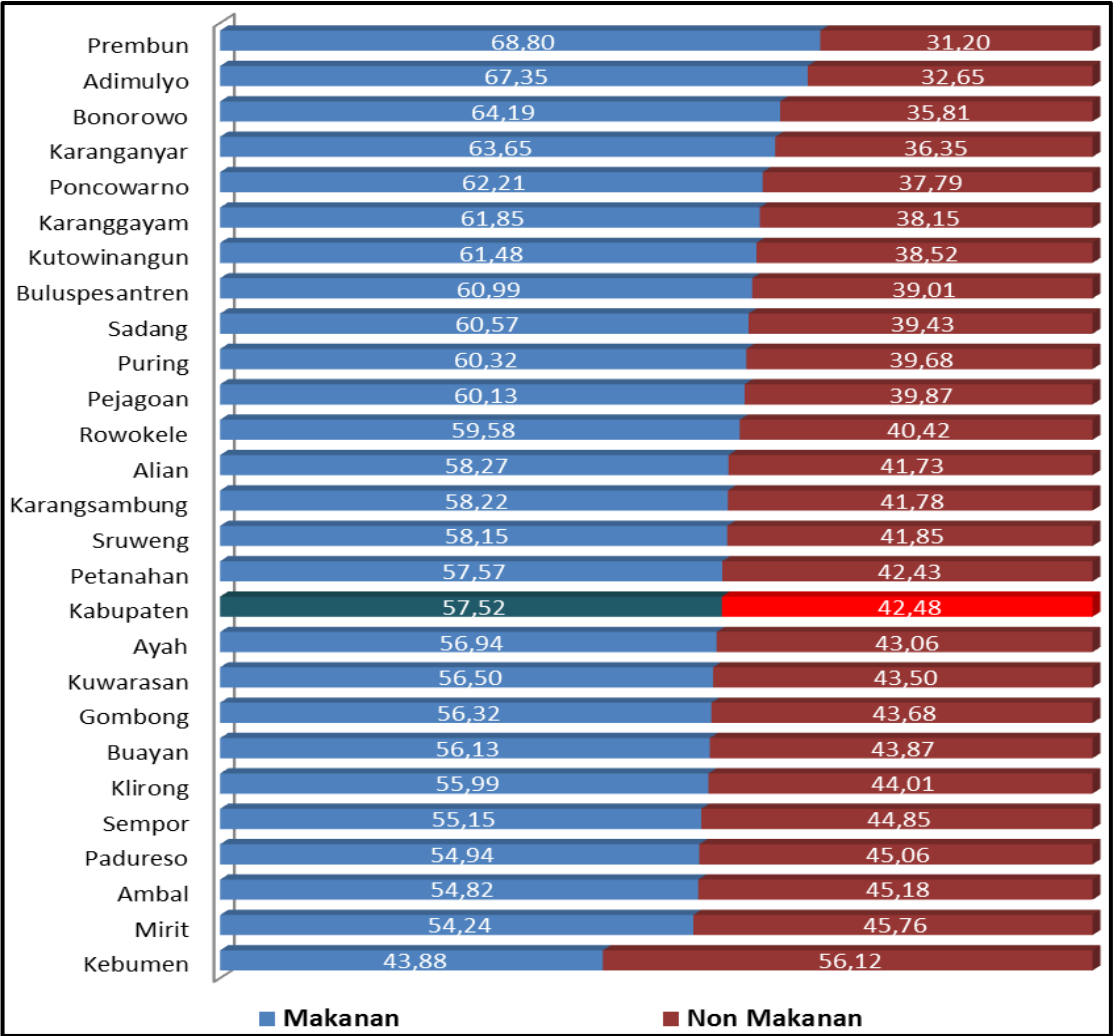
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan/Pola Konsumsi Menurut Daerah Tahun 2014 dan 2016 Kabupaten Kebumen

DAERAH	RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN/ % POLA KONSUMSI	2014 (Rp.)	2016 (Rp.)
Perkotaan+ Perdesaan	Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan (Rp)	486.232,00	658.203,98
	% Makanan	60,30	57,52
	% Non Makanan	39,70	42,48
Perkotaan	Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan (Rp)	537.764,66	701.765,96
	% Makanan	56,33	55,24
	% Non Makanan	43,67	44,76
Perdesaan	Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan (Rp)	460.279,44	633.524,33
	% Makanan	62,63	58,95
	% Non Makanan	37,37	41,05

Sumber : BPS, diolah dari Suseda Tahun 2014 dan 2016

Pada tahun 2016, 57,52% (Rp.378.591,98) pengeluaran penduduk di Kabupaten Kebumen digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sebesar 42,48% (Rp.279.611,99) digunakan untuk kebutuhan non makanan. Secara relatif terjadi penurunan kebutuhan makanan sebesar 2,78% dibandingkan kondisi pada tahun 2014, namun secara nominal terjadi peningkatan sebesar 29,47% dibandingkan kondisi pada tahun 2014.

Sedangkan, untuk kebutuhan non makanan meningkat secara relatif sebesar 2,78% dan secara nominal sebesar 44,84%. Secara agregat hal ini mengindikasikan secara perlahan terjadi pergeseran pola pengeluaran dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan.



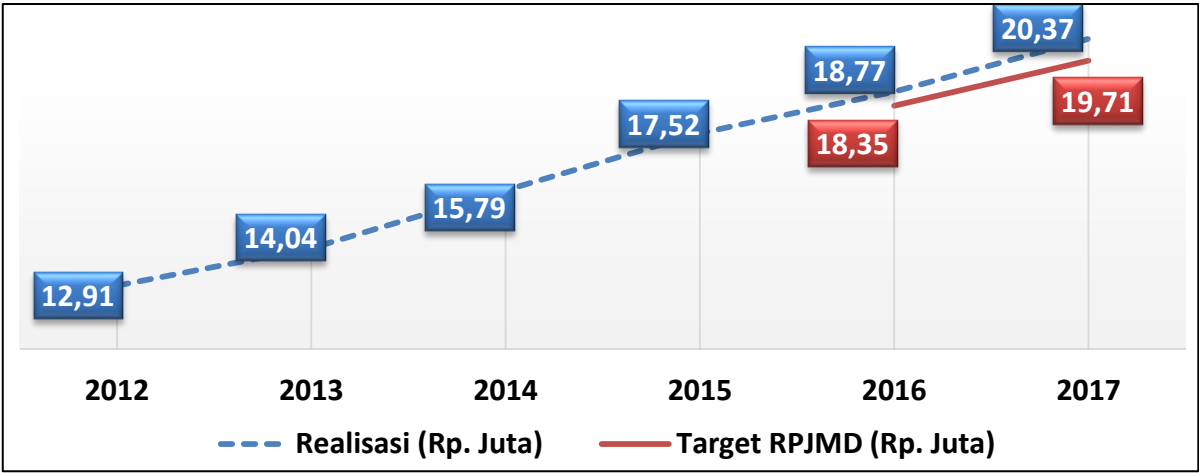
Gambar 2.8  
Distribusi Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016  
*Sumber : BPS, Studi Ketimpangan Pendapatan Tahun 2016*

Kebutuhan makanan sebagai kebutuhan pokok/primer mutlak harus terpenuhi, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan ini akan lebih besar mengingat rata-rata pendapatan penduduk Kebumen masih tergolong rendah. Sebenarnya, kebutuhan makanan pada tingkat pendapatan berapapun secara kuantitas cenderung tetap sehingga semakin tinggi pendapatan seseorang, pengeluaran untuk non makanan semakin besar. Oleh karena itu, persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat distribusi pengeluaran menurut kelompok pendapatan. Bagi penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi umumnya persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan semakin rendah dan sebaliknya kebutuhan untuk non makanan semakin tinggi. Menurunnya

persentase pengeluaran makanan mengindikasikan bergesernya prioritas pengeluaran penduduk dari makanan ke non makanan. Kondisi ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan wilayah kecamatan, ada dua belas kecamatan dengan rata-rata pendapatan per kapita diatas rata-rata Kabupaten. Angka tertinggi ada pada Kecamatan Ayah sebesar Rp.900.129.11, diikuti Kecamatan Gombang sebesar Rp.872.933,08, dan Kecamatan Kebumen sebesar Rp.865.529,64. Tingginya rata-rata pengeluaran per kapita Kecamatan Ayah berhubungan dengan tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Sedangkan untuk Kecamatan Gombang dan Kebumen tingginya rata-rata pengeluaran per kapita disebabkan tingginya konsumsi makanan dan minuman jadi. Kecamatan Buayan menjadi kecamatan dengan rata-rata pengeluaran per kapita terendah di Kabupaten Kebumen. Secara keseluruhan ada empat belas kecamatan yang rata-rata pengeluaran per kapita tahun 2016 di bawah rata-rata kabupaten yaitu Kecamatan Buayan, Karanggayam, Kutowinangun, Prembun, Poncowarno, Puring, Sruweng, Ambal, Bonorowo, Pejagoan, Karangsambung, Kuwarasan, Rowokele dan Alian. Sedangkan, dua belas kecamatan yang rata-rata pengeluaran perkapitanya di atas kabupaten meliputi Kecamatan Ayah, Gombang, Kebumen, Mirit, Padureso, Adimulyo, Petanahan, Sempor, Klirong, Buluspesantren, Sadang dan Karanganyar.

3) PDRB Per Kapita



Gambar 2.9  
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (Rp. Juta)

Sumber : BPS, 2017

Keterangan : Realisasi 2016 adalah data sementara

Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Kebumen mencapai Rp.18,77 juta dengan pertumbuhan sebesar 12,96%. Pertumbuhan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 7,13%. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan

dari Rp.12,91 juta tahun 2012 menjadi Rp.18,77 juta pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 45,39%.

Tabel 2.5  
PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (Rp Juta)

LAPANGAN USAHA		2012	2013	2014	2015*	2016**	2017***
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,76	3,82	4,23	4,81	4,62	5,08
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,66	0,8	0,92	0,95	1,05
C	Industri Pengolahan	2,25	2,57	3,04	3,29	3,70	3,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	0,88	0,96	1,08	1,18	1,36	1,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,96	2,15	2,27	2,47	2,75	2,84
H	Transportasi dan Pergudangan	0,43	0,48	0,57	0,66	0,75	0,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	0,28	0,31	0,34	0,40	0,41
J	Informasi dan Komunikasi	0,22	0,23	0,26	0,28	0,32	0,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,4	0,43	0,45	0,51	0,56	0,59
L	Real Estat	0,17	0,18	0,2	0,22	0,24	0,25
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,49	0,52	0,54	0,6	0,64	0,67
P	Jasa Pendidikan	1,05	1,25	1,46	1,61	1,75	2,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,14	0,17	0,19	0,21	0,23
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,28	0,31	0,36	0,38	0,45	0,46

Sumber: BPS, 2017

Keterangan: \*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara \*\*\*) Angka Proyeksi

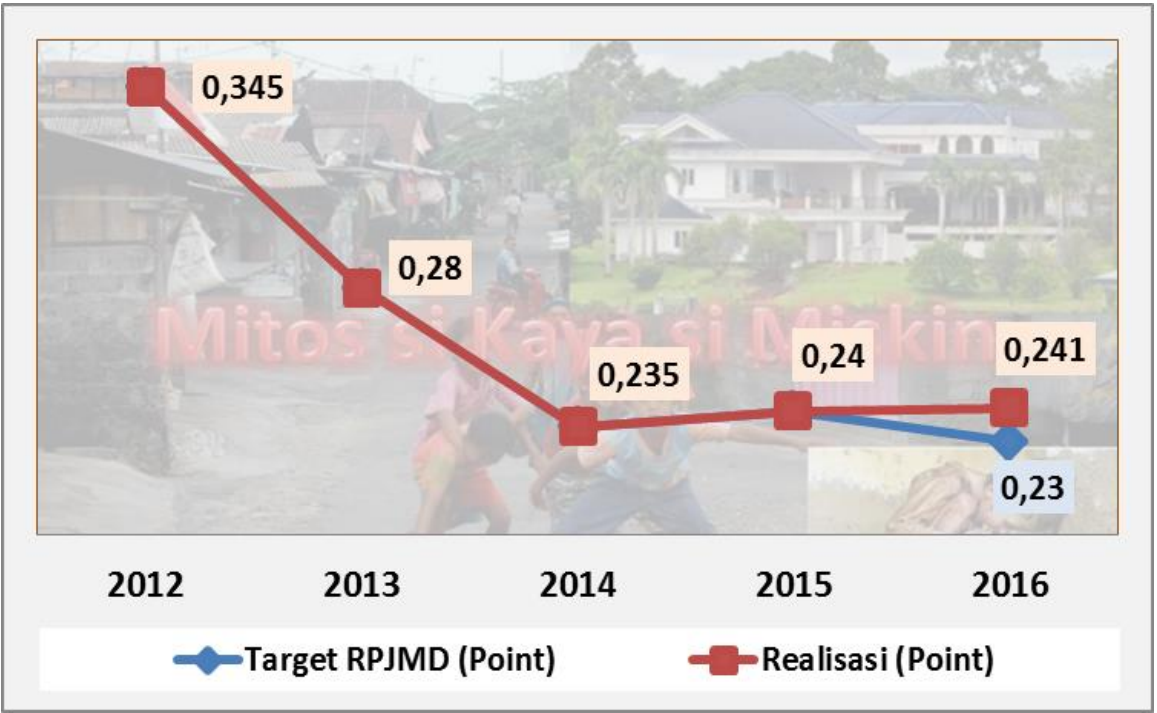
PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha tahun 2012-2017 tertinggi selalu dicapai oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan yang terendah tiap tahunnya yaitu kategori Pengadaan Listrik dan Gas, serta kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing sebesar 0,01.

#### 4) Ketimpangan Sosial

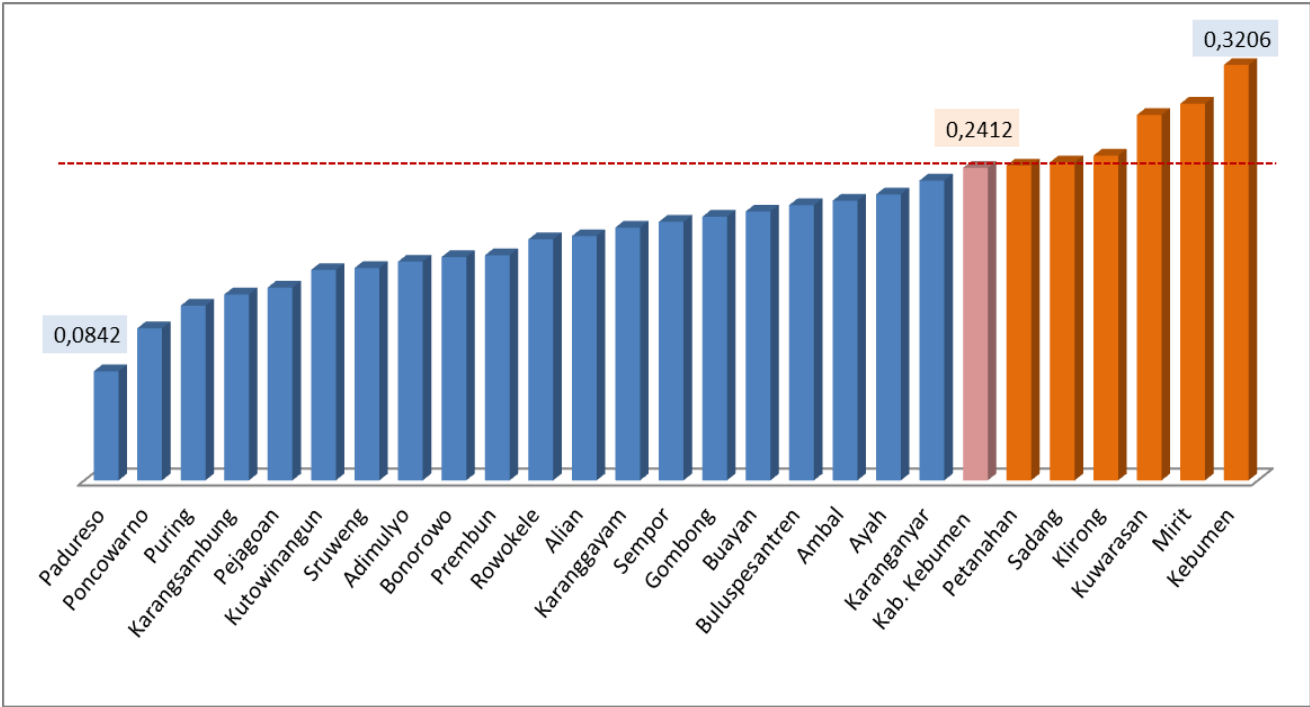
##### a) Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk

menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Gambar 2.10  
Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016  
Sumber: BPS, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, 2016



Gambar 2.11  
Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2016  
Menurut Kecamatan  
Sumber : Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, 2017

Berdasarkan hasil pengukuran disparitas (ketimpangan) pendapatan penduduk dengan menerapkan indeks Gini (*Gini ratio*) yang dikembangkan Corrado Gini, masyarakat Kabupaten Kebumen relatif memiliki ketimpangan yang rendah ini ditunjukkan pada

kurun waktu 2014-2016 Indeks gini cenderung bergerak pada kisaran 0,24 yaitu dari 0,2352 pada tahun 2014 menjadi 0,2412 pada tahun 2016 (nilai gini antara 0,20-0,35 menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan tidak timpang/pemerataan pendapatannya relatif sama (Todaro P. Michael,1994). Namun demikian, pencapaian angka Indeks Gini pada tahun 2016 ternyata belum atau tidak memenuhi target dalam RPJMD sebesar 0,23.

Indeks Gini selama periode 2012-2016, cenderung menurun dan masih dalam rentang tidak timpang. Namun demikian, selama 3 (tiga) tahun terakhir, angkanya meningkat tipis. Hal ini menunjukkan ada potensi ketimpangan di masa depan jika kondisi ini tidak mendapat perhatian.

Tabel 2.6  
Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Kebumen  
Menurut Nilai Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2016

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK	PENDUDUK/ KAPITA (RP.)	GINI RASIO	KRITERIA BANK DUNIA		
					40% I	40% II	20% III
1	Padureso	13.377	742.934,96	0,0842	34,05	41,22	24,74
2	Poncowarno	14.989	545.371,84	0,1173	31,74	42,40	25,86
3	Puring	53.219	551.699,77	0,1348	30,88	41,42	27,69
4	Karangsambung	37.642	616.866,19	0,1434	29,97	42,76	27,27
5	Pejagoan	49.561	604.272,31	0,1488	31,19	39,37	29,43
6	Kutowinangun	42.370	521.964,25	0,1624	24,18	39,11	30,55
7	Sruweng	53.675	551.855,16	0,1639	30,03	39,93	30,04
8	Adimulyo	34.399	714.695,77	0,1688	29,51	39,95	30,53
9	Bonorowo	19.270	602.479,24	0,1723	25,15	44,09	30,75
10	Prembun	26.471	528.903,73	0,1737	30,03	37,45	32,52
11	Rowokele	42.503	625.774,51	0,1860	29,00	34,84	36,16
12	Alian	54.293	651.088,33	0,1885	28,22	40,07	31,71
13	Karanggayam	48.617	521.114,78	0,1951	27,62	40,30	32,09
14	Sempor	59.423	693.967,88	0,1995	28,20	38,49	33,31
15	Gombong	47.550	872.933,08	0,2034	27,71	38,72	33,57
16	Buayan	54.562	491.742,93	0,2075	27,85	38,31	33,85
17	Buluspesantren	53.012	681.824,08	0,2124	25,53	43,07	31,4
18	Ambal	55.008	559.093,02	0,2158	27,19	38,96	33,85
19	Ayah	55.349	900.129,11	0,2207	26,62	39,10	34,28
20	Karanganyar	34.250	659.548,45	0,2314	25,70	39,41	34,89
21	Petanahan	53.872	703.916,88	0,2430	26,60	36,05	37,34
22	Sadang	18.201	679.314,37	0,2455	25,62	37,46	36,92
23	Klirong	54.736	681.933,00	0,2506	25,66	37,82	36,52
24	Kuwarasan	45.194	621.543,83	0,2820	23,94	36,98	39,08
25	Mirit	44.516	752.089,20	0,2907	22,70	36,91	40,39
26	Kebumen	123.037	865.529,64	0,3206	21,30	34,04	44,66
	Kab. Kebumen	1.189.096	658.203,98	0,2412	25,78	38,19	36,03

Sumber : Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, 2017

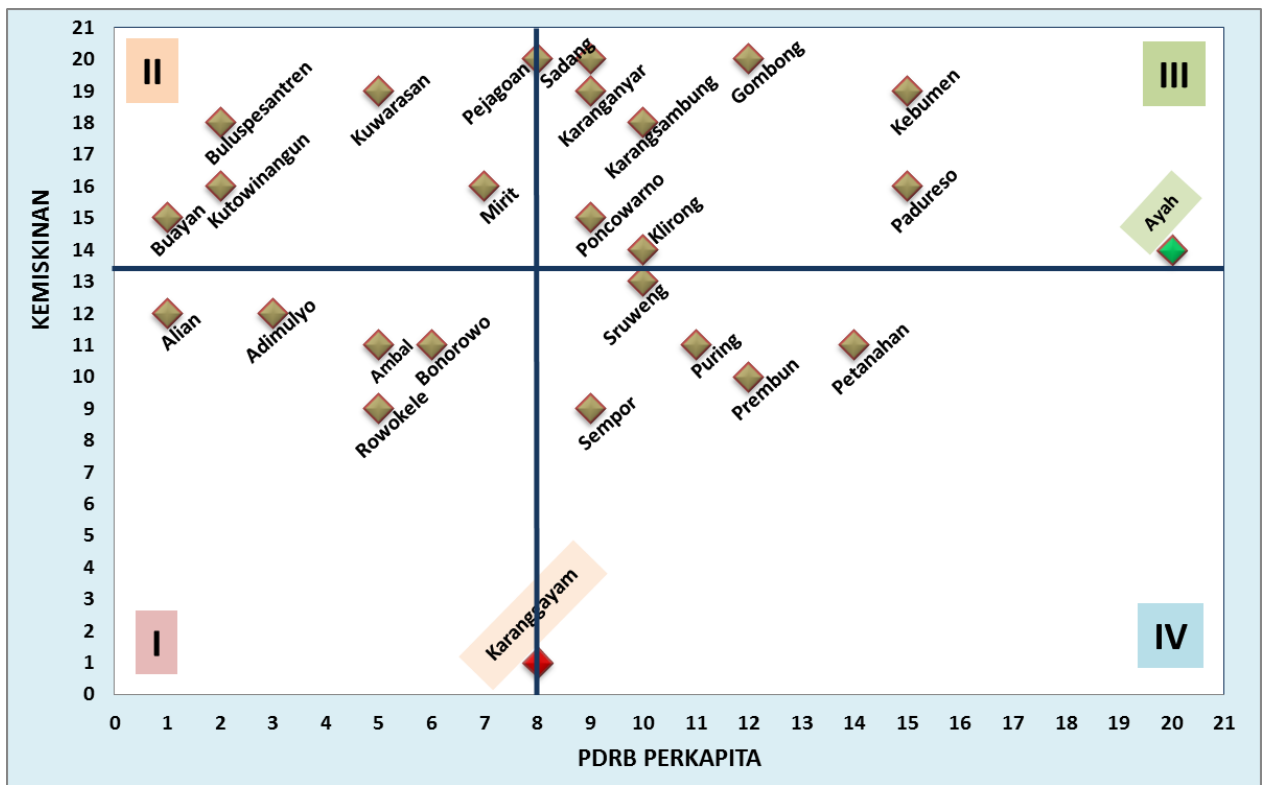
Pada gambar dan tabel sebelumnya terlihat bahwa tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan per kapita paling tinggi adalah Kecamatan Kebumen (0,3206), Kecamatan Mirit (0,2907), Kecamatan Kuwarasan (0,2820). Sedangkan tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rendah adalah Kecamatan Padureso (0,0842), Kecamatan Poncowarno (0,1173), dan Kecamatan Puring (0,1348), dua merupakan kecamatan dengan tipologi wilayah daerah pegunungan (wilayah utara Kabupaten Kebumen) dan satu kecamatan dengan tipologi wilayah pesisir.

Hasil pengolahan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17%. Berdasarkan kategori Bank Dunia Kecamatan Padureso paling merata karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan sebesar 34,05%, disusul Kecamatan Poncowarno (31,74%), dan Kecamatan Pejagoan (31,19%). Kecamatan dengan kategori ketimpangan rendah tetapi dengan nilai paling rendah adalah Kecamatan Kebumen (21,30%).

Menurut kecamatan, terlihat bahwa berdasarkan angka gini ratio maupun kriteria Bank Dunia seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah dengan gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 0,35 dan penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan.

b) *Scatter Plot* Hubungan Kemiskinan Dan Produktivitas Wilayah

Diagram *scatter plot* digunakan untuk mengetahui hubungan antara kemiskinan dan produktivitas wilayah kecamatan. Berdasarkan analisis *scatter plot* kemiskinan dan PDRB per kapita didapatkan 4 kuadran dengan pembagian (i) Kuadran I (kemiskinan tinggi, produktivitas rendah) meliputi Kecamatan Alian, Adimulyo, Ambal, Bonorowo, dan Rowokele; (ii) Kuadran II (kemiskinan rendah, produktivitas rendah) antara lain meliputi Kecamatan Buayan, Buluspesantren, Kutowinangun, Kuwarasan, Pejagoan dan Mirit; Kuadran III (kemiskinan rendah, produktivitas tinggi) antara lain meliputi Kecamatan Sadang, Karanganyar, Poncowarno, Karangsambung, Klirong, Gombong, Kebumen, Padureso dan Ayah; dan Kuadran IV (kemiskinan tinggi, produktivitas tinggi), meliputi Kecamatan Karanggayam, Sempor, Sruweng, Puring, Prembun dan Petanahan.



Gambar 2.12  
Scatter Plot Hubungan Kemiskinan dan Produktivitas Daerah  
Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Sumber : BAP3DA, 2017 (data diolah)

Diagram *scatter plot* di atas juga menunjukkan 2 (dua) titik wilayah yang tampak ekstrim yaitu Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Ayah. Kecamatan Karanggayam memiliki angka tingkat kemiskinan yang relatif jauh di atas wilayah lain, namun PDRB per kapitanya juga berada di atas rata-rata. Sedangkan Kecamatan Ayah memiliki produktivitas (PDRB per kapita) paling tinggi dibanding wilayah lain, namun tingkat kemiskinnannya relatif masih cukup tinggi karena hanya berada sedikit di atas rata-rata kemiskinan Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kedua wilayah kecamatan tersebut memiliki permasalahan spesifik yang perlu ditangani secara khusus. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

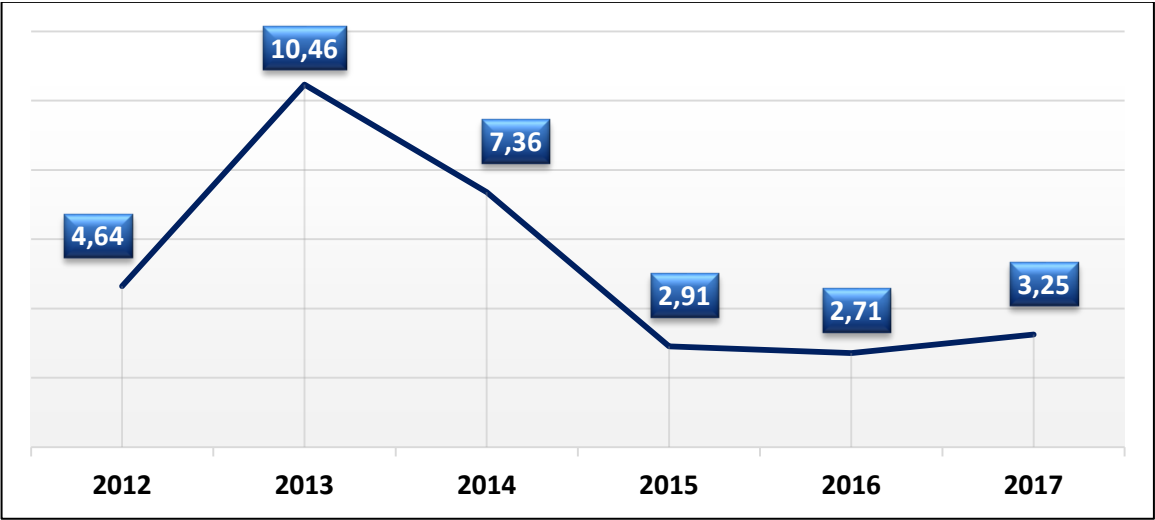
- Penyebab terjadinya kemiskinan yang relatif tinggi di Kecamatan Karanggayam; dan
- Penyebab terjadinya angka kemiskinan yang relatif masih tinggi di Kecamatan Ayah, padahal wilayah tersebut tingkat produktivitasnya relatif tinggi.

##### 5) Inflasi

Laju inflasi mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2012-2017 dimana pada tahun 2012 terjadi inflasi sebesar 4,64%. Kondisi perekonomian yang relatif stabil ditunjukkan dengan tidak adanya gejolak perubahan harga yang berarti, walaupun kenaikan harga terjadi pada semua

kelompok pengeluaran. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perumahan, Air, Gas, Listrik dan Bahan Bakar Rumah tangga yakni sebesar 7,35%. Sementara itu inflasi terendah terjadi pada kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yakni sebesar 0,08%.

Kota Kebumen pada tahun 2017 mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 3,25%. Hal ini diantaranya dipicu oleh kenaikan harga BBM di awal-awal tahun 2017 dan kenaikan harga bahan bakar rumah tangga di akhir tahun 2017. Inflasi tertinggi selama tahun 2017 terjadi pada bulan Januari, yakni sebesar 0,99%. Adapun Inflasi terendah selama tahun 2017 terjadi pada bulan Agustus, yakni sebesar 0,52%.



Gambar 2.13

Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (%)

Sumber: *Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen, Tahun 2017*

Tabel 2.7

Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017  
Menurut Kelompok Pengeluaran (%)

NO.	KELOMPOK PENGELUARAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bahan Makanan	3,95	7,23	10,07	5,83	2,61	0,50
2.	Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	4,57	10,63	6,42	4,42	3,82	4,67
3.	Perumahan, Air, gas, Listrik dan Bahan Bakar	7,35	3,92	8,36	1,93	1,36	3,52
4.	Sandang	4,9	22,62	4,41	4,3	4,77	3,35
5.	Kesehatan	2,19	3,58	4,59	1,9	6,66	2,72
6.	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,08	22,93	0,96	2,7	5,70	3,79
7.	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	3,89	21,17	10,57	-2,4	-2,08	5,89
	Umum	4,64	10,46	7,36	2,91	2,71	3,25

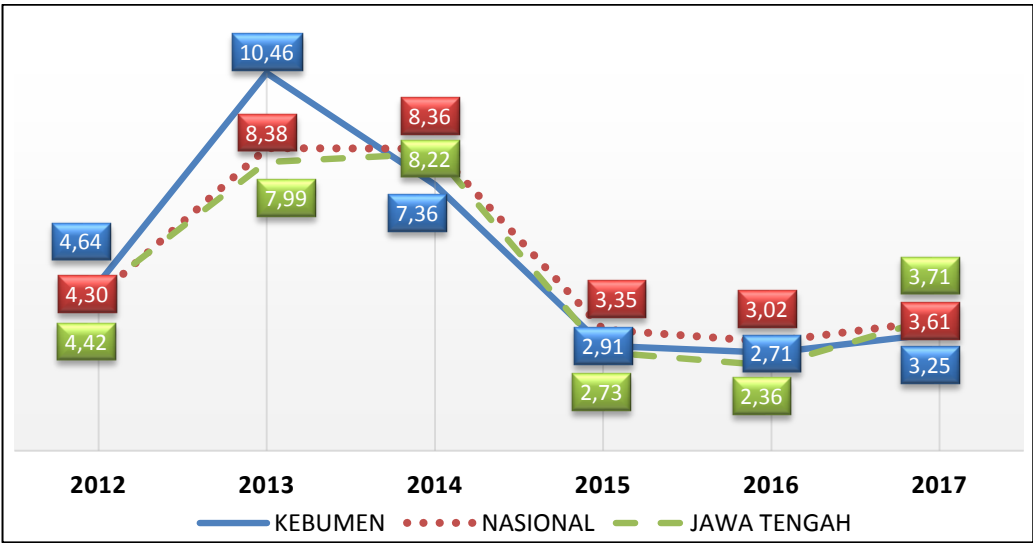
Sumber: *Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2017*

Pada tahun 2017, inflasi mengalami kenaikan sebesar 3,25% dibanding tahun 2016. Inflasi tertinggi

selama tahun 2017 terjadi pada bulan Januari yakni sebesar 0,99%. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi selama tahun 2017 yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 4,67%; kelompok perumahan, air, gas, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,52%; kelompok sandang sebesar 3,35%; kelompok kesehatan sebesar 2,72%; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 3,79%; kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 5,89%, sementara kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,5%.

Peningkatan laju inflasi pada tahun 2017 diharapkan dapat dikontrol oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat menurunkan angka inflasi tersebut diantaranya melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap ketersediaan dan kelancaran arus/distribusi barang-barang dan jasa, terutama barang-barang dan jasa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Kebumen. Hal ini penting mengingat banyak barang dan jasa yang tidak diproduksi di tingkat lokal dan sangat mengandalkan pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu perlu dijajaki kerja sama antardaerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diproduksi di Kabupaten Kebumen.

Untuk barang dan jasa yang rentan berfluktuasi tinggi seperti komoditas bumbu-bumbuan, sayur-sayuran dan komoditas dengan nilai konsumsi yang besar semisal beras perlu diwaspadai dengan memperkuat ketahanan pangan daerah. Strategi penguatan ketahanan pangan misalnya dengan mendorong pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan-lahan yang belum dipakai.



Gambar 2.14  
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017  
*Sumber: Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2017*

Selama tahun 2017, perkembangan inflasi Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan inflasi tertinggi ada di level provinsi, diikuti nasional dan Kabupaten Kebumen dengan peningkatan inflasi terendah.

6) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hal ini menunjukkan makna kemiskinan yang sangat luas dan multidimensi dan bersifat kualitatif sehingga sangat sulit mengukurnya secara kuantitatif.

Data kemiskinan dibedakan menjadi Data Kemiskinan Makro dan Data Kemiskinan Mikro. Data kemiskinan makro adalah data kemiskinan yang dihasilkan dengan menggunakan GK. Data ini hanya dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu beserta karakteristiknya dan belum dapat menjawab siapa dan dimana penduduk miskin tersebut berada. Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data kemiskinan yang digunakan untuk implementasi program-program anti kemiskinan yang sifatnya target sasaran (Rastra, BPNT, PKH, KIS, KIP dan lain-lain). Data kemiskinan mikro berupa data rumah tangga sasaran dan sudah bisa menggambarkan siapa dan dimana keberadaan si miskin (PPLS 2008, PPLS 2011, PBDT 2015).

Angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS merupakan data kemiskinan makro yang di dalamnya terdapat beberapa indikator antara lain:

a) Garis Kemiskinan (GK)

GK merupakan nilai pengeluaran minimal per kapita per bulan untuk makanan dan non makanan sehingga seseorang tidak dikatakan sebagai penduduk miskin. GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

- b) Jumlah Penduduk Miskin  
Merupakan jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c) Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index-P0*)  
Merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
- d) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*)  
Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- e) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)  
Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.8  
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin  
Kabupaten Kebumen, 5 (Lima) Kabupaten Tetangga  
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017

KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBUAN)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cilacap	265,70	255,70	239,80	243,50	240,20	238,32
Banyumas	309,80	296,50	283,50	285,90	283,90	283,25
Banjarnegara	167,00	166,80	159,50	165,40	158,20	156,83
Kebumen	262,80	251,10	242,30	241,90	235,90	233,45
Purworejo	114,80	109,00	102,10	101,30	99,10	98,65
Wonosobo	172,40	170,10	165,80	166,40	160,10	159,16
Jawa Tengah	4.863,50	4.811,30	4.561,82	4.577,00	4.506,89	4.197,49

Sumber : Badan Pusat Statistik,2018

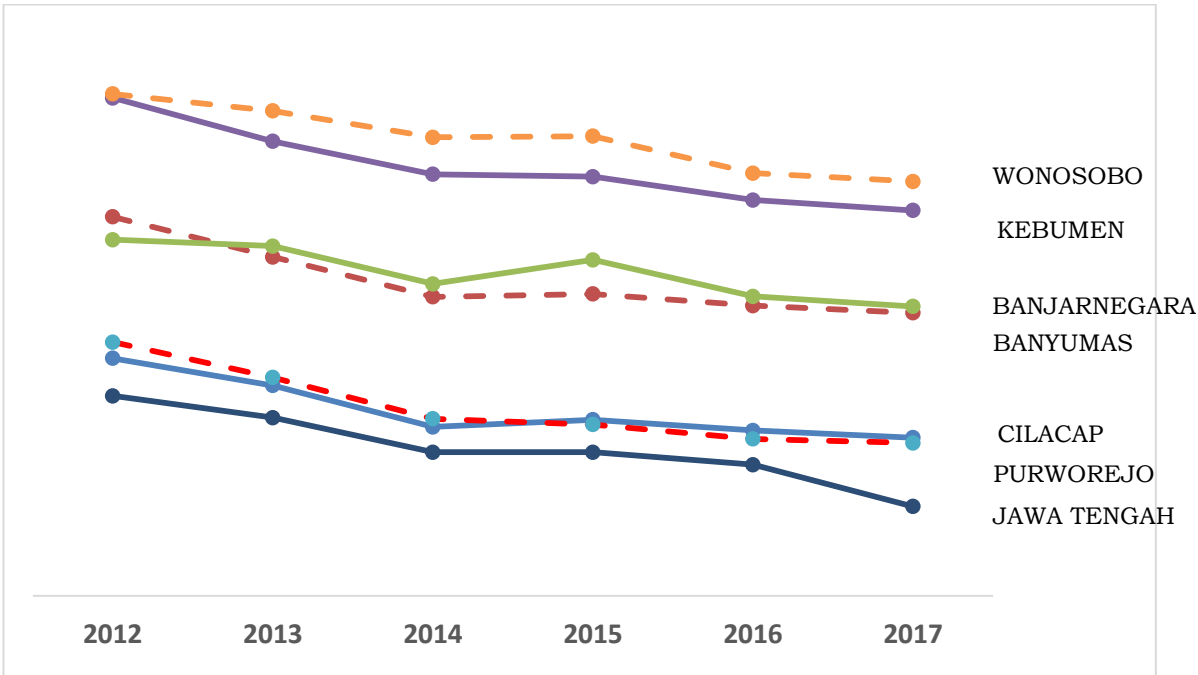
Pada tahun 2012 sekitar 262.800 orang penduduk Kabupaten Kebumen dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin ini menurun sekitar 29.350 orang selama periode 2012-2017 dimana pada tahun 2017 tercatat terdapat sekitar 233.450 orang. Secara lengkap perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen dapat dilihat seperti pada tabel di bawah yang juga menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di 5 (lima) kabupaten tetangga serta di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012-2017.

Tabel 2.9  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Kebumen, 5 (Lima) Kabupaten Tetangga  
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017

KABUPATEN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cilacap	15.92	15.24	14.21	14.39	14.12	13,94
Banyumas	19.44	18.44	17.45	17.52	17.23	17,05
Banjarnegara	18.87	18.71	17.77	18.37	17.46	17,21

KABUPATEN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kebumen	22.40	21.32	20.50	20.44	19.86	19,60
Purworejo	16.32	15.44	14.41	14.27	13.91	13,81
Wonosobo	22.50	22.08	21.42	21.45	20.53	20,32
Jawa Tengah	14.98	14.44	13.58	13.58	13.27	12,23

Sumber : Badan Pusat Statistik,2018



Gambar 2.15  
Perkembangan Penurunan Penduduk Miskin (P<sup>0</sup>) Kabupaten Kebumen,  
5 (Lima) Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2012-2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen selama periode 2012-2017 terus menurun. Pada tahun 2012, sekitar 22,40% penduduk di Kabupaten Kebumen masuk sebagai kategori penduduk miskin. Angka ini menurun menjadi sekitar 21,32% di tahun 2013 dan terus turun di tahun 2014 menjadi 20,50%. Pada tahun 2015 hanya turun sedikit menjadi 20,44% dan pada tahun 2016 turun sebesar 0,58 poin menjadi 19,86% serta pada tahun 2017 turun sebesar 0,26 poin menjadi 19,60%.

Untuk wilayah Jawa Tengah, persentase penduduk miskin turun dari 14,98% di tahun 2012 menjadi 12,23% di tahun 2017. Sementara itu, kelima kabupaten tetangga juga menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2012-2017.

Perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar Kebumen, maka besarnya penurunan angka persentase kemiskinan Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun selama periode 2012-2017, menunjukan kinerja yang paling baik dibandingkan kelima kabupaten tetangga

maupun provinsi Jawa Tengah. Seperti ditunjukkan pada tabel di bawah, Kabupaten Kebumen mengalami penurunan persentase sebesar 2,80% selama periode 2012-2017. Angka tersebut lebih besar dibandingkan penurunan persentase penduduk miskin di kelima kabupaten tetangga maupun di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.10  
Perkembangan Perubahan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Kebumen, 5 (Lima) Kabupaten Tetangga  
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017

KABUPATEN	BESARAN PERUBAHAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN					
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2012-2017
Cilacap	(0,68)	(1,03)	0,18	(0,27)	(0,18)	(1,98)
Banyumas	(1,00)	(0,99)	0,07	(0,29)	(0,18)	(2,39)
Banjarnegara	(0,16)	(0,94)	0,60	(0,91)	(0,25)	(1,66)
Kebumen	(1,08)	(0,82)	(0,06)	(0,58)	(0,26)	(2,80)
Purworejo	(0,88)	(1,03)	(0,14)	(0,36)	(0,10)	(2,51)
Wonosobo	(0,42)	(0,66)	0,03	(0,92)	(0,21)	(2,18)
Jawa Tengah	(0,54)	(0,86)	-	(0,31)	(0,26)	(1,97)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Tabel 2.11  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  
Kabupaten Kebumen, 5 (Lima) Kabupaten Tetangga  
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017\*

NO.	WILAYAH	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Kabupaten Cilacap	2,22	2,06	2,37	2,71	2,58	1,98
2.	Kabupaten Banyumas	3,42	3,24	2,48	2,91	3,08	3,19
3.	Kabupaten Banjarnegara	3,39	2,91	2,88	3,51	3,03	3,25
4.	<b>Kabupaten Kebumen</b>	<b>3,35</b>	<b>3,57</b>	<b>2,78</b>	<b>4,08</b>	<b>3,78</b>	<b>3,62</b>
5.	Kabupaten Purworejo	2,78	1,98	1,85	2,43	2,67	2,25
6.	Kabupaten Wonosobo	3,91	4,26	3,91	4,74	4,02	3,85
7.	Provinsi Jawa Tengah	2,27	2,21	2,25	2,44	2,37	2,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Keterangan : \*) angka sementara

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif selama periode 2012-2017. Pada tahun 2012 indeks P1 sebesar 3,35, naik menjadi 3,57 di tahun 2013. Tahun 2014 turun menjadi 2,78 dan naik kembali pada tahun 2015 menjadi 4,08. Pada tahun 2016 indeks tersebut turun menjadi sebesar 3,78 dan turun kembali menjadi 3,62 pada tahun 2017 atau turun sebesar 0,16 poin dibandingkan tahun 2016.

Pada periode 2015-2017 tren indeks P1 Kabupaten Kebumen menunjukkan arah yang positif, yakni cenderung menurun dari 4,08 di tahun 2015 menjadi 3,62 di tahun 2017 atau turun sebanyak 0,46 poin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita

penduduk miskin di Kabupaten Kebumen sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Tren penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2017 terjadi pula di Provinsi Jawa Tengah dan 3 (tiga) kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.

Perkembangan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama periode 2012-2017 di Kabupaten Kebumen juga masih fluktuatif. Tahun 2012 nilai indeks P2 Kabupaten Kebumen sebesar 0,75 naik menjadi 0,91 di tahun 2013 dan turun menjadi 0,61 di tahun 2014. Tahun 2015 naik cukup banyak ke titik 1,19 sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 1,11. Pada tahun 2017 kembali turun menjadi 0,99. Di tahun 2017, hanya ada satu kabupaten yang nilai indeks P2-nya di atas satu yakni Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.12  
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  
Kabupaten Kebumen, 5 (Lima) Kabupaten Tetangga  
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017\*

NO.	KABUPATEN	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Cilacap	0,50	0,45	0,61	0,76	0,70	0,42
2.	Banyumas	0,91	0,83	0,56	0,71	0,85	0,85
3.	Banjarnegara	0,94	0,77	0,73	0,93	0,80	0,84
<b>4.</b>	<b>Kebumen</b>	<b>0,75</b>	<b>0,91</b>	<b>0,61</b>	<b>1,19</b>	<b>1,11</b>	<b>0,99</b>
5.	Purworejo	0,65	0,43	0,42	0,63	0,76	0,54
6.	Wonosobo	1,04	1,25	1,09	1,60	1,11	1,10
7.	Jawa Tengah	0,53	0,54	0,56	0,65	0,63	0,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Keterangan : \*) angka sementara

Pada periode 2015-2017 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan secara terus menerus dari 1,19 di tahun 2015 menjadi 0,99 di tahun 2017 atau turun sebesar 0,2 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin mengecil. Hal yang sama terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Wonosobo.

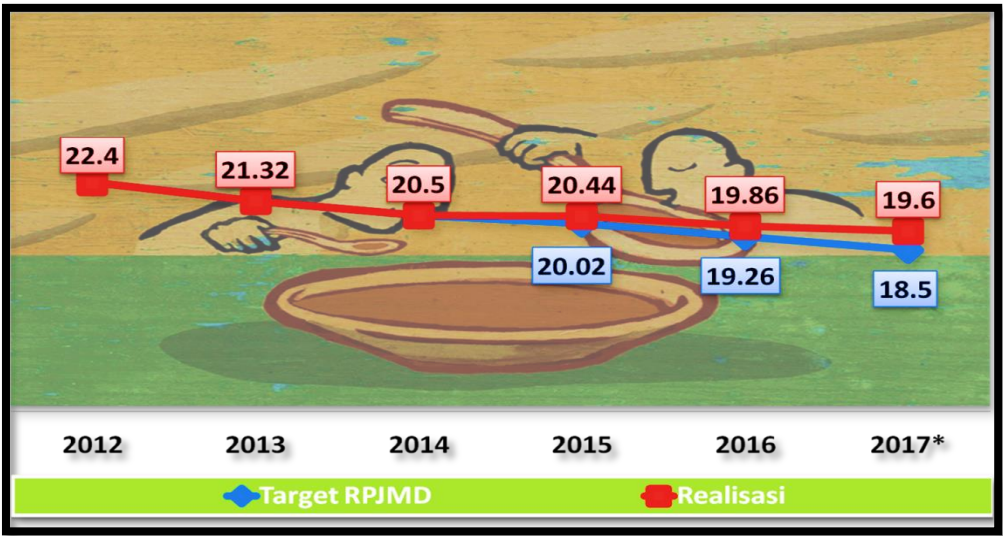
Garis kemiskinan untuk Kabupaten Kebumen terus mengalami kenaikan dari Rp.250.413,00/kapita/bulan pada tahun 2012 menjadi Rp.325.819,00/kapita/bulan pada tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi pada kelima kabupaten terdekat dan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang memungkinkan untuk mengurangi naiknya garis kemiskinan.

Tabel 2.13  
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen,  
5 (Lima) Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017\*

NO.	KABUPATEN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Cilacap	240.025	256.615	265.714	273.828	292.525	307.041
2.	Banyumas	271.800	295.742	309.106	320.585	344.514	357.748
3.	Banjarnegara	205.369	221.056	229.718	236.399	252.328	264.387
4.	<b>Kebumen</b>	<b>250.413</b>	<b>267.763</b>	<b>277.280</b>	<b>292.177</b>	<b>313.881</b>	<b>325.819</b>
5.	Purworejo	254.314	273.481	284.409	294.158	313.931	325.871
6.	Wonosobo	242.047	258.522	267.548	275.180	297.422	308.553
7.	Provinsi Jawa Tengah	222.327	244.161	273.056	297.851	317.348	333.224

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Keterangan : \*angka sementara



Gambar 2.16  
Perbandingan Perkembangan Target dan Realisasi  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen  
Tahun 2012-2017\* (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Keterangan : \*angka sementara

Perkembangan indikator kemiskinan makro Kabupaten Kebumen selama periode 2012-2017 cenderung menunjukkan tren yang positif, dimana jumlah dan persentase penduduk miskin selalu berkurang untuk setiap tahun. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 25.050 orang dan persentase penduduk miskin menurun sebanyak 2,80 poin. Progres yang cukup baik tersebut merupakan realisasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mengatasi/ menanggulangi kemiskinan di wilayah Kebumen.

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2012-2017 terus menurun, namun angka pada tahun 2015, 2016, dan 2017 belum memenuhi target dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Angka kemiskinan tahun 2015 sebagai baseline data kemiskinan dalam RPJMD dipasang pada angka 20,02%, realisasinya masih berada

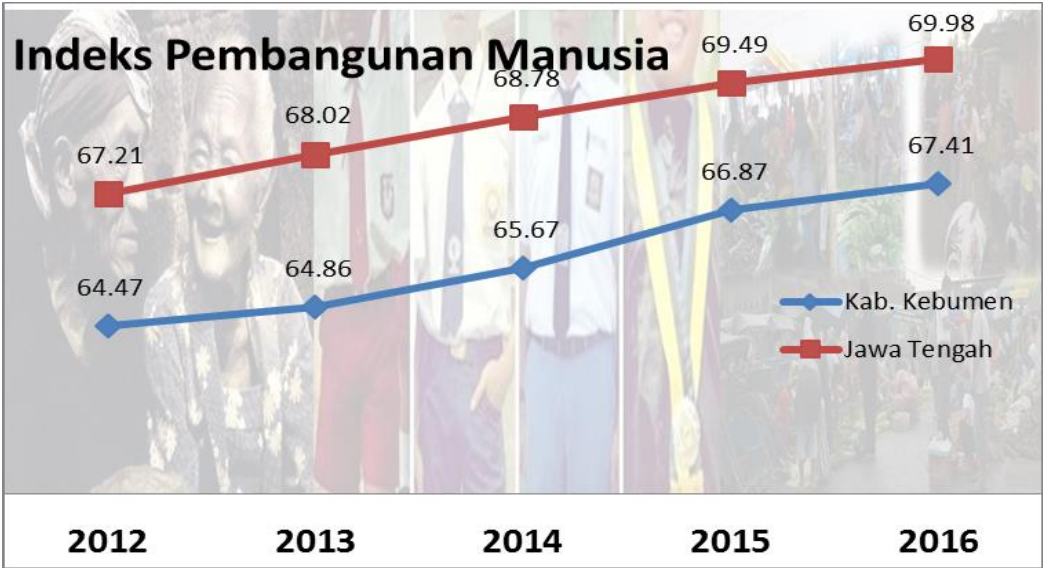
pada angka 20,44%. Target capaian angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 19,26%, realisasinya pada angka 19,86%. Begitu pula pada tahun 2017, target pada angka 18,50% namun realisasinya masih berada pada angka 19,60%. Berdasarkan metodologi penghitungan penduduk miskin, untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dapat ditempuh dengan cara mengendalikan kenaikan garis kemiskinan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a) mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat baik makanan maupun non makanan;
  - b) melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan pendapatan serta mengurangi pengangguran;
  - c) melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan sarana transportasi sehingga memudahkan akses masyarakat untuk memasarkan produk hasil pertanian dan akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - d) sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan dengan tingkat kalori yang tinggi dan menekan/mengurangi konsumsi yang sifatnya non kalori (rokok dan sejenisnya) dengan mengalihkan untuk konsumsi makanan berkalori tinggi;
  - e) mengawal program-program pemerintah pusat terkait penanggulangan kemiskinan seperti raskin/rastra, KIS, KIP PKH dan lain-lain, serta memastikan program tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah dan meninggalkan kebiasaan “bagito/bagidil”;
  - f) penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan aturan, dengan harapan para pekerja dapat menerima upah minimal sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan, sehingga daya beli masyarakat meningkat;
  - g) meningkatkan kesadaran kepada masyarakat melalui berbagai sosialisasi terkait hidup layak yakni hidup yang lebih bermartabat; dan
  - h) meningkatkan pendidikan masyarakat sehingga dalam jangka panjang dapat mengikis “budaya miskin” yang sudah terlanjur diwariskan melalui kehidupan sehari-hari di masyarakat.
- 7) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas hidup penduduk. Variabel penghitungan IPM mencakup Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); angka Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, kemudian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 25 tahun ke atas, dan pengeluaran

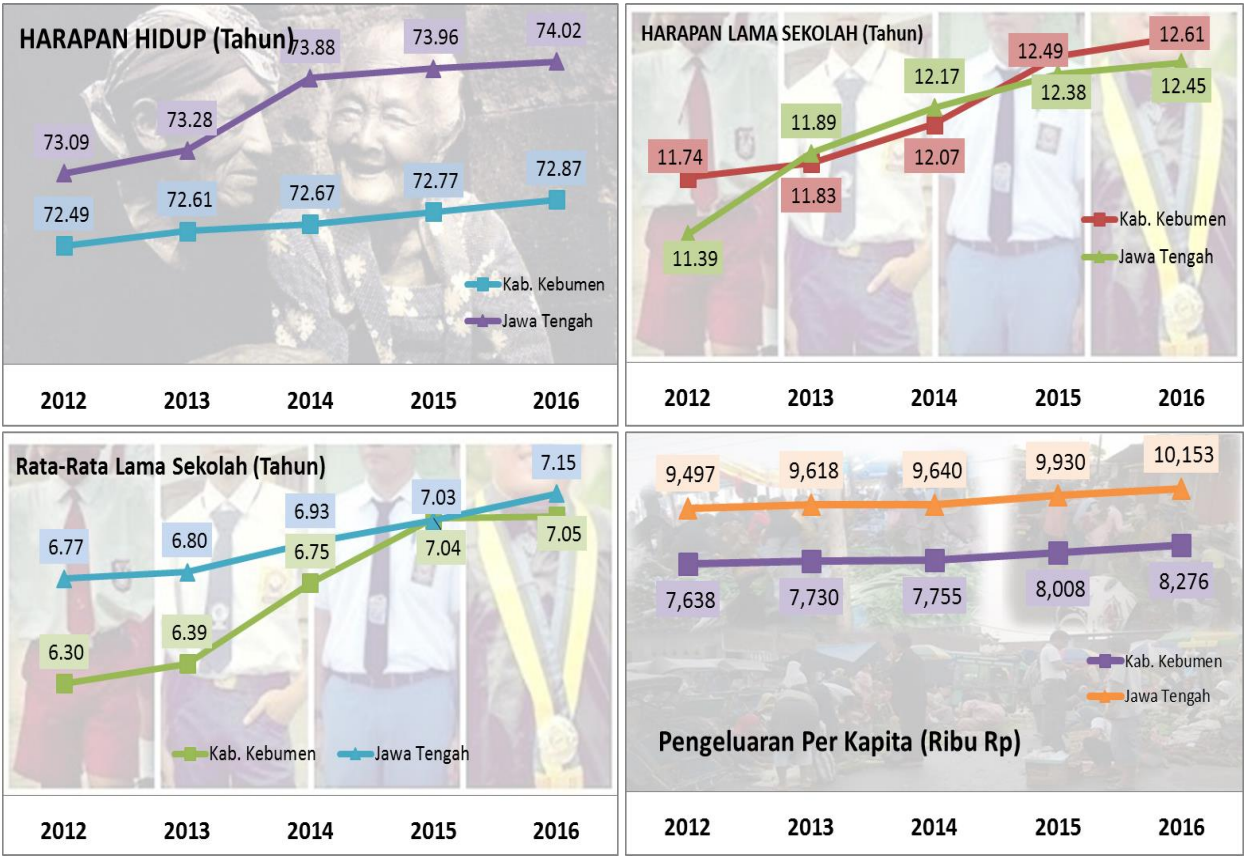
per kapita ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli yang diukur dengan menggunakan 96 komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan).

Untuk meningkatkan IPM suatu daerah maka diperlukan peningkatan Anggaran Pendidikan yang digunakan pada program-program yang dapat meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap PDRB. Di sisi lain PDRB berpengaruh besar terhadap Angka Harapan Hidup. Dari ketiga komponen IPM, komponen indeks kesehatan yang diukur menggunakan Angka Harapan Hidup memiliki pengaruh lebih besar daripada 2 (dua) komponen lainnya.



Gambar 2.17  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016  
*Sumber: BPS, 2017*

IPM Kabupaten Kebumen periode tahun 2012-2016, mengalami peningkatan dari 64.47 tahun 2012 menjadi 64.86 pada tahun 2013, 65.67 pada tahun 2014, 66.87 tahun 2015, dan 67.41 pada tahun 2016 serta diperkirakan meningkat pada tahun 2017 (masih menunggu data dari BPS). IPM Kabupaten Kebumen masih dibawah IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 69,98. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016, dapat dilihat dalam berikut.



Gambar 2.18  
Perkembangan Variabel Pembentuk IPM  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Sumber: BPS, 2017

AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen secara umum semakin membaik berdasarkan rata harapan hidup yang semakin panjang. AHH naik dari 72,67 pada tahun 2014, 72,77 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 72,87 tahun pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan secara rata-rata penduduk yang dilahirkan di Kabupaten Kebumen dapat bertahan hidup hingga usia 72-73 tahun.

Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan, serta genetika/keturunan. Upaya-upaya yang diperlukan dan terus dilakukan untuk meningkatkan AHH di antaranya pemugaran RTLH dan peningkatan sanitasi (pemenuhan kebutuhan air bersih, jamban sehat bagi keluarga), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, dan pendampingan kesehatan ibu dan anak.

Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari sebesar 12,07 pada tahun 2014 menjadi 12,49 pada tahun 2015 dan mencapai 12,61 pada tahun 2016. HLS Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 sudah diatas HLS Provinsi Jawa tengah sebesar 12,45.

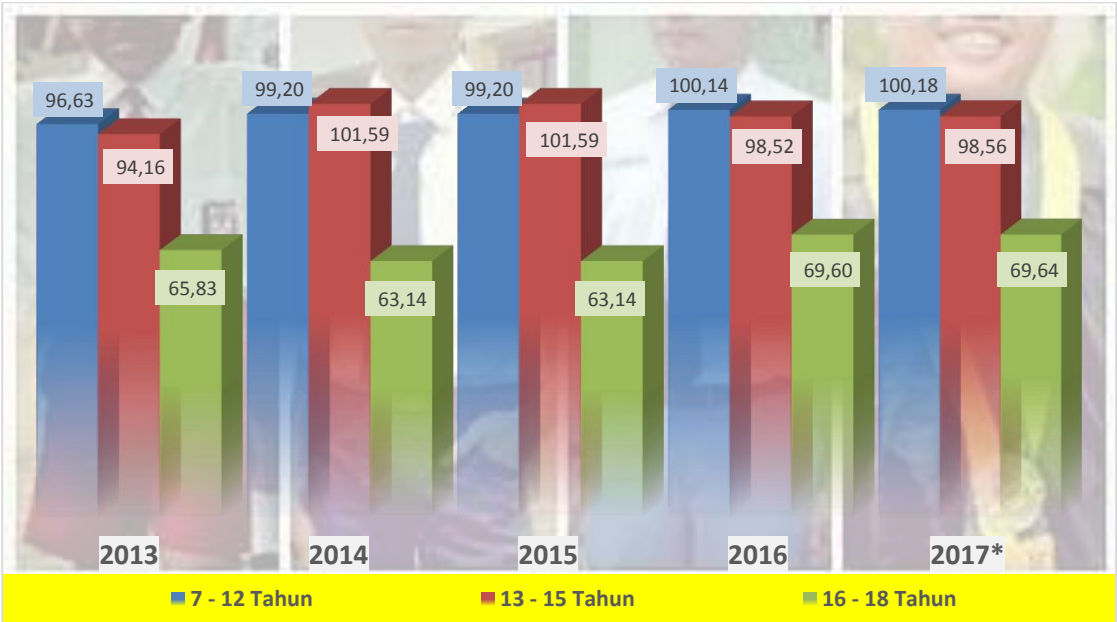
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Kebumen selama periode 2014-2016 meningkat dari 6,75 tahun pada tahun 2014, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,05 tahun. RLS Kabupaten Kebumen masih dibawah RLS Provinsi Jawa Tengah yaitu 7,15 tahun.

Selaras dengan kebijakan nasional pembangunan pendidikan dalam rangka mendukung wajib belajar 12 tahun, maka peningkatan angka HLS dan RLS perlu diupayakan melalui peningkatan aksesibilitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan meliputi pembangunan/rehabilitasi gedung dan ruang kelas baru, pemberian beasiswa miskin, bantuan operasional penyelenggaraan Program Kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, pengeluaran per kapita di Kabupaten Kebumen meningkat dari Rp.7.755 ribu pada tahun 2014 menjadi Rp.8.008 ribu pada tahun 2015, dan mencapai Rp.8.276 ribu pada tahun 2016. Meskipun pengeluaran per kapita di Kabupaten Kebumen meningkat, namun perlu adanya upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan memperketat belanja barang dan jasa, penghematan penggunaan BBM dan listrik, diversifikasi pangan, serta adanya pelayanan dan kemudahan dalam berinvestasi.

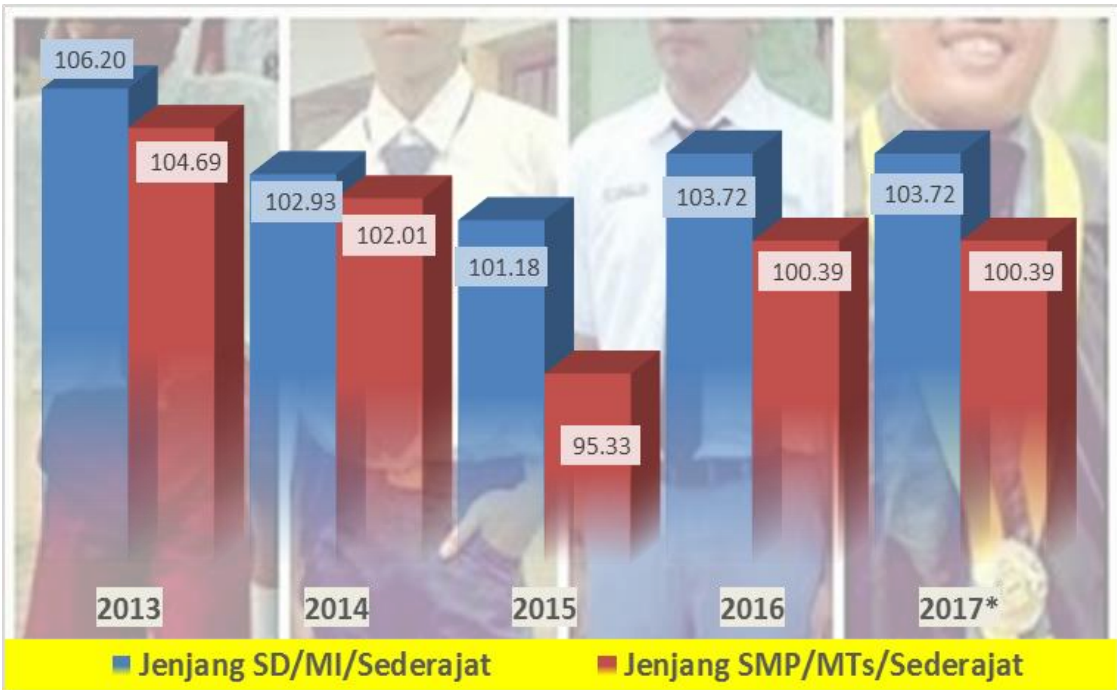
b. Fokus Kesejahteraan Sosial  
1) Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan masyarakat Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari berbagai indikator, di antaranya Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kelulusan, dan Angka Melanjutkan.



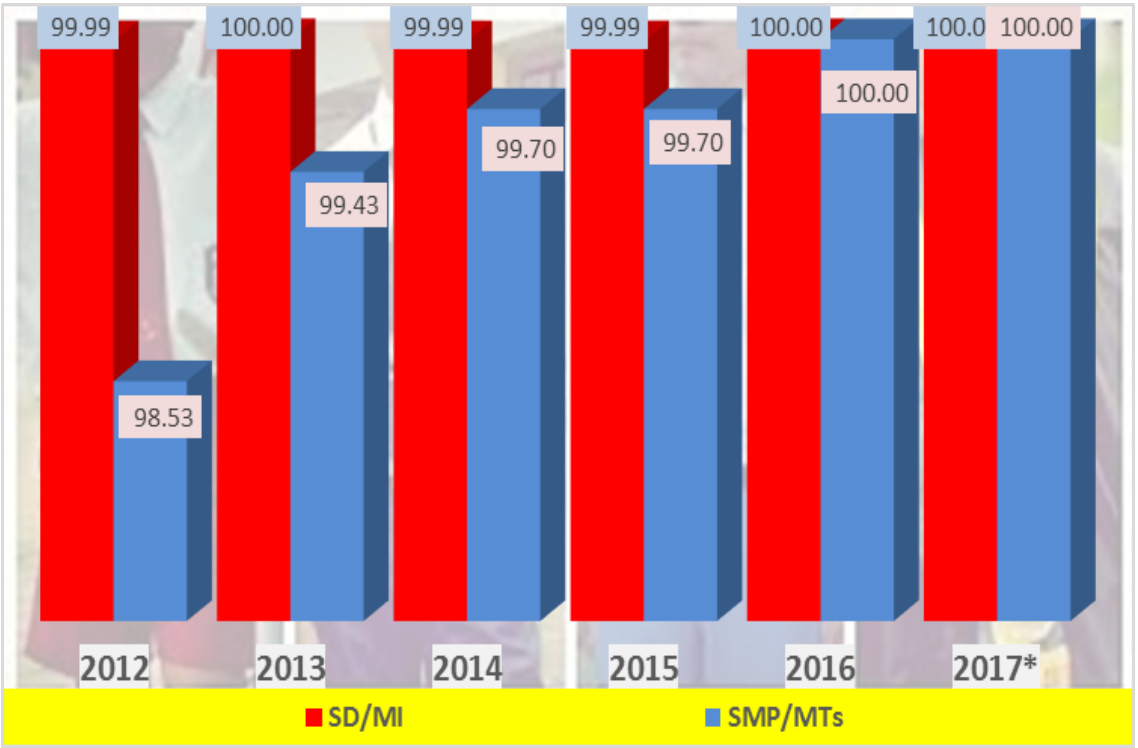
Gambar 2.19  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017  
Keterangan : \*) Angka sementara

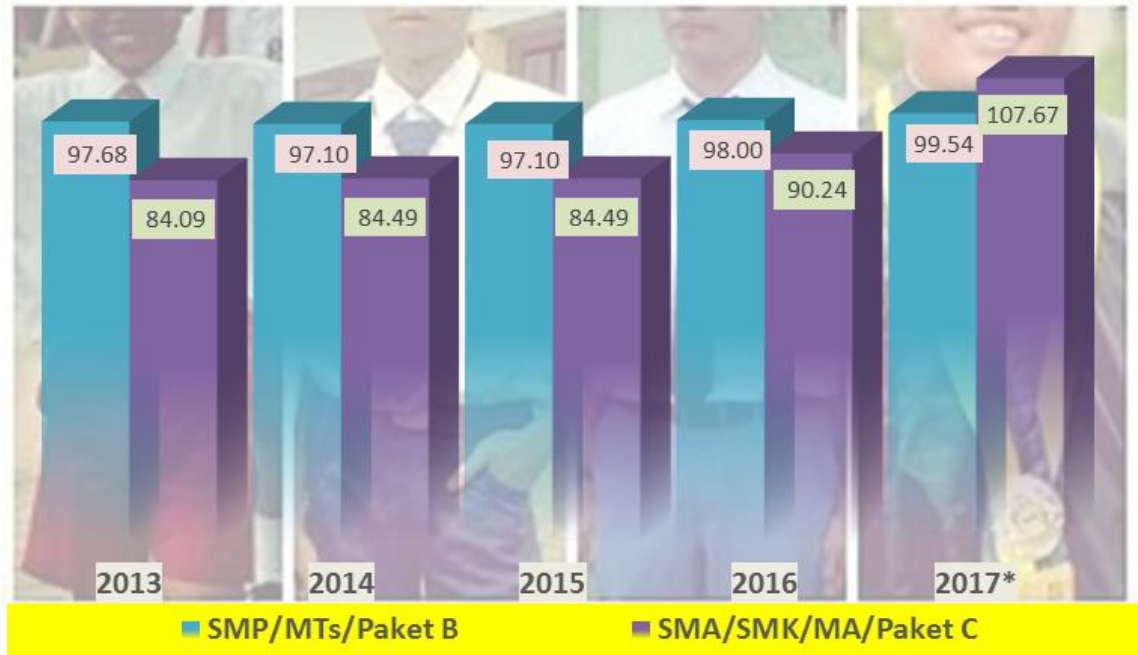


Gambar 2.20  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

Sumber: Dinas Pendidikan, 2017  
Keterangan : \*) Angka Sementara



Gambar 2.21  
Perkembangan Angka Kelulusan  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017  
Sumber: Dinas Pendidikan, 2017  
Keterangan : \*) Angka Sementara



Gambar 2.22  
Perkembangan Angka Melanjutkan  
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2017  
Sumber: Dinas Pendidikan, 2017  
Keterangan : \*) Angka Sementara

Dari gambar-gambar di atas, secara umum kondisi profil pendidikan di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2017 cukup baik. Hal ini terlihat dari APS, angka kelulusan dan angka melanjutkan yang meningkat dibanding kondisi tahun 2012. Namun demikian, APK angkanya pada tahun 2016 cenderung menurun dibanding

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kebumen.

Kondisi dan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan dasar antara lain :

- a) Penyediaan guru yang berkualitas masih belum terlaksana terutama guru dengan kualifikasi lebih baik. Di daerah pedalaman sangat sulit untuk menempatkan guru SD yang berkualitas apalagi membuat mereka nyaman untuk tinggal di pedalaman. Banyak guru terlatih yang berasal dari daerah pedalaman justru cenderung untuk menetap atau pindah ke wilayah perkotaan, setelah menyelesaikan pendidikannya. Selain itu minat guru perempuan untuk mengajar di daerah juga sangat sulit. Kesulitan lainnya adalah merekrut guru lulusan Sarjana atau Diploma untuk mengajar di sekolah pedalaman.
- b) Penyediaan infrastruktur fisik juga belum merata. Di beberapa daerah pedalaman dengan jumlah populasi murid sekolah yang sedikit, sejumlah kelas seringkali jarang digunakan. Sebaliknya di beberapa daerah perkotaan yang padat justru kekurangan kelas. Kondisi ini menyebabkan variasi yang signifikan terhadap jumlah siswa per kelas.
- c) Angka partisipasi anak berkebutuhan khusus (Luar Biasa) tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap angka partisipasi di sekolah secara umum. Penyelenggaraan layanan pendidikan berkebutuhan khusus masih didominasi oleh sektor swasta dengan 80% jumlah SDLB adalah swasta. Hambatan utama dalam pemerataan akses bagi anak berkebutuhan khusus antara lain biaya bagi keluarga miskin terkait dengan biaya sekolah swasta, dan jumlah penyelenggara pendidikan luar biasa di Kebumen masih terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan berkebutuhan khusus dengan membuka sekolah inklusi.

## 2) Kesehatan

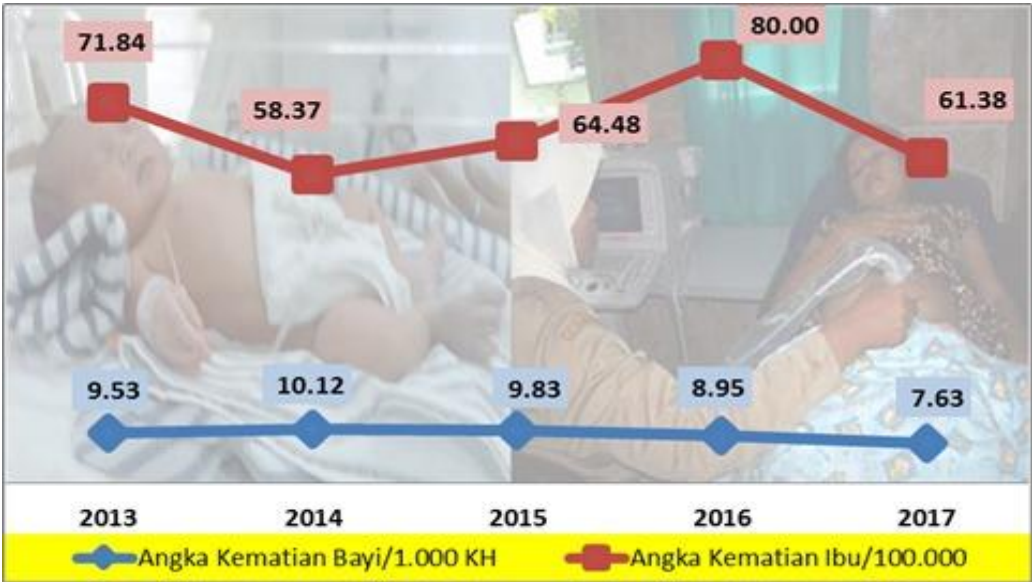
Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat vital. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Maka dari itu pemerintah juga menargetkan pembangunan kesehatan untuk masyarakat yang

tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemajuan dan kemampuan hidup sehat, agar derajat kesehatan optimal, dan tidak mudah terkena penyakit sehingga usia harapan hidup dapat panjang. Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UUD 1945 Pasal 28 huruf h ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tabel 2.14  
Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan  
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Balita	88.200	87.636	85.612
	Gizi Kurang	271 = 0.31%	268 = 0.31%	243 = 0,28 %
	Gizi buruk	9 = 0.01%	8 = 0,01%	8 = 0,01%
2	Jumlah ibu hamil KEK	1,02%	0,63%	0,63%
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	14Kss 64,48/100.000 KH	16 Kss 80/100.000 KH	12 Kss 61,38/100.000 KH
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	201 Kss 9,83/1.000 KH	179 Kss 8,95/1.000 KH	141 Kss 7,21/1.000 KH
5	Usia Harapan Hidup	70,45	72,81	72,81
6	Angka Kesakitan Penyakit DBD	18,22/100.000	40,6/100.000	17,79/100.000
7	Cakupan Ibu hamil K1	103%	100%	100%
8	Cakupan Ibu hamil K4	98,4%	94,19%	95,50%
9	Cakupan persalinan Oleh Nakes	98,00 %	99,70%	99,80%
10	Imunisasi Anak Sekolah	DT = 99,65% TD = 99,69% Campak = 99,48%	DT = 99,50% TD = 99,54% Campak = 99,51%	DT = 99,50% TD = 99,64% Campak = 99,20%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

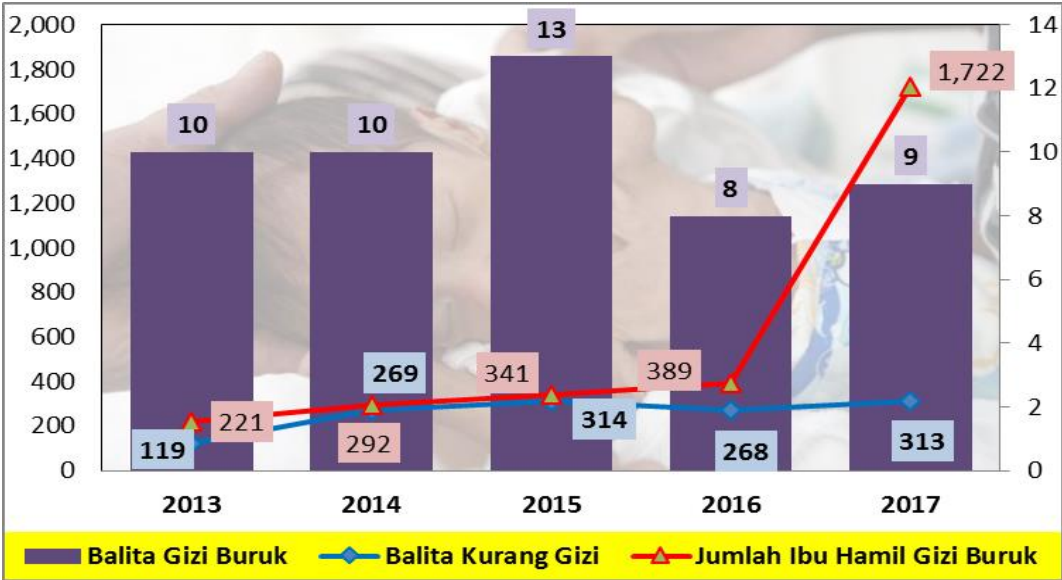


Gambar 2.23  
Perkembangan Angka Kematian Ibu  
dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen  
Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018  
Keterangan : \*) Angka Sementara

Kontribusi bidang kesehatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terwakili oleh indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI). Capaian indikator AKI per 100.000 Kelahiran Hidup selama periode 2012-2016 cenderung meningkat dari angka 51,86 pada tahun 2012 menjadi 80,01 pada tahun 2016 dan menurun menjadi 61,38 pada tahun 2017. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target dalam RPJMD, angka capaian AKI pada tahun 2016 jauh di bawah angka RPJMD yaitu 100. Sementara itu, AKB per 1.000 Kelahiran Hidup selama periode 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, AKB/1.000 Kelahiran Hidup mencapai 10,51, dan pada tahun 2016 angka AKB menurun menjadi 8,95, dan 7.63 pada Tahun 2017. Capaian AKB ini apabila dibandingkan dengan target capaian RPJMD sebesar 11 juga terlampaui.

Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Oleh karena itu, angka harapan hidup waktu lahir (e0) memiliki korelasi yang sangat erat dengan angka kematian bayi atau *infan mortality rate* (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonates dan status gizi bayi (0-11 bulan).



Gambar 2.24  
Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk,  
Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Gizi Buruk  
di Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2017  
Sumber: Dinas Kesehatan, 2018  
Keterangan : \*) Angka Sementara

Kondisi derajat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah kasus balita gizi buruk (BGB), balita

kurang gizi (BKG) dan ibu hamil gizi buruk (IHGB). Pada periode 2012-2016, BGB, BKG dan IHGB cenderung mengalami penurunan, dimana BGB turun dari 20 kasus pada 2012 menjadi 9 kasus pada tahun 2017. Penurunan kasus gizi buruk ini mengindikasikan adanya keberhasilan program peningkatan gizi masyarakat termasuk untuk penanganan gizi buruk bagi balita. BKG turun dari 345 kasus tahun 2012 menjadi 313 kasus pada 2017. Sementara itu IHGB cenderung meningkat dari 241 kasus pada 2012 menjadi 1722 kasus pada tahun 2017 hal ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja UPT Puskesmas dalam pendataan kasus ibu hamil KEK.

3) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang tertangani menjadi salah satu indikator kesejahteraan sosial. Dari sisi kenyamanan masyarakat, semakin sedikit/rendah kriminalitas yang terjadi, semakin nyaman masyarakat dalam melakukan setiap aktivitasnya, sehingga upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin optimal.

Tabel 2.15  
Jumlah Penanganan Tindak Kriminalitas  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kasus Narkoba	8	10	6	0	17	14
2.	Kasus Pembunuhan	0	1	2	2	2	2
3.	Kasus Seksual	17	21	1	0	38	28
4.	Kasus Penganiayaan	31	8	2	17	9	12
5.	Kasus Pencurian	85	96	39	82	97	86
6.	Kasus Penipuan	16	12	9	6	17	22
7.	Kasus Pemalsuan Uang	4	4	0	1	0	0
Total Kasus		161	152	59	108	180	164
Jumlah penduduk		1.183.763	1.176.662	1.181.006	1.184.938	1.188.622	1.188.622
Rasio angka kriminalitas yang tertangani		1,36	1,29	0,50	0,50	1,51	1,37

Sumber : Polres Kebumen, 2017

Kasus kriminalitas yang ditangani di Kabupaten Kebumen selama 2012-2017 cukup fluktuatif. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan di Kabupaten Kebumen sangat dinamis. Namun jika dibandingkan, kasus kriminalitas pada tahun 2016 sebanyak 180 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 164 kasus menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus terutama pada kasus pencurian. Hal ini menunjukkan keamanan di Kabupaten Kebumen sudah mulai kondusif dan mengindikasikan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

c. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia

seutuhnya. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap benda cagar budaya serta kegiatan olahraga yang diselenggarakan merupakan indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.16  
Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Kegiatan Olahraga  
di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	45	45	46	46	47	53
2.	Jumlah Grup Kesenian	204	204	311	311	340	348
3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	4	11	11	11
4.	Kegiatan Olahraga	1	1	1	7	7	7
5.	Jumlah Klub Olahraga	68	72	86	86	86	86
6.	Jumlah Gedung Olahraga	11	14	16	16	16	16

Sumber:Profil Daerah Tahun 2017

Keterangan: \*) Data per Juni 2017

3. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 4 (empat) fokus layanan, yaitu Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar, Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Fokus Layanan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

a. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu pondasi atau pilar terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berusaha secara optimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut BPS merupakan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap

penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.17  
Perkembangan APK Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	TINGKAT SEKOLAH	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	SD/Sederajat	102,93	101,18	103.72	103.61	103.59	101.58
2.	SMP/Sederajat	102,33	95,33	100,39	99,84	99,06	97,16

Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara

Selama tahun 2012-2017, kecenderungan APK ditunjukkan pada jenjang SD/ sederajat menunjukkan angka di atas 100 hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia sekolah SD/ sederajat di Kabupaten Kebumen telah duduk di bangku sekolah. Sedangkan untuk APK SMP/ Sederajat cenderung menurun, hal ini mengisyaratkan adanya penurunan pada jumlah murid yang tinggal kelas atau berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya, yang mana berarti terjadi peningkatan pada kualitas murid dan sekolah pada jenjang SMP/ Sederajat.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat, dan SMA/ Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%.

Selama tahun 2012-2017 APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan yang berarti bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di Kabupaten Kebumen yang bersekolah pada jenjang SD/ Sederajat dan SMP/ Sederajat semakin banyak.

Tabel 2.18  
Perkembangan APM Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	TINGKAT SEKOLAH	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	SD /Sederajat	88,01	86,66	88,74	90,82	89.08	88.47
2.	SMP/Sederajat	74,18	71,67	75,62	75,62	72.08	71.55

Sumber: Dinas Dinas Pendidikan, 2017

Keterangan: \*) Angka Sementara

c) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/Sederajat selama periode 2012-2016 cenderung mengalami penurunan untuk semua jenjang pendidikan. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa retievel untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa rawan putus sekolah, dan beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu mempunyai korelasi positif terhadap penurunan Angka Putus Sekolah.

Tabel 2.19  
Perkembangan Angka Putus Sekolah  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017 (%)

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	SD/Sederajat	0,07	0,07	0,09	0,07	0.06	0.09
2.	SMP/Sederajat	0,31	0,17	0,29	0,15	0.34	0.38

Sumber: Dinas Dinas Pendidikan, 2017

Keterangan: \*) Angka Sementara

d) Rasio Ketersediaan Sekolah, Ruang Kelas dan Penduduk Usia Sekolah

Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Untuk itu, pemerintah wajib mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat. Ketersediaan sekolah yang berkualitas dan mampu menampung penduduk usia sekolah juga menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rasio ketersediaan ruang kelas terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2017 relatif meningkat untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat. Pada tingkat SD/Sederajat, pada tahun 2012 rasio ketersediaan ruang kelas dibanding penduduk usia sekolah sebesar 1:24 dan pada tahun 2017 berada pada angka 1:21. Sedangkan untuk tingkat SMP/Sederajat,

ketersediaan ruang kelas dibanding penduduk usia sekolah pada tahun 2012 sebesar 1:31 dan menjadi 1:29 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan jumlah ruang kelas SD/Sederajat dan SMP/Sederajat untuk menampung penduduk usia sekolah SD/Sederajat dan SMP/Sederajat sudah cukup ideal.

Tabel 2.20  
Perkembangan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Sekolah						
	SD/Sederajat	902	907	915	910	912	911
	SMP/Sederajat	202	198	193	196	200	202
2.	Jumlah Kelas						
	SD/Sederajat	5.675	5.834	5.809	5.835	5,873	5,932
	SMP/Sederajat	2.145	2.105	2.156	2.233	2,271	2,227
3.	Penduduk Usia Sekolah						
	7 - 12 Tahun	133,456	133,240	128.497	127.507	126,782	125,321
	13 - 15 Tahun	65.467	69.147	65.534	64.465	63,793	63.793
4.	Rasio Penduduk Usia Sekolah/Kelas						
	SD/Sederajat	24	23	22	22	22	21
	SMP/Sederajat	31	33	30	29	28	29
5.	Rasio Penduduk Usia Sekolah/ Sekolah						
	SD/Sederajat	148	147	140	140	139	138
	SMP/Sederajat	324	349	336	329	319	316

Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Keterangan: \*) Angka proyeksi

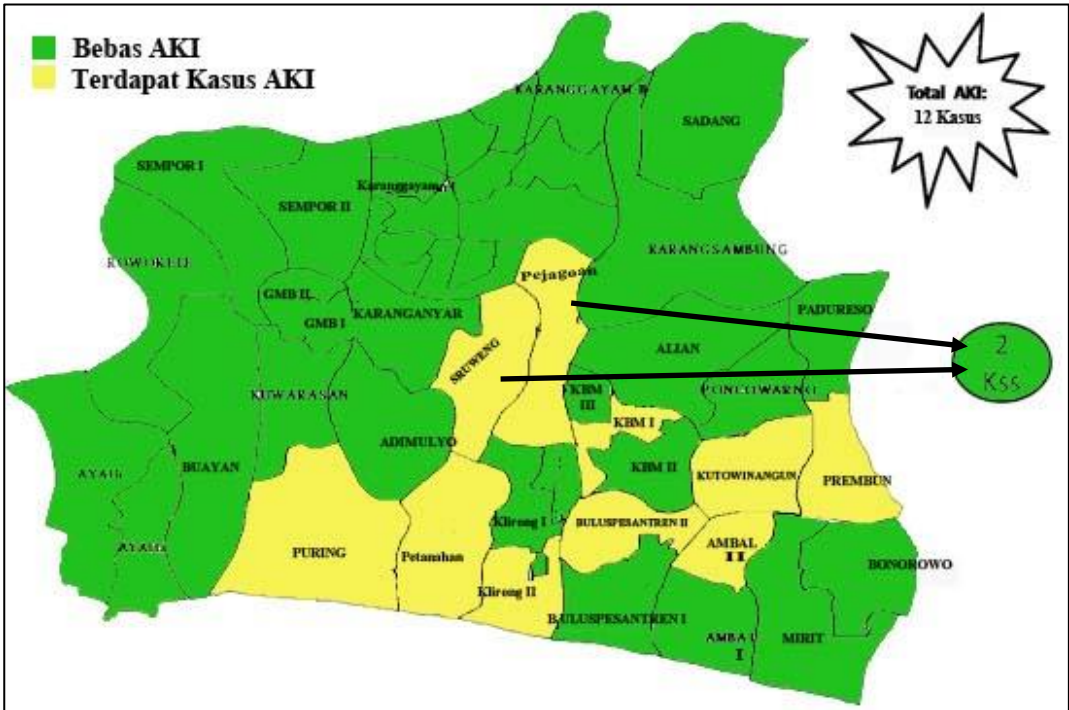
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah selama periode 2012-2016 untuk tingkat SD/Sederajat mengalami kenaikan sedangkan untuk tingkat SMP/Sederajat cenderung menurun.

## 2) Kesehatan

### a) Angka Kematian Ibu (AKI)

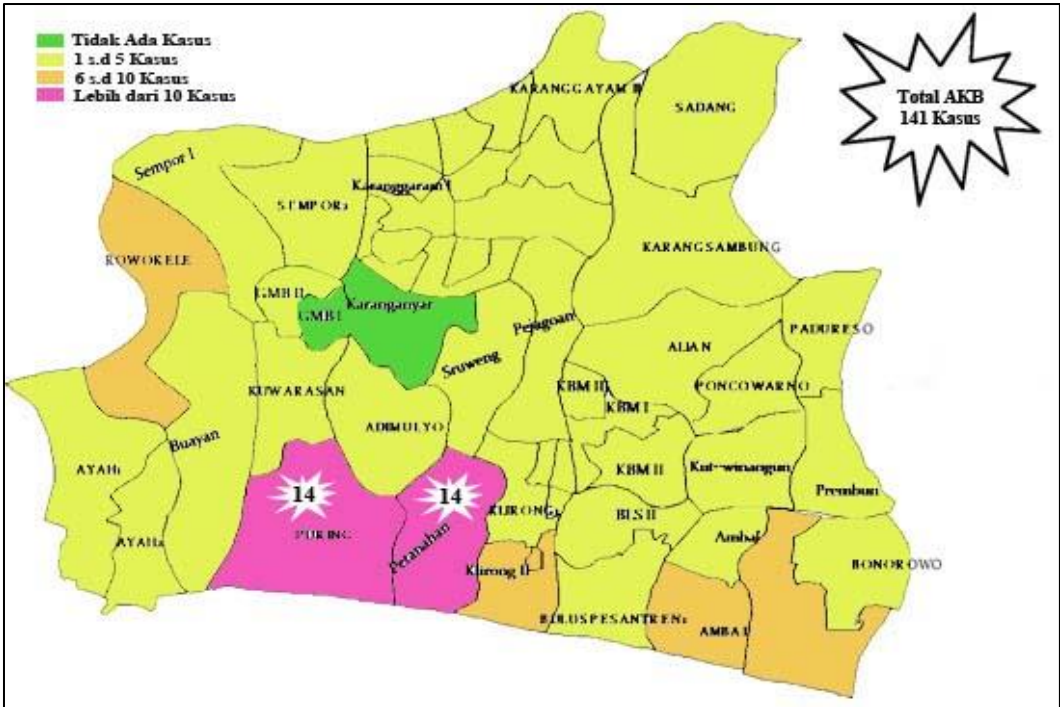
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI dihitung per 100.000 kelahiran hidup dan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian karena kehamilan dan persalinan. AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Sebaran kasus AKI Tahun 2017 terjadi pada 10 wilayah kecamatan dengan Puskesmas Pejagoan dan Sruweng menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yaitu sebanyak 2 (dua) kasus dan total kasus AKI secara keseluruhan di Kabupaten Kebumen sebanyak 12 kasus.



Gambar 2.25  
Sebaran AKI Kabupaten Kebumen Tahun 2017  
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

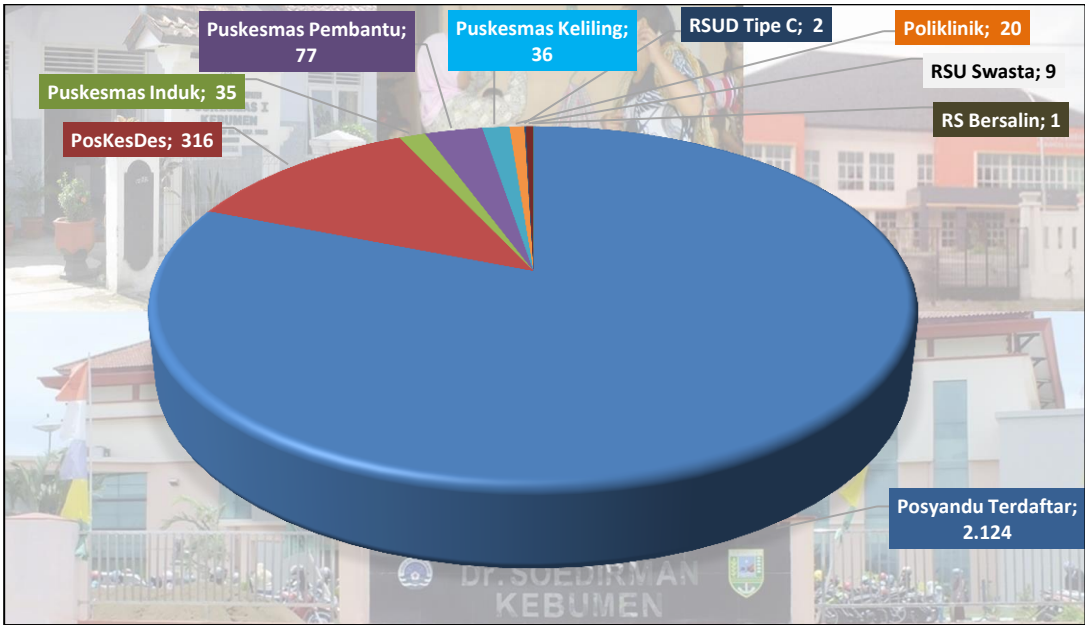


Gambar 2.26  
Persebaran Kasus Angka Kematian Bayi (AKB)  
Kabupaten Kebumen Tahun 2017  
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Dilihat dari persebaran kasus AKB pada tahun 2017, terdapat 2 (dua) kecamatan yaitu Petanahan dan Puring yang menjadi wilayah dengan kasus AKB tertinggi yaitu masing-masing 14 kasus. Sementara itu terdapat 2 (dua) wilayah puskesmas yang bebas kasus AKB yaitu Puskesmas Karanganyar dan Gombang I. Total kasus AKB secara keseluruhan di Kabupaten Kebumen sebanyak 141 kasus.

c) Ketersediaan Sarana dan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan terjangkau merupakan syarat penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berfungsi secara optimal, pemerintah harus menyediakan sarana kesehatan dasar sampai dengan lanjutan melalui fasilitas posyandu, puskesmas, dan juga rumah sakit. Hal ini untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam gambar berikut.

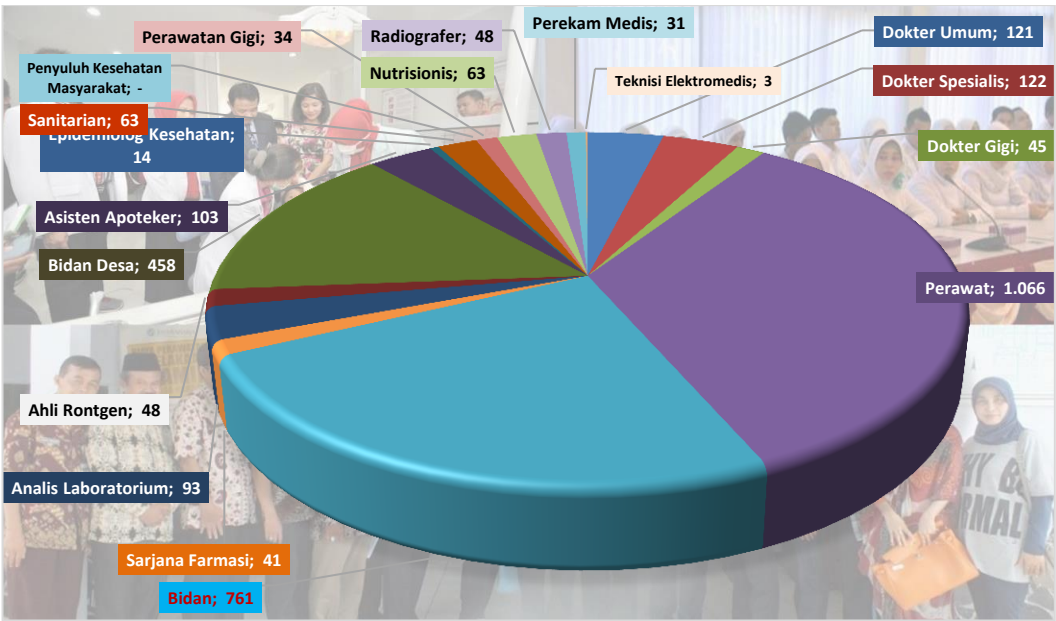


Gambar 2.27

Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan  
di Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan juga sangat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Semakin cukup dan berkualitas tenaga kesehatan yang tersedia, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan, maka semakin tinggi pula harapan akan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.28  
Ketersediaan Tenaga Kesehatan  
di Kabupaten Kebumen Tahun 2017  
*Sumber: SIPD, 2017 (per Juni 2017)*

d) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016.

Tabel 2.21  
Rasio Posyandu Per Satuan Balita  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Jumlah Posyandu	2.101	2.103	2.112	2.116	2.117	2.124
Jumlah Balita	98.806	94.559	97.814	96.559	94.895	85.612
Rasio Posyandu per 1000 Balita	21,26	22,24	21,59	21,91	22,31	24.81

*Sumber : SIPD dan Dinas Kesehatan, 2018*

Berdasarkan table 2.21, rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, rasio posyandu per 1000 balita sebesar 21,26, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 21-22 posyandu. Angka tersebut meningkat menjadi 24.81 pada tahun 2017. Kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pada layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di 460 Desa dan Kelurahan.

e) Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

Tabel 2.22

Rasio Puskesmas dan Klinik Per Satuan Penduduk  
Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Puskesmas dan Klinik	113	109	132	132
Jumlah Penduduk	1.181.006	1.182.290	1.188.622	1.188.622
Rasio	0,10	0,09	0,11	0,11

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

f) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat

kesehatan masyarakat. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2017.

Tabel 2.23  
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk  
Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017*
Jumlah Rumah Sakit	12	12	11	12
Jumlah Penduduk	1.181.006	1.182.290	1.188.622	1.188.622
Rasio	0,010	0,010	0,009	0,010

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

g) Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

Salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Kebumen adalah RSUD dr. Soedirman. Pelayanan di RSUD dr. Soedirman telah memenuhi standar ISO 9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 69,94%, kondisi ini belum baik karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%.
- Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2016 mencapai 73 kali.
- Pada tahun 2016 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (*Turn Over Interval*) mencapai 1,5 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standar Kementerian Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
- Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 3,4% hari pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3-6 hari.
- Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2016 mencapai 21% pasien, mengalami kenaikan sebesar 1% pasien dari tahun 2015 yang menunjuk angka 20% pasien. Walaupun angka kematian pasien ketika

dirawat di RS mengalami kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25 ‰.

- Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 46,4% pasien pada tahun 2017, mengalami kenaikan dari tahun 2016 yakni 39%. Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai ideal GDR adalah < 45%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD dr. Soedirman tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 67,5%, menurun jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 69%. Kondisi ini belum efisien karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70% - 85%,
- Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2016 mencapai 73 kali per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut sudah mendekati standar nasional yaitu 75 kali per tahun.
- Pada tahun 2017 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (*Turn Over Interval*) mencapai 1,6 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien masih jauh dari ideal karena sesuai standar Kementerian Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
- Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 3,4 hari pada tahun 2016 dan menurun menjadi 3,35 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien masih jauh memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3-6 hari.
- Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2017 sebesar 25,3‰, angka ini sudah melebihi ambang aman yakni 25‰, Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) ini meningkat dari tahun 2016 yakni sebesar 16,81%.
- Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per 1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per 1.000 pasien keluar. Pada tahun 2017 ini GDR 46,4% Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD dr. Soedirman pada

parameter angka kematian, jauh dari target nasional.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastuktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat yang memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Jangkauan pelayanan jalan di Kabupaten Kebumen saat ini terbatas pada wilayah-wilayah yang secara alami berkembang dengan pesat. Kondisi jalan setiap tahunnya harus terus ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya untuk mengimbangi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Data ketersediaan jalan di Kabupaten Kebumen selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24  
Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen  
Tahun 2012-2017 (dalam kilometer)

NO.	STATUS JALAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jalan Nasional	60,58	60,58	60,58	56,43	60,89	60,89
2.	Jalan Provinsi	30,09	30,09	30,09	30,09	29,67	29,67
3.	Jalan Kabupaten	615,20	615,20	615,20	975,15	975,15	960,36
4.	Jalan Desa	1.592,08	1.592,08	1.592,08	1.254,01	1.254,01	1.236,94

Sumber: DPUPR, 2018

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan perkembangan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan produktif. Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat salah satunya dari jumlah pengajuan IMB. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.26, jumlah pengajuan IMB di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan dari 524 izin pada tahun 2012 menjadi 610 izin pada tahun 2017, meskipun mengalami penurunan khususnya pada Tahun 2016.

Tabel 2.25  
Perkembangan Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengajuan IMB per tahun	524	635	750	750	581	610

Sumber: DPUPR dan DPMPTSP, 2018

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi

rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

Rumah layak huni memiliki kriteria sebagai rumah tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan konstruksi, serta aspek legalitas kepemilikan rumah, yaitu antara lain adalah: lantai tidak lembab, pencahayaan cukup (sinar matahari dapat masuk rumah), tidak bocor, tahan gempa (skala tertentu) dan mempunyai bukti pertanahan. Pada tahun 2017, jumlah rumah layak huni mencapai 290.221 unit atau sebesar 94,57% dari jumlah rumah yang ada sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.27. RTLH Kabupaten Kebumen yang belum ditangani sampai dengan tahun 2018 dan 2019 adalah sebanyak 11.011 unit atau sebesar 96,41% dari rumah yang ada.

Tabel 2.26  
Perkembangan Capaian dan Target Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2019

NO.	KONDISI RUMAH	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Target 2018	Target 2019
A.	Rumah Tidak Layak Huni								
1.	Jumlah Rumah	293.020	293.020	293.020	306.885	306.885	306.885	306.885	306.885
2.	Jumlah RTLH	8.012	4.774	26.908	24.639	22.169	16.655	13.342	11.011
3.	Penanganan RTLH	6.236	3.238	2.269	2.470	5.514	5.605	3.313	2.331
4.	Rasio RLH (100-rasio RTLH)	97,28 %	98,38 %	99,15 %	91,25 %	92,77 %	94.57 %	95,65 %	96,41 %
B.	Permukiman Kumuh								
1.	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	Na	Na	213,62	213,62	213,62	196,09	180,39	160,39

Sumber: Disperkim LH, 2018

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman secara umum dapat diartikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma, sedangkan ketertiban umum sendiri lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Pada perkembangannya ketentraman dan ketertiban umum telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi dan dilindungi. Dalam hal ini perlu kehadiran pemerintah untuk melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat.

Hal-hal yang dapat mengusik ketentraman dan ketertiban umum adalah tindak kejahatan. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi dengan kesigapan aparat

keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini meliputi:

- a) Penyelenggaraan/pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- d) Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e) Penilaian eskalasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

Sementara itu upaya yang dilakukan di bidang keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana umum melalui upaya represif dan preventif oleh pihak Kepolisian untuk membantu menciptakan rasa tenteram dan tertib di masyarakat, antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengamanan swakarsa dengan menggiatkan siskamling.

Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dari semakin turunnya jumlah kriminalitas yang terjadi yaitu 359 kasus pada tahun 2012 menjadi 164 kasus pada tahun 2017. Hal ini tidak terpisah dengan adanya dukungan sarana prasarana keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara umum capaian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel 2.27

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	927	910	960	894	903	1022
2.	Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	13	14	14	8	8	7
3.	Jumlah Aparat Pamong	123	119	119	132	132	69

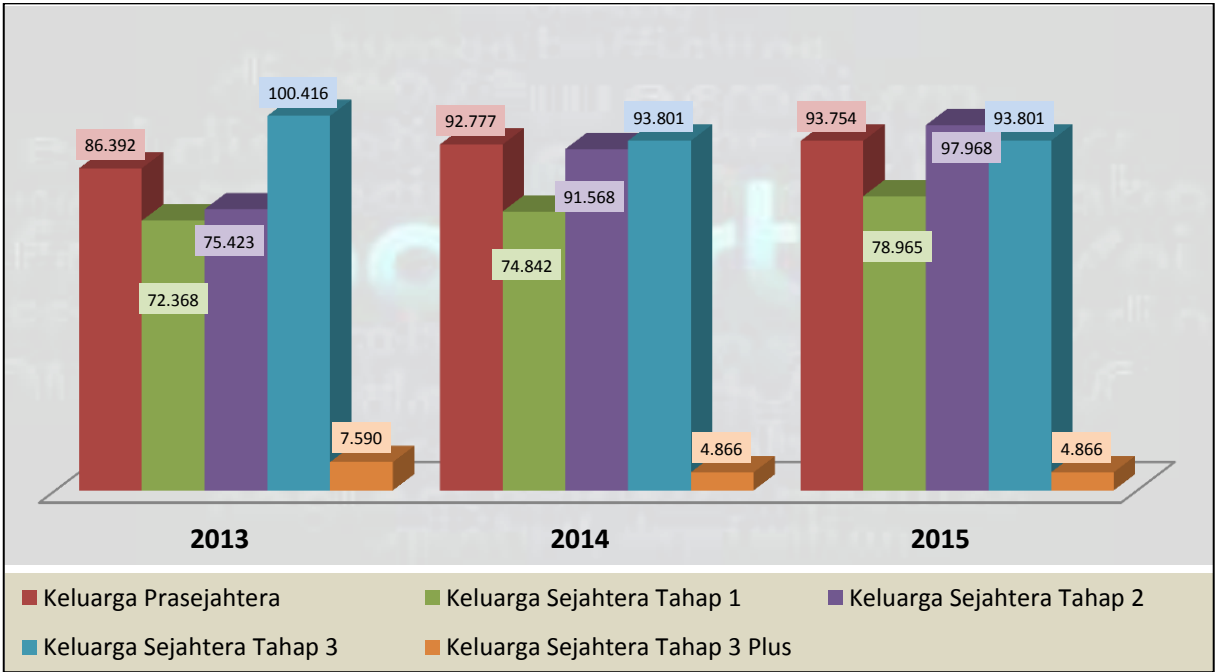
NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
	Praja						
4.	Jumlah Pos Siskamling	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4045
5.	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	25	30	30	20	20	36
6.	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	9.620	9.770	9.612	9.636	9.636	8832
7.	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	1.068	898	720	480	480	750
8.	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	1.065	894	720	480	480	750

Sumber: SIPD, 2017  
Keterangan: \*) Angka Sementara

6) Sosial

Sosial dapat berarti kemasyarakatan, dalam hal ini dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan dan kegiatan.

Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah KK menurut tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut:

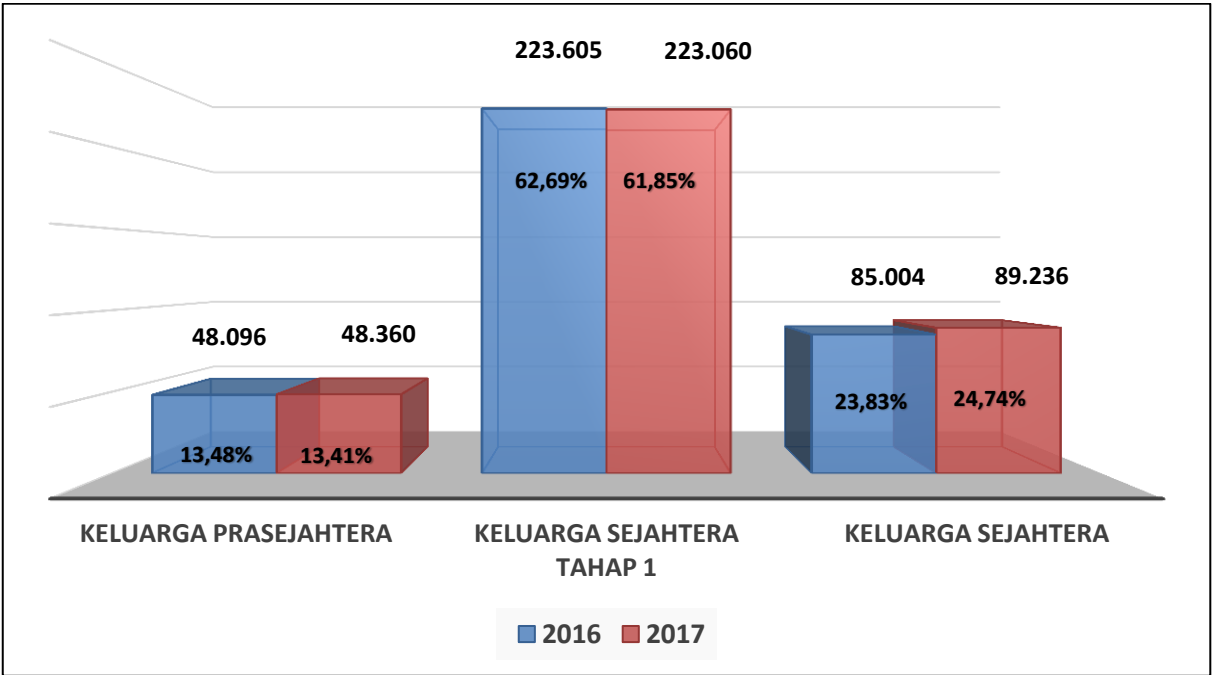


Gambar 2.29  
Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga  
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2015

Sumber: Badan PP dan KB, 2017  
Keterangan: Sebelum perubahan indikator BKKBN

Jumlah keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera 1) selama periode 2013-2015 cenderung mengalami peningkatan dari 158.760 KK tahun 2013 menjadi 172.719 KK pada tahun 2015. Disisi lain jumlah keluarga yang berada di atas garis kemiskinan (keluarga sejahtera 2, 3 dan 3 plus) juga mengalami peningkatan dari 183.429 KK pada 2013 menjadi 196.635 KK tahun 2015. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah kepala keluarga.

Pada Tahun 2016 BKKBN ada perubahan indikator operasional untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga yang sebelumnya dibagi menjadi lima kategori yaitu Tahapan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera Tahap 2, Keluarga Sejahtera Tahap 3, dan Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus menjadi tiga kategori yaitu Tahapan Keluarga Pra Sejahtera, Tahapan Keluarga Sejahtera I, dan Tahapan Keluarga Sejahtera. Menurut pendataan menggunakan indikator yang baru pada tahun 2016, jumlah Keluarga Pra Sejahtera sejumlah 48.096, Keluarga Sejahtera Tahap I sejumlah 223.605 dan Keluarga Sejahtera sejumlah 85.004, dan tahun 2017 jumlah keluarga pra sejahtera sejumlah 48.360, Keluarga Sejahtera Tahap 1 sejumlah 223.060, dan Keluarga Sejahtera 89.236.

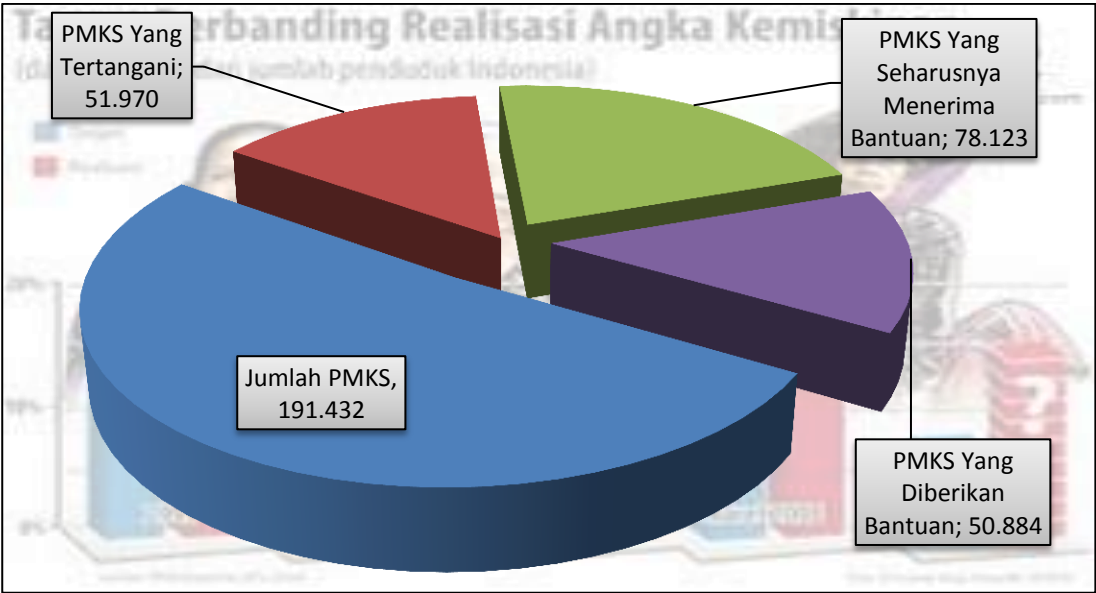


Gambar 2.30  
Persentase Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga  
Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Sumber: Dinas Sosial dan PPKB, 2017  
Keterangan: Setelah perubahan indikator BKKBN

Jika dilihat dari prosentasenya jumlah keluarga sejahtera mengalami peningkatan, artinya adanya peningkatan status kesejahteraan keluarga. Pada tahun 2016 jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 13,48% dan menurun pada tahun 2017 menjadi 13,41%. Pada tahun 2016 jumlah keluarga sejahtera tahap 1 sebesar 62,69%,

dan berkurang menjadi 61,85% pada tahun 2017, begitu juga dengan prosentase keluarga sejahtera semula 23,83% pada tahun 2016 bertambah menjadi 24,74% pada tahun 2017.



Gambar 2.31  
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
di Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Sumber : Dinas Nakertransos, 2017

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial selama periode 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan dari 215.842 jiwa tahun 2013 menjadi 191.432 jiwa pada tahun 2017. Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah PMKS yang ada dan ditangani. Semakin banyak jumlah PMKS semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pada tahun 2016, jumlah PMKS di Kabupaten Kebumen sebanyak 198.651 orang dengan jumlah yang tertangani sebanyak 35.151 orang, yang diberikan bantuan sebanyak 29.987 orang dari 38.451 orang yang seharusnya menerima bantuan. Pada tahun 2017, jumlah PMKS di Kabupaten Kebumen sebanyak 191.432 orang dengan jumlah yang tertangani sebanyak 51.970 orang, yang diberikan bantuan sebanyak 50.884 orang dari 78.123 orang yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.28  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sosial  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah sarana sosial						
	a. Panti Asuhan	18	18	17	17	18	20
	b. Panti Bina Netra	1	1	1	1	1	0
	c. Panti Bina Grahita	1	1	1	1	1	0
	d. Panti Bina Karya	1	1	1	1	1	0
	e. Panti Bina Rungu Wicara	0	1	2	2	2	0
	f. Panti Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0
	g. Panti anak dengan kecacatan	0	0	0	0	0	1
2.	Penyandang Masalah	Na	246	1.410	30.568	35.151	50.884

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
	Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial						
3.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Na	2.566	1.539	31.393	29.987	51.970

Sumber: Dinas Sosial dan PPKB 2017

Keterangan: \*) Angka Sementara

b. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2017, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Kebumen adalah 887.076 jiwa. Dari jumlah tersebut angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) sebesar 71,14%, sedangkan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) sebesar 28,86%.

Tabel 2.29  
Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen  
Tahun 2012 - 2017

NO	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,58	3,52	3,25	4,14	4,26	5,58
2	Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja	Na	42,76	51,24	23,58	19,59	25,60

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Upaya peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak masih terdapat permasalahan yaitu:

- a) kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi;
- b) fasilitas umum yang belum ramah gender; dan
- c) terdapat kesenjangan pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Potensi kualitas sumber daya perempuan dan kemampuan untuk berperan dalam masyarakat sama dengan laki-laki. Namun kenyataannya, masih banyak dijumpai status dan peran perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Hal itu bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan, dalam bidang legislatif maupun yudikatif, dalam perannya secara umum di dunia usaha/swasta dan masyarakat. Perempuan yang menduduki posisi penting dan bekerja di sektor publik di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30  
Perkembangan Capaian Kinerja  
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,26	4,11	4,12	3,45	3,65	3,65
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	12,25	14,27	14,76	14,75	14,89	14,89
3.	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	86	132	118	120	122	76
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	86	132	122	120	122	76

Sumber: DispermadesP3A, 2017

Rasio kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan yaitu mencapai 122 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 76. Penurunan rasio kekerasan dalam rumah tangga mengindikasikan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

### 3) Pangan

Capaian kinerja urusan pangan Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan target indikator kinerja dalam RPJMD Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) indikator yaitu persentase penanganan kerawanan pangan, persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya dan persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan.

- a) Capaian indikator persentase penanganan kerawanan pangan, dari target 42,75% pada tahun 2017 angka capaian pada tahun 2017 sebesar 47,25% atau melampaui target;
- b) Capaian indikator persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya, dari target tahun 2017 sebesar 30,22%, dapat dicapai sebesar 30,22% atau juga sesuai dengan target yang dibebankan; dan
- c) Capaian indikator persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan, dari target tahun 2016 sebesar 37,39%, capainnya sebesar 39,76% atau melampaui target.

Tabel 2.31  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen  
Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase penanganan kerawanan pangan	14,5	16,03	22,14	30,53	35,88	47,25
2.	Persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas	1,09	10,00	10,22	10,65	20,43	30,22

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	harga pangannya						
3.	Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	10,87	16,30	20,65	25,00	31,74	39,76
4.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	1
5.	Ketersediaan pangan utama per penduduk (%)	258,11	197,29	209,01	220,73	203,30	201,44

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2017

4) Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari data persentase luas lahan bersertifikat. Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang oleh seseorang atau badan hukum harus di buktikan. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah di lakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti, dengan pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah.

Sebagaimana terlihat di Tabel 2.33, pada Tahun 2012-2017 persentase lahan bersertifikat di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 22,02% pada tahun 2012 menjadi 28,64% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak milik tanah mereka.

Tabel 2.32  
Perkembangan Luas Lahan Bersertifikat  
di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Persentase luas lahan bersertifikat	22,02	22,15	22,83	22,91	25,70	28,64

Sumber: BPN, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara

5) Lingkungan Hidup

Meningkatnya aktivitas kegiatan penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya sampah yang dihasilkan masyarakat, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Kabupaten Kebumen terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Akses masyarakat terhadap sanitasi dan air minum yang layak merupakan bagian dari upaya promotif-preventif

yang harus diutamakan. Upaya promotif-preventif yang efektif akan menekan kejadian penyakit, menurunkan jumlah orang yang sakit dan orang yang berobat sehingga berdampak pada efisiensi biaya kesehatan yang menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Akses terhadap air minum juga menjadi satu hal yang sangat penting dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama terkait angka harapan hidup. Tabel 2.34 menunjukkan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017.

Tabel 2.33  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Persentase penanganan sampah	41,18	43,04	43,54	50,74	37,80	45,97
2.	Persentase penduduk berakses air minum	73,29	76,63	79,96	83,30	86,38	87,16

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Kesehatan, 2017

Keterangan: \*) Angka Sementara

#### 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui program administrasi kependudukan sedangkan pencatatan sipil menitikberatkan pada kegiatan Implementasi SIAK (*updating* dan pemeliharaan) pengembangan data base kependudukan, monitoring dan pelaporan kependudukan, penyusunan profil kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.

Tabel 2.34  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga terhadap jumlah kepala keluarga	Na	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk terhadap jumlah penduduk	Na	83%	91%	90%	90%	92,52%
3.	Cakupan Akte Kelahiran	Na	85%	87%	90%	90%	93,50%
4.	Cakupan Akte Kematian	Na	2%	5%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Keterangan: \*) Angka Sementara

Sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kebumen mencukupi kebutuhan sarana prasarana SIAK dan menyerahkan sebagian kewenangan pelayanan

kependudukan dan catatan sipil ke 26 Kecamatan dengan Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN). Untuk Cetak administrasi Kependudukan tidak dipusatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen saja namun didekatkan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kebumen, Kecamatan Prembun, dan Kecamatan Gombang.

Target Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2013 adalah sebesar 85% dengan realisasi capaian sebesar 100%. Tahun 2014 target untuk Capaian penerbitan Kartu Keluarga naik sebanyak 5% menjadi 90% dengan realisasi capaian sebesar 100%. Realisasi cakupan ini bisa dipertahankan sampai dengan Tahun 2015 dan 2017 sebesar 100 %.

Target Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2013 adalah 89% dengan realisasi capaian 83% Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2013 tidak mencapai target khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, yakni dengan adanya perekaman KTP elektronik yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2011, dimana semua wajib KTP diundang ke kecamatan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Sehingga perlu usaha keras melalui sosialisasi dan peningkatan sarana prasarana kependudukan. Pada Tahun 2014 target tersebut dapat tercapai hingga 91% dan pada Tahun 2017. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebesar 92,52%.

Target Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2013 adalah 84% dengan realisasi capaian sebesar 85%. Tahun 2014 meningkat 2% dari target cakupan penerbitan Akte Kelahiran sebesar 86% dengan realisasi capaian sebesar 87%. Adapun target Tahun 2015 adalah 90% dengan realisasi capaian 90%. Pada Tahun 2017 realisasi cakupan penerbitan Akta Kelahiran mencapai 93,50%.

Adapun cakupan penerbitan Akta Kematian Tahun 2013 di targetkan sebesar 64% dengan realisasi capaian hanya sebesar 2%. Selanjutnya untuk cakupan penerbitan akta kematian Target pada tahun 2014 adalah 66% dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu pada realisasi capaian sebesar 5%. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian atau bahkan memang informasi yang kurang diterima oleh masyarakat. Untuk itu tugas Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan terus mendorong aparat kecamatan dan desa bahkan kelembagaan RT dan RW

untuk mengurus akta kematian warganya. Target capaian untuk cakupan penerbitan Akta Kematian Tahun 2015 adalah 70% dan pada tahun 2017 target capaian sebesar 100%.

Usaha untuk meningkatkan capaian cakupan dilakukan dengan mendekatkan dan mempercepat penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Usaha yang dilakukan antara lain melalui jemput bola ke desa-desa dan sekolah-sekolah bahkan pada acara *Car Free Day* di Alun-alun Kebumen dibuka layanan kependudukan dan catatan sipil. Usaha tersebut tentunya membutuhkan petugas dan sarana prasarana yang memadai baik untuk mobilitas maupun administrasi pelayanan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diupayakan melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain lomba desa, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), stimulan Bantuan Semen, stimulan Lantainisasi, stimulan Dana Gotong Royong Masyarakat, dan Program Desa Berdikari.

Berbagai bantuan stimulan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejauh ini telah mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menumbuhkan swadaya masyarakat yang cukup besar.

Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa juga dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan. Melalui penguatan kelembagaan ini diharapkan akan terwujud sinergi antar lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya kualitas pengurus lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan. Upaya pembinaan terhadap lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya.

Tabel 2.35  
Perkembangan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan  
dan Lembaga Swadaya Masyarakat  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Orkesmas Berdasarkan Profesi	144	144	110	80	81	81
2.	Orkesmas Berdasarkan Agama	50	50	50	50	50	50

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	49	49	49	44	44	44

Sumber : SIPD Tahun 2017

Salah satu permasalahan atau isu strategis dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah isu mengenai penanggulangan kemiskinan, yang sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat terutama di perdesaan. Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, dilaksanakan menggunakan dasar pijakan kebijakan nasional yaitu pemenuhan kebutuhan dasar individu ataupun masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, baik secara individu (jiwa penduduk miskin), maupun kelompok (rumah tangga sasaran).

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kebumen, telah dilakukan beberapa langkah dan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang makin luas, efektif dan efisien sesuai dengan otonomi desa dalam rangka memperkuat dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya memperkuat pelaksanaan otonomi desa meliputi pembuatan regulasi, arahan dan pedoman, pemberian fasilitasi, pemberian bimbingan serta monitoring dan evaluasi.

Fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain yaitu:

- a) Peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa peningkatan kesejahteraan perangkat desa melalui pemberian penghasilan tetap (Siltap), bantuan keuangan kepada desa yang meliputi pemberian Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten;
- b) Fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dihadapi oleh desa;
- c) Pemberian fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa serta pemberian fasilitasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- d) Pemberian Sewa Tanah Kas Desa dan eks tanah bengkok kelurahan yang dipakai oleh pemerintah daerah dan sebagainya.

Peningkatan pendapatan desa diperlukan adanya optimalisasi sumber pendapatan desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, aset desa seperti sewa tanah kas desa, gedung pertemuan desa, pasar desa dan lain-lain. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah antara lain pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan optimalisasi pendayagunaan asset desa.

Sementara itu, beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah antara lain fasilitasi rekrutmen aparatur pemerintah desa, baik dalam pemilihan maupun pengisian aparatur pemerintah desa. Sedangkan dalam pendampingan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penyusunan produk hukum desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan administrasi desa, yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan SDM aparatur pemerintah desa. Fasilitasi penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan adanya peran aktif pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pemerintahan desa.

#### 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk menjadi suatu hal yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan memberikan dampak positif yang optimal jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan. Dari sisi sosial kesehatan, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berpotensi menimbulkan permasalahan seperti pemukiman, lapangan kerja, keamanan, gizi buruk hingga pendidikan.

Tabel 2.36  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,6	3,6	2,7	2,7	2,7	2,7
2.	Jumlah akseptor KB	166.719	168.824	155.892	155.134	155.134	154.502
	a. Laki-Laki	4.070	4.267	4.100	5.115	5.115	5.455
	b. Perempuan	162.649	164.557	151.792	150.019	150.019	149.047
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	213.523	212.291	209.517	214.553	208.841	206.543
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	166.719	168.824	155.892	155.134	155.134	154.502

Sumber: Dinsos PPKB, 2017

Capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat salah satunya melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Penyelenggaraan Program KB selain ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan terutama dalam pelayanan KB adalah dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi, kemudahan dalam pelayanan informasi, advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi. Keberhasilan program KB sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB. Dengan kata lain, peran aktif masyarakat sangat menentukan kesuksesan program KB di lapangan.

9) Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Kebumen terutama transportasi darat dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Sebagai salah satu bidang pelayanan dasar, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.37  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	JENIS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pengajuan perpanjangan ijin trayek	127	117	94	98	86	137
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum (buah)	5734	6149	6336	6521	6726	6912
3.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	38.000 -48.500	38.000 -48.500	38.000 -48.500	38.000 -48.500	38.000 -48.500	38.000 -48.500
4.	Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi	179 AKAP 13 AJAP	179 AKAP 13 AJAP	179 AKAP 19 AJAP	179 AKAP 19 AJAP	179 AKAP 19 AJAP	179 AKAP 19 AJAP
5.	Terminal						
	a. Tipe A	1	1	1	1	1	1
	b. Tipe B	1	1	1	1	1	0
	c. Tipe C	3	3	3	3	3	4
	d. Pendukung	2	2	2	2	2	0
6.	Trayek	59	59	59	59	59	59

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat dan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas dan angkutan serta untuk memberikan kontribusi PAD melalui pemungutan retribusi.

Pemasangan rambu-rambu untuk sistem keamanan jalan sudah berjalan dengan baik. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta rambu pengaman dilakukan di berbagai jalur jalan utama. Pemasangan rambu-rambu perlu dilakukan untuk memberikan informasi dini kepada pengguna jalan pada titik-titik rawan kecelakaan.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas bertujuan mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan penyediaan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman, APILL dan *warning lamp*. Upaya meningkatkan jumlah fasilitas kelengkapan jalan dilakukan juga dalam rangka untuk mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas guna menjamin kelancaran arus lalu lintas orang dan barang secara efektif dan efisien. Namun demikian karena kondisi wilayah Kebumen yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan bahkan pegunungan dan memiliki banyak persimpangan jalan, maka kebutuhan akan kelengkapan jalan terutama rambu jalan dan pagar pengaman (*guardrail*) masih banyak lokasi/tempat yang belum terpenuhi.

10) Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini sangat penting dan strategis dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PERIM.KOMINFO/12/2010.

Tabel 2.38

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Jumlah jaringan komunikasi	9	10	10	10	10	5
2.	Jumlah zona layanan komunikasi	55	55	55	97	97	72
3.	Jumlah surat kabar nasional dan local	8	8	8	8	8	7

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
4.	Jumlah penyiaran radio/TV local	9	9	9	9	9	9
5.	Website milik Pemda	1	1	1	1	1	1
6.	Pameran/expo	1	1	1	1	1	1

Sumber: Diskominfo, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara \*) Angka Sangat Sementara

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan pengembangan jaringan informasi dan pengendalian terhadap prasarana komunikasi. Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat bakal calon lokasi menara telekomunikasi oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di lapangan, pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja daerah pada urusan koperasi usaha kecil dan menengah menunjukkan progres yang relatif positif. Dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi tolak ukur capaian di antaranya:

- a) Indikator persentase jumlah koperasi aktif terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat dari posisi 77% di tahun 2013, persentase koperasi aktif meningkat menjadi 82% pada tahun 2017. Angka capaian tahun 2017 ini sesuai dengan target dalam RPJMD tahun 2016-2021.
- b) Indikator peningkatan jumlah UMKM. Pada periode 2012-2017 jumlah UMKM terus meningkat dari 40.790 UMKM pada tahun 2013 menjadi sebanyak 43.957 UMKM pada tahun 2017. Capaian ini mampu memenuhi target dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Tabel 2.39

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Persentase Koperasi Aktif	68,64	77	78	80	82	82
2	Jumlah UMKM	42.784	40.790	43.452	43.132	43.532	43.957

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara

12) Penanaman Modal

Kinerja di urusan penanaman modal secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan nilai investasi dari Rp.406,90 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp.332,22 Milyar pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena ada beberapa investor besar yang belum mampu merealisasikan investasinya di tahun 2017. Selain itu belum adanya Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen  
Tahun 2012-2017

NO.	TINGKAT INVESTASI PMDN	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Nilai investasi PMA/PMDN (Juta Rp)	145,11	180,01	216,71	324,44	406,90	332,22
2.	Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	Na	20,39	20,39	49,71	25,42	-0,18
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	76,61%	76,3%	78,31%	81,00%	73,34%	82,20%

Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP, 2018

Keterangan : \*) data sementara

Capaian kinerja urusan penanaman modal dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dilihat dari IKU OPD terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu nilai investasi PMA/PMDN dan nilai survey kepuasan masyarakat (indeks kepuasan masyarakat) terhadap pelayanan perijinan terpadu.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang paling berharga yang nantinya akan memimpin negara. Pemuda yang akan tumbuh menjadi generasi emas merupakan pemuda yang memiliki jasmani dan rohani yang kuat. Hal tersebut tidak bisa lepas dari olahraga karena selain baik bagi kesehatan, juga bisa menumbuhkan jiwa yang sportif. Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan kepemudaan sangat dibutuhkan. Organisasi pemuda di Kabupaten Kebumen antara lain KNPI, Organisasi Mahasiswa, Pramuka, organisasi kesenian dan organisasi olahraga.

Di Kabupaten Kebumen juga terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olahraga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olahraga ini berpartisipasi aktif dalam event-event yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan

dan tingkat kabupaten, bahkan juga mampu mewakili kabupaten pada tingkat provinsi.

Tabel 2.41  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Kepemudaan						
1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan	26	26	26	26	26	26
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	6	6	6	6	8
	Olahraga						
1.	Jumlah Klub Olahraga	68	72	86	86	160	160
2.	Lapangan Olah Raga	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	
	Sepakbola	140	115	115	115	314	314
	Bola Voli	289	166	166	166	169	169
	Bola Basket	60	35	35	35	6	6
	Bulu Tangkis	471	428	428	428	220	232
	Tenis	70	24	24	24	12	16
	Meja Tennis Meja		262	262	262	188	240
3.	Gedung Olah Raga	26	31	31	31	31	35
	Futsal	10	15	15	15	15	16
	Gedung Serba Guna	5	6	6	6	6	6
	Kolam Renang	11	9	9	9	9	9
	Sasana Tinju	0	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Organisasi Olahraga	29	32	32	35	36	42
5.	Kegiatan Olahraga	1	1	2	2		8

Sumber: Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata, 2018

14) Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor/urusan sehingga memudahkan dalam analisis perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Capaian kinerja urusan statistic selama periode 2012-2016 antara lain tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan dan Buku Studi Nilai Tukar Petani. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik, melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah, seperti SIM Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIM Pelaporan, SIMBADA, dan lain-lain.

### 15) Kebudayaan

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur-unsur yang rumit, termasuk di dalamnya sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Unsur-unsur tersebut menandakan bahwa kebudayaan tidak bisa lepas dengan masyarakat dan segala aktivitas yang dilakukan.

Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang ada hingga tahun 2017 sebanyak 53 buah.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya yang merupakan kesenian dan kebudayaan asli Kebumen, adalah dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya serta pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selain memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda, juga untuk melestarikan seni dan budaya asli Kebumen.

Tabel 2.42  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	4	11	11	11
2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	45	45	46	46	47	53
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	1	1	5
4.	Jumlah grup kesenian	204	204	311	311	340	348
	Kuda Lumping	131	131	78	125	125	135
	Ketoprak	34	35	38	38	38	38
	Wayang Kulit	42	43	129	129	129	131
	Campursari	n/a	n/a	4	8	8	12
	Angguk	n/a	n/a	1	2	2	3
	Rebana	n/a	n/a	27	40	40	55
	Karawitan	n/a	n/a	4	4	4	6
	Jamjaneng	n/a	n/a	16	21	21	30
	Calung	n/a	n/a	4	6	6	7
	Lengger	n/a	n/a	5	5	5	7
	Seni Peran	n/a	n/a	1	4	4	5
	Sanggar Seni	n/a	n/a	6	8	8	15
	Cepetan	n/a	n/a	1	4	4	7
	Angklung	n/a	n/a	1	3	3	5
	Teater	n/a	n/a	1	3	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan, 2018

Seperti pada tabel di atas, capaian kinerja urusan kebudayaan juga dapat dilihat dari jumlah grup kesenian daerah yang semakin meningkat dari 204 grup pada tahun 2012 menjadi 348 grup kesenian pada tahun 2017.

16) Perpustakaan

Perpustakaan dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Keberadaan perpustakaan berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat, baik formal maupun informal. Setiap golongan masyarakat dapat mengakses informasi melalui perpustakaan yang akan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Peningkatan pengetahuan secara tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk lebih peka dan berperan aktif dalam setiap kegiatan maupun pembangunan di lingkungannya.

Jumlah perpustakaan di wilayah Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 466 pada tahun 2012 dan pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 800. Hal ini diikuti dengan meningkatnya minat baca masyarakat dan pengunjung di perpustakaan. Capaian urusan perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.43  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perpustakaan	466	480	788	788	798	735
2.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	37.433	40.148	14.870	77.751	114.714	137.771
3.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	965.081	972.302	972.302	975.198	971.087	973.183
4.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	14.828	15.775	14.671	18.797	19.958	21.923
5.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan	34.312	36.082	24.669	30.112	31.843	34.074

Sumber: Kantor Perpusarsipda, 2018

17) Kearsipan

Arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen bagi lembaga pemerintahan. Untuk mewujudkan penerapan tata pemerintahan yang baik, pengelolaan arsip yang baik dan benar merupakan salah satu upaya untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip merupakan sumber informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik kinerja pemerintah daerah.

Selama periode 2012-2017, telah dilakukan pelatihan aplikasi pengelolaan arsip secara otomatis kepada OPD dan juga telah dilakukan sosialisasi penyuluhan kearsipan kepada sekretaris desa dengan materi kearsipan dimulai dari pemilihan sampai dengan penyusutan serta materi perundangan tentang kearsipan. Hal ini telah ditindak lanjuti dengan kunjungan ke setiap desa, selain untuk implementasi ilmu yang diterima, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen juga telah melakukan pendampingan pembenahan kearsipan di setiap desa yang mendapatkan bantuan. Hal ini bertujuan agar arsip di desa tertata dengan baik, sehingga memudahkan perangkat desa untuk mencarinya dan membantu dalam pengambilan kebijakan nantinya.

c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kinerja sektor kelautan dan perikanan relatif fluktuatif dimana produksi perikanan mengalami tren meningkat, namun pada tahun 2016 terjadi kecenderungan penurunan produksi perikanan. Hal ini utamanya disebabkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kebumen yang menurun, disebabkan perubahan iklim dimana kondisi cuaca di perairan tidak menentu dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Perkembangan konsumsi ikan menunjukkan kondisi yang menggembirakan, nampaknya telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.44  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Produksi peri-kanan (ton)	3.861,52	9.432,84	9.626,79	8.518,68	6.790,18
2.	BeroperasinyaPPI yang bisa menampung kapal berbobot 30 GT ke atas	-	-	-	-	-
2.	Konsumsi ikan (kg/ka/th)	10,05	12,28	13,65	15,10	19,63
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	100	110	120	130	140

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara

Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 terjadi penurunan peningkatan produksi ikan sebesar 1.728,5 ton. Hal ini dipengaruhi oleh produksi ikan tangkap yang sangat tergantung pada musim. Angka capaian ini juga belum memenuhi target produksi ikan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Selain itu, indikator beroperasinya PPI yang bisa menampung kapal berbobot 30

GT ke atas, sampai dengan tahun 2017 masih dalam proses, dimana untuk lokasi PPI Logending yang direncanakan bisa menampung kapal dengan bobot 30 GT akan lebih siap pada tahun 2018.

## 2) Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari indikator jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Secara umum jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, dari 807.500 wisatawan pada 2012 menjadi 1.486.939 wisatawan pada tahun 2016 (meningkat 84%). Selain itu banyak juga pengunjung yang berkunjung ke obyek wisata yang dikelola oleh desa dan komunitas. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan jumlah obyek wisata berbasis komunitas di beberapa wilayah, upaya promosi dan investasi pariwisata yang semakin masif dari berbagai elemen masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang di objek-objek wisata unggulan dan pada Tahun 2017 terjadi peningkatan pengunjung wisata hingga mencapai 1.770.136 orang atau 19% lebih tinggi dari Tahun 2016.

Tabel 2.45  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Jumlahkunjungan wisatawan	807.685	805.619	957.007	1.117.136	1.486.939	1.770.136
2.	Lama tinggal wisatawan	-	-	-	0,10	0,41	0,26

Sumber: Dinas Kepemudaan OR dan Pariwisata, 2018

## 3) Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian tahun 2012-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.46  
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produkti vitas padi (ton/ha)	6,17	5,30	5,59	6,53	6,03	5,56
2.	Produkti vitas jagung (ton/ha)	7,53	7,18	5,55	7,23	5,71	6,10
3.	Produkti vitas kedelai (ton/ha)	1,38	1,41	1,24	1,18	1,04	1,08
4.	Produksi Kelapa (Ton)	183.334,88	185.676,91	189.899,103	187.899,49	180.899,44	183.425,67

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.	Produksi tembakau (ton)	312,16	300,08	273,48	311,87	214,95	4.166,40
6.	Produksi daging (kg)	7.844.971	8.704.375	11.086.737	11.101.920	11.102.031	11.102.147
7.	Produksi telur (kg)	4.262.683	2.527.000	3.834.123	3.836.272	3.838.035	3.383.070
8.	Produksi kayu bulat	27.592,54	37.233,99	35.567,87	17.149,26	26.042,32	16.713,718

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

Keterangan : \*) data sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi padi menurun, sedangkan produksi jagung dan kedelai mengalami kenaikan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena ketiga komoditas ini merupakan produk substitusi. Selain itu, penurunan produktivitas padi juga disebabkan oleh serangan hama wereng dan cuaca ekstrim akibat iklim yang tidak menentu, yang ditandai dengan tingginya curah hujan. Penurunan produktivitas ketiga komoditas tersebut juga terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan pada umumnya disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan oleh kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam. Baik hasil panen maupun luasan panen menunjukkan pertumbuhan yang negatif setiap tahunnya. Meskipun begitu, penurunan hasil panen terjadi lebih cepat dibandingkan penurunan luasan panen sehingga hal tersebut menyebabkan produktivitas padi mengalami pertumbuhan negatif. Dengan kondisi tersebut, target RPJMD untuk indikator produktivitas padi, jagung, kedelai pada tahun 2017 tidak tercapai. Namun demikian, indikator produksi tembakau selama periode 2017 melampaui target yang diharapkan dalam RPJMD.

4) Energi dan Sumberdaya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada akhir tahun 2016, sektor ini berkontribusi sebesar 5,07%. Namun demikian, tetap harus diingat, bahwa nilai ekonomis dari sektor pertambangan ini, seringkali berbanding terbalik dengan dampak lingkungan yang diakibatkan. Kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan pasir Sungai Luk Ulo pada setiap kegiatan pembangunan di sektor pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban eksploitasi terhadap penambangan galian C di Sungai Luk Ulo.

Tabel 2.47  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	4,69	4,69	5,02	5,18	5,18	4,66

Sumber: BPS, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara

#### 5) Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.48  
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen  
Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	22,86	28,57	34,29	40,00	51,43	60
2.	Jumlah usaha perdagangan berizin	706	851	756	1.106	926	1.059

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara

#### 6) Perindustrian

Jumlah industri kecil menengah dari tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan dari 51.552 unit menjadi 56.398 unit atau meningkat 9,4%. Apabila dibandingkan dengan target dalam RPJMD Tahun 2016-2021, realisasi jumlah IKM pada tahun 2017 sudah memenuhi atau melebihi target. Hal ini mengindikasikan perhatian pemerintah terhadap pengembangan IKM di Kabupaten Kebumen berada pada trek atau jalur yang tepat. Salah satu program unggulan yang telah dan akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) pada tahun 2017 berhasil merealisasikan 2.000 sertifikat untuk IKM, telah berhasil mendukung perkembangan IKM selama tahun 2017 dan diharapkan terus berkembang sampai dengan tahun 2021.

Kinerja urusan perindustrian selama tahun 2012-2016 dapat dilihat dari beberapa indikator yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.49  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

NO.	URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Jumlah industri kecil menengah	51.552	52.780	54.867	54.899	56.378	56.398

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara

Indikator lain pada urusan Perindustrian yang menjadi tolak ukur keberhasilan RPJMD adalah terbangunnya 1 (satu) kawasan industri. Kawasan industri yang direncanakan akan dibangun di atas luasan lebih kurang 125 Hektar di daerah selatan Kecamatan Petanahan dan Klirong ini merupakan cita-cita besar Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dalam rangka mewujudkan Kebumen yang sejahtera berbasis agrobisnis, sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja di kawasan industri tersebut. Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 direncanakan pada tahun 2018 kawasan industri ini akan terbangun. Sampai dengan tahun 2016, untuk mewujudkan kawasan industri tersebut telah disusun kajian atau studi mengenai pembangunan kawasan industri. Sedangkan pada tahun 2017 sudah disusun RIPIDA dan kajian mengenai pembentukan BUMD Kawasan Industri.

7) Transmigrasi

Kinerja daerah pada urusan transmigrasi mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012 daerah sudah berhasil mengirim transmigrasi umum sebanyak 80 kk, maka tahun-tahun selanjutnya kondisinya justru semakin menurun. Pada tahun 2014 daerah hanya mampu mengirim transmigran sebanyak 11 KK dan di tahun selanjutnya kembali meningkat. Pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 17 KK. Hal ini barangkali disebabkan semakin berkurangnya jumlah peminat transmigrasi yang memenuhi syarat serta program transmigrasi daerah yang kuotanya relatif menurun.

Tabel 2.50  
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

URAIAN KINERJA	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017**
Transmigrasi Umum	80 kk	45 kk	11 kk	30 kk	49 kk	17 kk

Sumber: Dinas Nakertransos, 2018

Keterangan: \*) Angka Sementara

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Ditetapkannya Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada regulasi yang baru.

2) Keuangan

Dari sisi keuangan daerah, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama periode 2012-2017 terus meningkat, yang menunjukkan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2017 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Kebumen terus meningkat dan target yang ada pada RPJMD pada Tahun 2017 dapat tercapai. Namun demikian, pada tahun 2014 dan 2016 kinerja keuangan daerah sempat kembali mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini menjadi perhatian seluruh elemen Pemerintah Daerah untuk kembali meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dari hasil pemeriksaan yang menyebabkan predikat wajar dengan pengecualian adalah adanya indikasi kelemahan sistem pengendalian intern terkait integritas dari penyelenggara pemerintahan daerah yang antara lain ditandai dengan permintaan pokok-pokok pikiran DPRD menyimpang dari ketentuan karena disampaikan setelah RKPD ditetapkan Bupati, terdapat indikasi pengaturan pengadaan langsung sehingga Pemerintah Daerah berpotensi tidak mendapatkan harga yang kompetitif, penyediaan barang/jasa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anggota DPRD pengusul pokok-pokok pikiran, pemahalan harga atas beberapa paket pekerjaan, dan pemberian imbalan dari penyedia barang/jasa kepada anggota DPRD pengusul pokok-pokok pikiran (*BPK RI, Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016*).

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai sumber daya manusia dalam pemerintahan menjadi pilar pelaksanaan

pembangunan. Oleh karena itu diperlukan PNS yang berkualitas agar pembangunan dapat berjalan baik.

Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2017 cenderung menurun. Pada tahun 2016 jumlah PNS sebanyak 13.319 dan menurun sebesar 9.32% pada Tahun 2017 menjadi 12.079. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio jumlah PNS di Kabupaten Kebumen tahun 2017 sebesar 1: 98.40 atau 1 PNS melayani sejumlah 98 penduduk. Perkembangan jumlah PNS Kabupaten Kebumen tahun 2011-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.51  
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2012	8.010	6.996	15.006
2013	7.653	6.840	14.493
2014	7.438	6.800	14.238
2015	7.206	6.628	13.834
2016	6.867	6.452	13.319
2017	5.990	6.089	12.079

Sumber: BKPPD, 2018

Dari Tabel di atas terlihat penurunan jumlah PNS sekitar 500-1.000 orang per tahun yang menyebabkan beban kerja PNS semakin besar, ditambah tidak adanya rekrutmen CPNS baru sampai dengan Tahun 2017 sehingga diperlukan peningkatan profesionalisme ASN dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Selain itu dengan ditetapkannya UU No 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur mengenai pembagian kewenangan, ada beberapa kewenangan yang terhitung sejak tahun 2017 menjadi kewenangan provinsi termasuk diantaranya terkait dengan sumber daya manusia sebanyak 1.008 pegawai negeri (ASN) mutasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

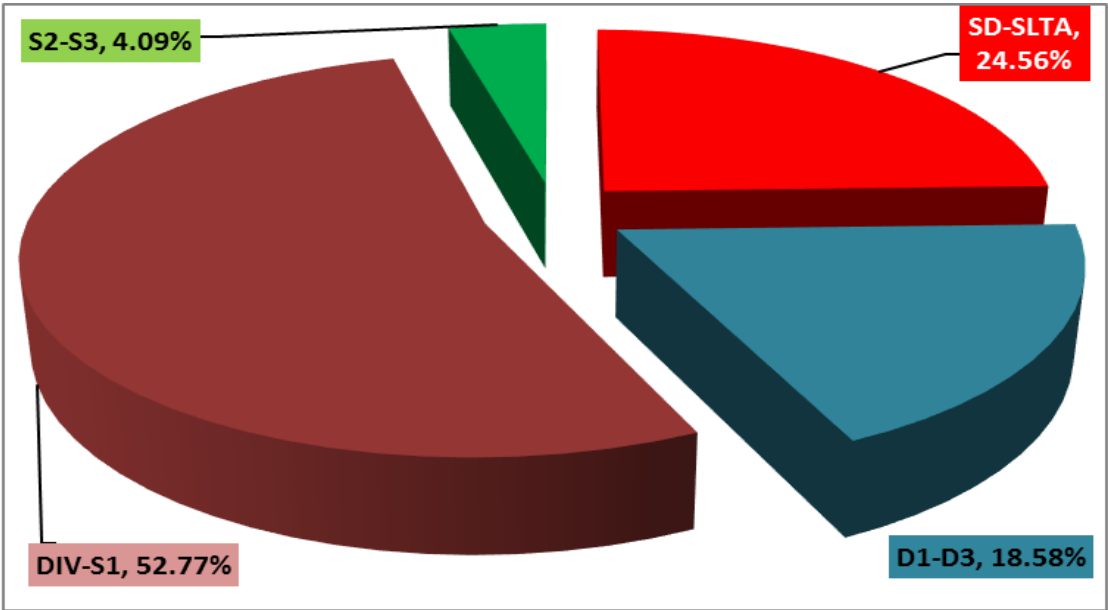
Kualitas PNS Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan PNS Kabupaten Kebumen tahun 2017 yang berpendidikan DIV/S1 dan S2 mencapai lebih dari setengah jumlah PNS di Kabupaten Kebumen. Untuk PNS yang berpendidikan D IV/S1 sebesar 52.77% dan PNS yang berpendidikan S2-S3 sebesar 4.09%.

Tabel 2.52  
Perkembangan Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

TAHUN	SD-SLTA	D1-D3	DIV-S1	S2-S3	JUMLAH
2012	5.776	3.512	5.472	246	15.006
2013	5.278	3.429	5.529	257	14.493
2014	3.886	3.129	6.961	262	14.238

TAHUN	SD-SLTA	D1-D3	DIV-S1	S2-S3	JUMLAH
2015	3.557	2.390	7.348	539	13.834
2016	3.340	2.179	7.228	572	13.319
2017	2.967	2.244	6.374	494	12.079

Sumber: BKPPD, 2018



Gambar 2.32  
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Sumber: BKPPD, 2018

Sementara itu, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari peningkatan kapasitas SDM PNS. Upaya peningkatan kapasitas SDM PNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2012-2017, sebanyak 1.565 PNS mendapatkan peningkatan kapasitas melalui diklat teknis fungsional.

Tabel 2.53  
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Mengikuti Diklat Teknis Fungsional  
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2012	168	57	225
2013	143	137	280
2014	131	129	260
2015	167	70	237
2016	96	115	211
2017	191	161	352

Sumber: BKPPD, 2018

4) Penelitian dan Pengembangan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan tahun 2017, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang ditujukan dalam upaya peningkatan peran aparatur dan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan, seperti Riset Unggulan Daerah dan Krenova. Pada tahun 2017, terdapat enam judul riset yang dilakukan dalam kegiatan Riset Unggulan Daerah. Sedangkan untuk kegiatan Krenova, pada tahun 2017 terdapat satu inventor dari Kabupaten Kebumen yang berhasil masuk dalam sepuluh besar pemenang lomba Krenova di Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017, Dewan Riset Daerah yang dibentuk pada tahun 2016, juga telah melakukan dua riset yang diharapkan mampu menghasilkan terobosan baru dalam mendukung percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kebumen mempunyai perangkat daerah antara lain satuan kerja perangkat daerah (Badan, Dinas, Kantor), kecamatan dan kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada Tahun 2016, jumlah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kebumen sejumlah 31 unit. Kemudian secara administratif Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan yang terbagi ke dalam 449 desa dan 11 kelurahan, 1.934 rukun warga, 1.680 dusun, dan 7.078 rukun tetangga, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Kebumen.

Pada Tahun 2017, jumlah perangkat daerah di Kabupaten Kebumen sejumlah 26 unit. Kemudian secara administratif Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan yang terbagi ke dalam 449 desa dan 11 kelurahan, 1.934 rukun warga, 1.680 dusun, dan 7.078 rukun tetangga, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Kebumen

4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi NTP, maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani.

Secara umum penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) menghasilkan 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- 1) NTP >100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat

kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

- 2)  $NTP=100$ , berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- 3)  $NTP<100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel 2.54  
Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kebumen,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017

NO.	WILAYAH	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
1.	Kabupaten Kebumen	105,59	102,00	Na	100,86	100,86	100,31
2.	Jawa Tengah	106,37	101,42	100,65	102,03	102,03	100,395
3.	Indonesia	104,87	101,96	101,32	102,33	102,33	101,2717

Sumber: Buku Nilai Tajar Petani, BPS, 2018 (data diolah)

Keterangan : \*) Angka perkiraan

Pada tahun 2012-2016, terjadi tren penurunan NTP dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Penurunan ini mengindikasikan semakin lemahnya daya tawar petani terhadap pasar. Kemudian dari target pencapaian NTP dalam RPJMD Tahun 2016-2021, dimana tahun 2016 ditargetkan sebesar 102,20, melihat kondisi pada tahun 2015, maka diperkirakan sulit tercapai. Kondisi ini patut menjadi prioritas dan perhatian pemerintah daerah, mengingat kontribusi sektor pertanian cukup dominan dalam perekonomian Kabupaten Kebumen.

Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan NTP merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di Kabupaten Kebumen, karena hal ini terkait dengan peningkatan motivasi petani dalam berusaha di sektor pertanian. Dengan meningkatnya NTP, maka pembangunan pertanian akan berdampak dalam peningkatan partisipasi petani dan produksi pertanian dalam perekonomian pedesaan, penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan dan menumbuhkan permintaan produk non pertanian. Selain itu, peningkatan NTP juga diharapkan akan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah (desa-kota), maupun antar wilayah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya di daerah.

Untuk tahun 2017 nilai NTP sebesar 100,31, menurun 0,55 dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara kenaikan pendapatan petani dengan harga-harga barang dan jasa produksi pertanian lainnya juga relatif menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh terjadinya serangan hama, dan anomali musim, yang kurang mendukung peningkatan pendapatan pertanian.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani maka perlu dilaksanakan peningkatan kapabilitas atau kemampuan petani melalui :

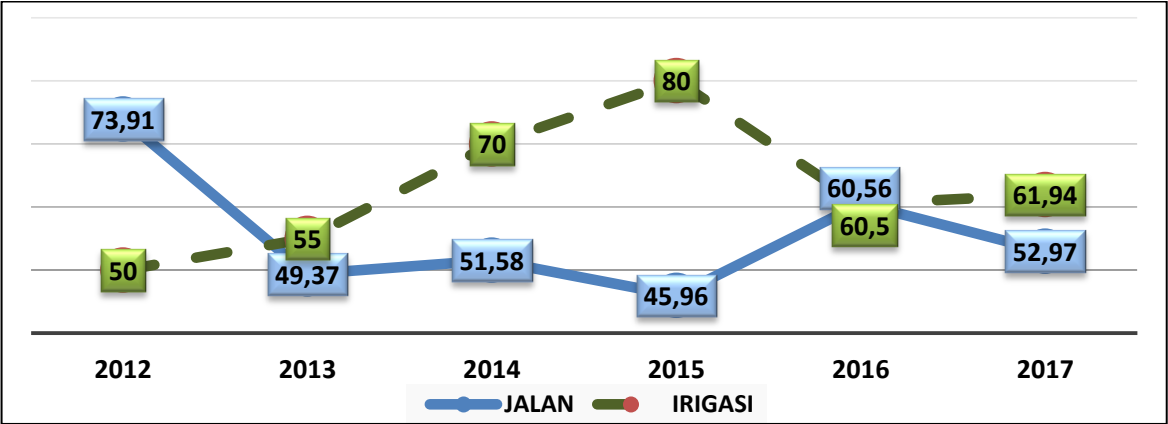
- a) Peningkatan sumber daya manusia.
  - b) Penguatan Sistem Usaha Perbenihan dan Pembibitan.
  - c) Peningkatan ketersediaan pupuk dan alternatifnya.
  - d) Penguatan Kelembagaan Petani, Pertanian dan Pedesaan.
  - e) Peningkatan sarana dan prasarana.
  - f) Peningkatan akses pasar.
  - g) Peningkatan mutu atau kualitas hasil produksi pertanian.
  - h) Pengoptimalan resi gudang maupun sistem tunda jual.
  - i) Menekan biaya produksi pertanian.
- b. Infrastruktur Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan daerah agraris di mana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB. Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan sarana irigasi yang baik untuk menunjang sektor pertanian tersebut. Sampai dengan Tahun 2017, jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen dengan kondisi baik mencapai 61,94% dari total daerah irigasi kewenangan Kabupaten sejumlah 12.458 Ha. Kondisi irigasi dalam keadaan baik menurun dari tahun 2015 dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2016.

Pada sisi yang lain, infrastruktur jalan merupakan faktor utama pendukung kelancaran lalu lintas di darat. Pembangunan transportasi jalan merupakan bagian penting dalam kegiatan pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan strategis dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jaringan jalan merupakan bagian dari sarana terpenting dalam sistem transportasi. Jangkauan pelayanan jalan di Kabupaten Kebumen saat ini terbatas pada wilayah-wilayah yang secara alami berkembang dengan pesat.

Kondisi jalan setiap tahun harus terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk mengimbangi berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017 terdiri dari jalan nasional sepanjang 62,890 Km, jalan provinsi sepanjang 29,670 Km, jalan kabupaten sepanjang 960,360 Km dan panjang jalan desa 1.236,94 Km. Dari 960,360 Km jalan kewenangan kabupaten, saat ini 508,72 Km (52,97%) dalam kondisi baik, sedangkan sisanya sejumlah

177,45 Km (18,48%) dalam kondisi sedang, rusak ringan 121,13 Km (12,61%) dan rusak berat 153,05 Km (15,94%).



Gambar 2.33  
Perkembangan Jaringan Jalan dan Irigasi Kewenangan Kabupaten  
Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017  
Sumber: DPUPR, 2018

- B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2017
1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017
- Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2017 secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.55  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah  
sampai dengan Tahun 2017

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Tk. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2017				Tk. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2017 Dibandingkan dengan Renstra 2021			
		K	P	Rp	P	K	P	Rp	P
	Perangkat Daerah								
1	RSUD dr. Soedirman	92,31	ST	82,01	ST	34,24	SR	31,57	SR
2	RSUD Prembun	91,7	ST	77,96	T	18,3	SR	2,8	SR
3	Dinas PU PR	60	R	78,65	T	9,8	SR	11,75	SR
4	BPBD	70	S	83,65	T	11,07	SR	30,12	SR
5	BAP3DA	97,1	ST	91,42	ST	29,77	SR	27,7	SR
6	Dinas Perhubungan	99,3	ST	86,86	ST	16	SR	18	SR
7	DISKOMINFO	100	ST	90,3	ST	20,01	SR	14,64	SR
8	DISDUKCAPIL	100	ST	89,08	T	33,33	SR	11,05	SR
9	Dinas Sosial PPKB	100	ST	94,23	ST	46,18	SR	29,67	SR
10	Dinas Tenaga Kerja	98,99	ST	89,17	ST	19,05	SR	6,4	SR
11	Dinas Penanaman Modal	100	ST	95,99	ST	32,86	SR	17,99	SR
12	Kantor Kesbangpol	95,08	ST	97,85	ST	10,64	SR	28,9	SR
13	Satpol PP	100	ST	94,08	ST	24,06	SR	52,11	SR
14	Bagian Pemerintahan	111,22	ST	95,14	ST	44,2	SR	33	SR
15	Bagian Hukum	98,6	ST	87,26	T	24,6	SR	34,5	SR
16	Bagian Pembangunan	97,2	ST	96,22	ST	25,1	SR	34,2	SR
17	Bagian Perekonomian	100	ST	99,72	ST	30,41	SR	30,49	SR
18	Bagian Kesra	130	ST	96,65	ST	28,8	SR	19,5	SR
19	Bagian Organisasi	100	ST	97,51	ST	55,98	R	40,69	SR
20	Bagian Umum	100	ST	92,09	ST	39,9	SR	33,14	SR

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Tk. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2017				Tk. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2017 Dibandingkan dengan Renstra 2021			
		K	P	Rp	P	K	P	Rp	P
21	Bagian Humas	94,3	ST	89,53	T	24,5	SR	27,1	SR
22	Sekretariat DPRD	106,58	ST	80,07	T	33,27	SR	21,69	SR
23	BPKAD	110,3	ST	94,31	ST	50,87	SR	27,1	SR
24	Inspektorat	105	ST	90,75	ST	39,7	SR	25,5	SR
25	BKPPD	92,08	ST	78,46	T	39,61	SR	14,93	SR
26	BAPENDA	99,83	ST	98,91	ST	27,08	SR	4,21	SR
27	Dinas Perkim LH	70	S	97,74	ST	18,5	SR	8,6	SR
28	Dispermades P3A	100	ST	95,71	ST	29,43	SR	23,69	SR
29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	111,79	ST	45,47	SR	34,82	SR	29,15	SR
30	Dinas Pertanian dan Pangan	99,34	ST	88,92	T	30,17	SR	11,69	SR
31	Disporawisata	100	ST	86,98	T	26,59	SR	13,29	SR
32	Dinlutkan	106,22	ST	87,14	ST	26	SR	27	SR
33	Disperindag	99,34	ST	87,77	ST	23,17	SR	19,29	SR
34	Dinas Pendidikan	96	ST	88,3	T	29,38	SR	10	SR
	<b>Kecamatan</b>								
1	Kebumen	97,77	ST	100	ST	28,57	SR	22,7	SR
2	Alian	100	ST	98	ST	40,22	SR	28,59	SR
3	Karangsambung	96,22	ST	91,94	ST	36,6	SR	21,87	SR
4	Prembun	100	ST	99,54	ST	27,4	SR	29,6	SR
5	Mirit	97,32	ST	98	ST	21,94	SR	23	SR
6	Kutowinangun	99,3	ST	98,3	ST	26,8	SR	28,5	SR
7	Ambal	100	ST	99	ST	33,17	SR	30	SR
8	Buluspesantren	98,9	ST	97,87	ST	32,1	SR	30,9	SR
9	Pejagoan	98,7	ST	99,97	ST	32,24	SR	19,44	SR
10	Klirong	96,92	ST	96,51	ST	34,49	SR	22,23	SR
11	Petanahan	96,55	ST	99,17	ST	29,83	SR	36,25	SR
12	Sruweng	96,36	ST	100,78	ST	29,83	SR	22,58	SR
13	Karanganyar	92	ST	99	ST	35	SR	28	SR
14	Karanggayam	100	ST	98,22	ST	32,82	SR	37,82	SR
15	Adimulyo	94,74	ST	95	ST	31,89	SR	29	SR
16	Kuwarasan	100	ST	95	ST	33,06	SR	22,76	SR
17	Puring	96,09	ST	95,98	ST	33,66	SR	31,58	SR
18	Gombong	99,5	ST	98,98	ST	32,07	SR	25,8	
19	Sempor	98,8	ST	96,2	ST	32,92	SR	24,46	SR
20	Buayan	100	ST	97,4	ST	33,1	SR	25,8	SR
21	Rowokele	45,5	ST	49,46	SR	20,5	SR	18,7	SR
22	Ayah	94	ST	97	ST	33,55	SR	33,62	SR
23	Sadang	100	ST	98,88	ST	32,63	SR	32,34	SR
24	Poncowarno	100	ST	98,92	ST	34,11	SR	22,92	SR
25	Padureso	100	ST	96,49	ST	33,41	SR	19,45	SR
26	Bonorowo	100	ST	97	ST	32	SR	25	SR

Keterangan:

K : Output

Rp : Anggaran

P : Penilaian

Kategorisasi Penilaian:

< 50% : Sangat Rendah (SR)

51-65 : Rendah (R)

65-75 : Sedang (S)

76-90 : Tinggi (T)

91-100 : Sangat Tinggi (ST)

2. Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2017

Dari hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kebumen 2016–2021 tahun kedua (2017), bahwa dari 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang tercantum pada RPJMD dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat sebanyak 20 (dua puluh) indikator atau 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan persen) dengan status TERCAPAI;
- b. Sebanyak 4 (empat) indikator atau sebesar 15,38% (lima belas koma tiga puluh delapan persen) dengan status TIDAK TERCAPAI, akan tetapi dengan melihat tingkat capaian kinerja pada tahun 2017, melalui sedikit upaya yang lebih keras, maka ketujuh indikator tersebut diharapkan dapat mencapai target pada akhir tahun 2021;
- c. Sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 7,6% (tujuh koma enam persen) dengan status capaian TIDAK TERCAPAI, sehingga masih perlu upaya keras agar pada akhir tahun RPJMD yaitu 2021 target dapat tercapai;
- d. Penjelasan terhadap indikator yang Tidak tercapai dan perlu sedikit upaya untuk mencapai targetnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 5,89 dan capaiannya sebesar 5,87;
  - 2) Angka kemiskinan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 18,5% dan capaiannya masih berada pada angka 19,6%;
  - 3) Nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2017 ditargetkan memperoleh B, dan akan tetapi berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kemenpan dan RB realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 adalah CC;
  - 4) Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 50% dan capaiannya sebesar 39,98%.
- e. Penjelasan terhadap 2 (dua) indikator dengan status capaian TIDAK TERCAPAI, sehingga masih perlu upaya keras agar pada akhir tahun RPJMD yaitu 2021 target dapat tercapai adalah sebagai berikut :
  - 1) Angka pengangguran pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 2,05% dan capaiannya sebesar 3,85%; dan
  - 2) Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 5% dan capaiannya sebesar -18,35%.

Data lengkap terkait hasil evaluasi RPJMD tahun 2016-2021 terhadap IKU Daerah sampai dengan tahun 2017 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56  
Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 Terhadap IKU Daerah  
Sampai Dengan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	% CAPAIAN	KET
--------------------------------	--------	--------------	----------------------	-----------	-----

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET RPJMD	REALISASI TAHUN 2017	% CAPAIAN	KET
1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	12,61	100,56%	○
2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,02	7,05	100,43%	○
3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	56,49	61,49	108,85%	○
4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	46,79	50	106,86%	○
5. Angka Harapan Hidup	Angka	72,85	72,87	100,03%	○
6. Angka Kematian Ibu	Angka	95	61,38	135,39%	○
7. Angka Kematian Bayi	Angka	11	7,21	134,45%	○
8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100	100,00%	○
9. Cakupan Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	27,56	31,44	114,08%	○
10. Kasus pelanggaran hukum	Kasus	750	750	100,00%	○
11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	%	5,89	5,87	99,66%	□
12 Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	Rp	19.715.600	20.370.000	103,32%	○
13. Rasio/Indeks Gini	Point	0,23	0,23	100,00%	○
14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Unit	2	2	100,00%	○
15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	5	-18,35%	-3,67%	△
16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	17,01	19,05	111,99%	○
17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	54,83	55,77	101,71%	○
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	66	68,67	104,05%	○
19. Angka Kemiskinan	%	18,5	19,6	94,05%	□
20. Angka Pengangguran	%	2,05	3,85	12,20%	△
21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	79,03	80,39	101,72%	○
22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	94,5	100	105,82%	○
23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B >2 s.d < 3	B 2,9728	100,00%	○
24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	CC	95,43%	□
25. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP	100,00%	○
26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	50	39,98	79,96%	□

Sumber : Bagian Organisasi SETDA, 2018

Keterangan : ○ = Tercapai  
□ = Akan Tercapai  
△ = Butuh upaya keras

### C. Permasalahan Pembangunan Daerah

#### 1. Isu strategis permasalahan daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 merupakan pelaksanaan visi dan misi Bupati tahun 2016-2021, yang

menjabarkan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2017, maka isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang mendesak dan harus dihadapi Kabupaten Kebumen pada tahun 2019, antara lain:

- a. Meningkatnya ketimpangan dan angka pengangguran;
  - b. Menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan;
  - c. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata;
  - d. Masih tingginya angka kemiskinan;
  - e. Angka Partisipasi Murni menurun;
  - f. Angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi;
  - g. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
  - h. Belum optimalnya perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah dan kawasan; dan
  - i. Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup serta potensi bencana yang tinggi.
2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Mempertimbangan potensi sumber daya, kondisi aktual, prioritas program/kegiatan unggulan Kepala Daerah dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2019.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a) Belum optimalnya kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- b) Kurangnya jumlah tenaga pendidik dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan di beberapa wilayah;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan dasar yang memenuhi standar; dan
- d) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal.

2) Kesehatan

- a) Angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi;
- b) Masih terjadinya kasus penyakit menular seperti TB, DBD, dan HIV;
- c) Masih adanya balita dan ibu hamil dengan status gizi buruk/kurang gizi;
- d) Pelaksanaan kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum optimal menjangkau seluruh masyarakat;

- e) Belum Optimalnya upaya pengembangan/peningkatan kesadaran pelaksanaan PHBS; dan
  - f) Kurang optimalnya peran lintas sektoral dalam upaya penanganan masalah kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun desa;
  - b) Belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan penyediaan prasarana publik;
  - c) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir;
  - d) Kurangnya pemberdayaan petani pemakai air;
  - e) Kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air;
  - f) Terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan;
  - g) Masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perdesaan;
  - h) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan;
  - i) Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
  - j) Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal;
  - k) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
  - l) Belum optimalnya pengelolaan kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan kawasan Karangbolong;
  - m) Terbatasnya carrying capacity di kawasan Pesisir Ayah (Jangkar Sirah);
  - n) Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan;
  - o) Belum optimalnya Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan; dan
  - p) Belum terlaksananya Pembangunan Kawasan Industri.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a) Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni;
  - b) *Backlag* (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan) perumahan masih tinggi;
  - c) Masih adanya kawasan permukiman kumuh; dan
  - d) Belum optimalnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- a) Masih perlunya peningkatan kewaspadaan aparaturnya pemerintah dan masyarakat akan kemungkinan Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam NKRI;
  - b) Menurunnya kesadaran masyarakat tentang persatuan dan kesatuan, solidaritas, hormat menghormati meskipun dalam perbedaan;

- c) Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
  - d) Belum optimalnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;
  - e) Menurunnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat serta partisipasi dalam pembangunan bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM; dan
  - f) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Sosial
- a) Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan rumah tidak layak huni;
  - b) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai;
  - c) Belum optimalnya peran lembaga non pemerintah dalam penanganan masalah sosial;
  - d) Terbatasnya kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya.
  - e) Jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi; dan
  - f) Belum optimalnya program pemberdayaan bagi penduduk miskin
- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
- 1) Tenaga kerja
- a) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan terbatasnya penyediaan lapangan kerja yang menyebabkan pengangguran;
  - b) Rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
  - c) Masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja/karyawan pada Jamsostek; dan
  - d) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi/lembaga ketenagakerjaan.
- 2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
- a) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan;
  - b) Masih adanya nilai norma budaya yang kurang kondusif terhadap pemberdayaan perempuan; dan
  - c) Terbatasnya SDM yang menangani pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- 3) Pangan
- a) Masih kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, seimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan;
  - b) Belum optimalnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan;
  - c) Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional;
  - d) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan; dan

- e) Belum optimalnya peran masyarakat dan kelembagaannya dalam upaya stabilisasi ketahanan pangan.
- 4) Pertanahan
  - a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin pembangunan di atas tanah (IMB);
  - b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan kepemilikan tanahnya; dan
  - c) Rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 5) Lingkungan Hidup
  - a) Belum optimalnya pengelolaan persampahan;
  - b) Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
  - c) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - d) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani;
  - e) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup; dan
  - f) Belum tercapainya indeks kualitas air dan terbatasnya ketersediaan cadangan air.
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a) Belum optimalnya kualitas implementasi SAK;
  - b) Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai; dan
  - c) Belum optimalnya pengelolaan dokumen dan sinergitas/sinkronisasi program kependudukan dan catatan sipil antar pemangku kepentingan.
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a) Belum optimalnya tertib administrasi keuangan dan kekayaan Pemerintah Desa;
  - b) Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kurang berkembangnya sebagian Lembaga Ekonomi Pedesaan (BUMDes);
  - c) Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa;
  - d) Semakin menurunnya semangat gotong royong masyarakat; dan
  - e) Masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan data base desa/kelurahan.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a) Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi;
  - b) Meningkatnya perilaku negatif anak dan remaja (minuman keras, seks bebas dan narkoba) serta makin meningkatnya pernikahan dini; dan
  - c) Keterbatasan kemampuan dan konsistensi pengelola UPPKS dalam pengembangan usaha karena kurangnya bimbingan/motivasi, permodalan, keterampilan dan pemasaran produk.
- 9) Perhubungan
  - a) Terbatasnya penyediaan sarana pengaman lalu lintas;
  - b) Masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam berlalu lintas;
  - c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan jalan sesuai tonase;

- d) Kondisi jalur trayek yang rusak dan diperlukan kebutuhan angkutan di daerah perbukitan atau daerah terpelosok; dan
  - e) Perlunya kesiapan dan kualitas dari alat pengujian kendaraan bermotor serta perlunya peremajaan alat pengujian kendaraan bermotor.
- 10) Komunikasi dan Informatika
- a) Belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi/ internet di seluruh wilayah (masih terdapatnya *blank spot area*) dan di seluruh area pelayanan publik;
  - b) Masih kurangnya ketersediaan peralatan dan sarana prasarana untuk pengendalian dan penataan pembangunan menara telekomunikasi; dan
  - c) Terbatasnya kemampuan SDM aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.
- 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- a) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi;
  - b) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agrobisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas; dan
  - c) Masih kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan jiwa kewirausahaan.
- 12) Penanaman Modal
- a) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
  - b) Belum optimal dan kurang inovatifnya promosi potensi investasi daerah;
  - c) Kurangnya daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten; dan
  - d) Masih kurangnya kemampuan investor dalam pengembangan usahanya.
- 13) Kepemudaan dan Olahraga
- a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
  - b) Kurangnya dorongan kepada generasi muda untuk berperan serta dalam pembangunan; dan
  - c) Belum optimalnya pemanfaatan data olahraga.
- 14) Statistik
- a) Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan; dan
  - b) Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD.

- 15) Kebudayaan
  - a) Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah;
  - b) Belum optimalnya pengelolaan benda-benda cagar budaya;
  - c) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas/aktivitas dan apresiasi seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya); dan
  - d) Perlunya aktualisasi seni budaya unggulan daerah.
- 16) Perpustakaan
  - a) Kurangnya minat dan budaya baca di kalangan siswa, guru dan masyarakat;
  - b) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sekolah dan masyarakat; dan
  - c) Masih kurangnya Bahan Pustaka baik dari kuantitas maupun kualitas di Perpustakaan Daerah.
- 17) Kearsipan
  - a) Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah;
  - b) Masih rendahnya apresiasi terhadap arsip daerah; dan
  - c) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan daerah.
- c. Urusan Pilihan
  - 1) Kelautan dan Perikanan
    - a) Keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
    - b) Keterbatasan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
    - c) Belum optimalnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk; dan
    - d) Masih kurangnya fasilitas pelabuhan yang menyebabkan banyaknya nelayan yang terpaksa berlabuh dan produknya diakui di daerah lain.
  - 2) Pariwisata
    - a) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana, fasilitas dan infrastruktur di obyek daerah tujuan wisata; dan
    - b) Belum optimalnya pengembangan potensi wisata daerah khususnya yang berbasis komunitas;
    - c) Masih rendahnya rata-rata lama tinggal dan angka kunjungan wisatawan ke obyek daerah tujuan wisata; dan
    - d) Masih rendahnya kesadaran, keterlibatan, dan peran serta masyarakat di sekitar obyek daerah tujuan wisata dalam pengembangan obyek wisata.
  - 3) Pertanian
    - a) Menurunnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian;
    - b) Belum optimalnya daya dukung, prasarana sarana dan penguasaan teknologi pertanian;

- c) Akses terhadap permodalan pertanian lemah, bahkan terhadap permodalan yang disediakan pemerintah;
  - d) Masih tingginya peredaran bibit pertanian yang belum sesuai standar kualitas dan kecenderungan penurunan kualitas bibit ternak;
  - e) Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;
  - f) Serangan Tanaman Pengusir Organisme (OPT), penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis belum sepenuhnya dapat dikendalikan;
  - g) Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak memenuhi standar kualitas;
  - h) Lambatnya adopsi teknologi dan masih bertumpu pada teknik usaha tani sederhana; dan
  - i) Dampak Perubahan Iklim.
- 4) Perdagangan
- a) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan perizinan usaha perdagangan;
  - b) Masih belum optimalnya upaya pengendalian distribusi dan harga barang; dan
  - c) Masih belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL.
- 5) Perindustrian
- a) Belum adanya kawasan industri;
  - b) Masih kurangnya kemampuan pengusaha dalam pengembangan usahanya
  - c) Adanya keterbatasan sarana produksi/peralatan serta keterbatasan akses pemasaran; dan
  - d) Terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi.
- 6) Transmigrasi
- a) Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran; dan
  - b) Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi transmigrasi.
- d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1) Perencanaan
- a) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan pembangunan;
  - b) Kurang optimalnya penyusunan perencanaan pembangunan berbasis penelitian dan pengembangan; dan
  - c) Kurang optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
- 2) Keuangan
- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;

- b) Keterbatasan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat daerah; dan
- c) Belum optimalnya penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  - a) Keterbatasan SDM aparatur;
  - b) masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur; dan
  - c) belum optimalnya pemanfaatan dan penyusunan database kepegawaian daerah.
- 4) Penelitian dan Pengembangan
  - a) terbatasnya SDM kelitbangan (fungsional peneliti); dan
  - b) belum optimalnya partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan.
- 5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)
  - a) Belum optimalnya implementasi *Clean and Good Governance*;
  - b) Belum idealnya penataan kelembagaan perangkat daerah;
  - c) Belum optimalnya penerapan dan pengembangan kapasitas pelayanan pemerintah daerah berbasis elektronik dan internet (*electronic Governmennt, e-Gov*);
  - d) Belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerjasama antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan; dan
  - e) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah dan atau lembaga swasta/ perorangan.